

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA



**Kondisi Hak Asasi Manusia
dan Gerakan Aspirasi Merdeka:
Gambaran 1999**



SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

**Kondisi Hak Asasi Manusia
dan Gerakan Aspirasi Merdeka:
Gambaran 1999**

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Hak Asasi Manusia
dan Gerakan Aspirasi Merdeka:
Gambaran 1999

Penulis

Theo P.A. van den Broek ofm

J. Budi Hernawan ofm

Penyunting

Candra Gautama

Diterbitkan atas kerjasama

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)

Keuskupan Jayapura

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta



Jakarta, 2001

Seri No. 9

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

**Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka:
Gambaran 1999**

Penulis

Theo P.A. van den Broek ofm

J. Budi Hernawan ofm

Penyunting

Candra Gautama

Penata Letak

Embonk

Cetakan Pertama, Januari 2001

Hak Cipta © SKP Keuskupan Jayapura, 2001

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

van den Broek, Theo P.A., J. Budi Hernawan

Memoria Passionis di Papua; Kondisi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua
dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999/Penulis: Theo P.A. van den
Broek ofm, J. Budi Hernawan ofm/Penyunting: Candra Gautama

-- cet. I -- Jakarta: LSPP, 2001;

viii + 113 hlm., 14 x 21 cm

ISBN 979-9381-08-x

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian

Jl. Kesehatan No. 4 Dok II Jayapura

Tel/Fax. (62) (967) - 534993

Email: sekkp@jayapura.wasantara.net.id

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

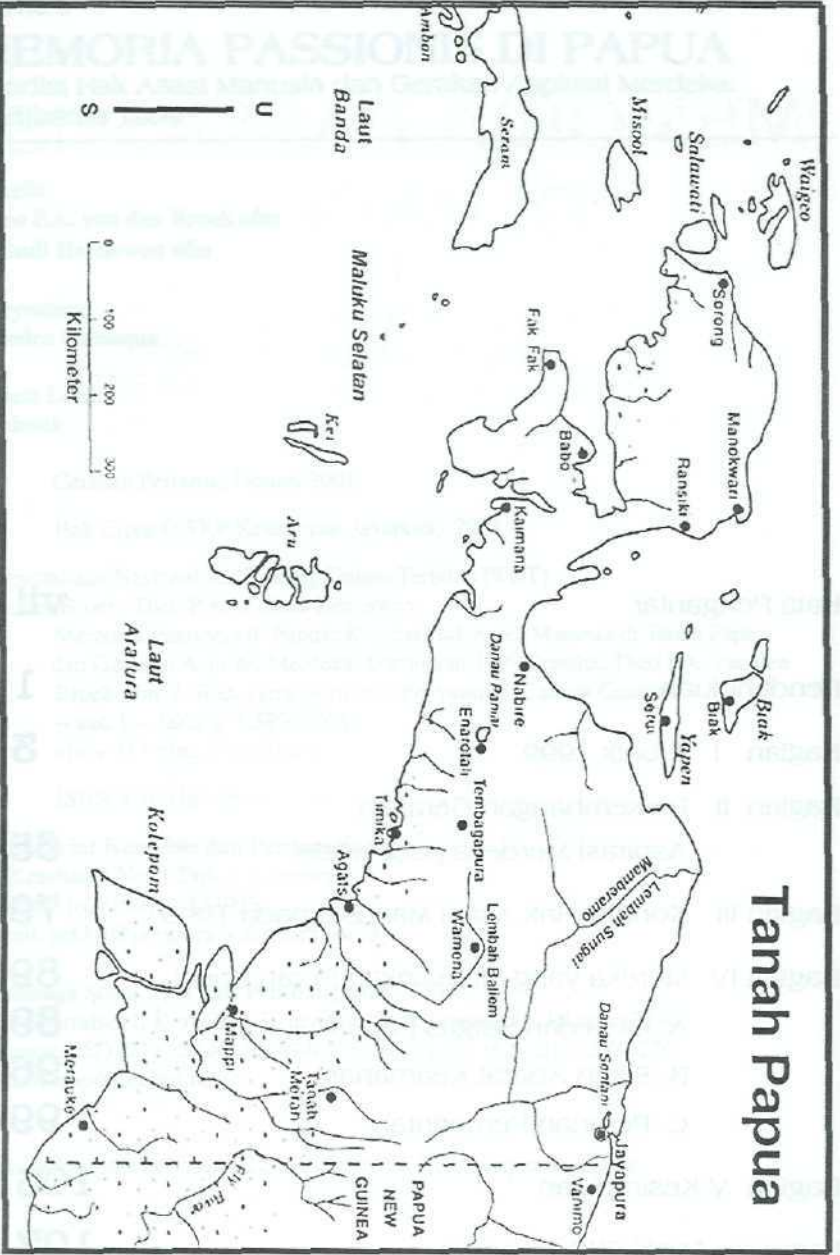
Jl. Penjernihan I, Kompleks Keuangan 12, Pejompongan, Jakarta 10210

Telepon: (62) (21) - 5746656, 5746276; Faksimile: (62) (21) - 5746276

Email: lspp@centrin.net.id

Diterbitkan atas kerjasama LSPP dengan SKP Keuskupan Jayapura

Kata Pengantar	vii
Pendahuluan	1
Bagian I Kronik 1999	3
Bagian II Perkembangan Gerakan Aspirasi Merdeka pada 1999	65
Bagian III Kondisi Hak Asasi Manusia pada 1999	79
Bagian IV Mereka yang Memainkan Peran Kunci	89
A. OPM dan Satgas Papua	89
B. Sikap Aparat Keamanan	96
C. Peranan Pemerintah	99
Bagian V Kesimpulan	103
Lampiran Profil SKP Jayapura	107



Tanah Papua

Kata Pengantar

Bersama ini Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menerbitkan satu analisis mengenai kehidupan di Tanah Papua sepanjang 1999. Penerbitan ini merupakan bagian dari visi SKP untuk mensosialisasikan masalah Papua yang kompleks kepada masyarakat luas, sekaligus mencari jalan keluar yang bersifat struktural dan berkesinambungan bersama berbagai pihak yang berkepentingan dengan masyarakat Papua.

Buku ini merupakan terbitan No. 9 Seri "MEMORIA PASSIONIS" (Ingatan Penderitaan); delapan terbitan lain, yang berbentuk laporan, untuk sementara waktu hanya untuk kalangan terbatas. Kendati penerbitannya agak tertunda, kami berharap refleksi dan analisis dalam buku ini lebih menyeluruh dan seimbang, sebatas kemampuan kami.

Uraian dalam buku ini pada intinya berisi dua hal: catatan peristiwa dan analisis masalah, dengan fokus kondisi hak asasi manusia (HAM) dan kehidupan sosio-politik di Papua. Sebagai uraian analitis buku ini memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kami berharap berbagai kalangan, terutama masyarakat yang menjadi pelaku sejarah, dapat memberikan tanggapan, catatan kritis, atau koreksi. Mengingat sepanjang 2000 banyak perkembangan baru yang dapat dicatat, kami berharap buku sejenis dapat disusun dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ahirkata, kami mengucapkan terimakasih kepada para relawan SKP yang membantu proses penyusunan buku ini. Semoga masyarakat luas dapat mengambil manfaat dari buku ini.

Teriring salam dan hormat kami,

Drs. Theo van den Broek OFM
Kepala SKP Keuskupan Jayapura

Pendahuluan

Tahun 1999 merupakan masa yang penuh peristiwa bagi masyarakat Papua. Pada awal tahun, masyarakat Papua untuk pertama kali, setelah sekian puluh tahun, berkesempatan mengungkapkan isi hati mereka kepada penguasa, dalam hal ini Presiden B.J. Habibie.¹ Kesempatan itu menjadi titik awal lahirnya suatu gerakan kerakyatan yang menjadi medan pergulatan banyak orang dan terus mencari bentuk akhirnya.

Kendati berada di tengah-tengah semangat reformasi, masih terjadi banyak peristiwa yang menyakitkan hati masyarakat Papua. Berbagai peristiwa tersebut menyangkut pelanggaran HAM, birokrasi yang tidak melayani kebutuhan rakyat, dan praktik-praktik intimidasi. Melalui "Buku Tahunan" ini kami berusaha menggambarkan keadaan tersebut dan tanggapan berbagai lembaga. Gambaran kami didasarkan pada laporan berbagai media massa cetak dan lembaga.

Sudah tentu apa yang terjadi di wilayah timur Republik Indonesia ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa nasional yang mewarnai perkembangan Indonesia, seperti: (1) proses pelepasan Timor Timur, (2) pecahnya kerusuhan di Maluku, (3) kekerasan yang berkepanjangan di Aceh, dan (4) Pemilu 1999 serta pembentukan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Segala bentuk pergumulan masyarakat

¹ Pertemuan diselenggarakan pada 26 Februari 1999

Indonesia (termasuk pemerintahnya) untuk keluar dari belenggu sistem Orde Baru juga sangat mewarnai suasana sosial-politik di Tanah Papua.

Buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian I berupa catatan berbagai peristiwa yang kami anggap penting sepanjang 1999. Bagian II berupa uraian mengenai perkembangan Gerakan Aspirasi M(erdeka) pada 1999. Bagian III berupa analisis mengenai kondisi HAM di Papua. Bagian IV berisi uraian mengenai pihak-pihak yang cukup berperan dalam kehidupan sosio-politik di Papua, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM), Satuan Tugas (Satgas) Papua, TNI/Polri, serta pemerintah daerah. Bagian V berupa kesimpulan umum. Untuk memudahkan pembaca memahami perkembangan yang ada, di setiap bagian kami memaparkan sejumlah peristiwa kunci dan menganalisisnya. Dengan struktur semacam ini kami berharap pembaca dapat memperoleh gambaran suasana sosial-politik yang dialami masyarakat Papua sepanjang 1999.

Bagian 1 Kronik 1999

JANUARI

3 Januari

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Fakfak, Letkol (Pol.) Drs Sukamto Handoko, menahan wartawan *Antara*, M.V. Repi. Tindakan ini, yang dilakukan tanpa surat panggilan dan berita acara, memicu unjuk rasa kalangan wartawan pada hari berikutnya. Atas kejadian tersebut Wakapolda Irian Jaya meminta maaf kepada wartawan dan menyatakan Kapolres tidak bertindak profesional dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

4 Januari

Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi melantik A.P. Youw sebagai Bupati Nabire periode 1999-2004. Pelantikan diiringi polemik mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kasus korupsi yang melibatkan A.P. Youw. Gubernur berjanji akan mencopot A.P. Youw jika terbukti bersalah.

6 Januari

Panglima Daerah Militer (Pangdam) Trikora Mayjen (TNI) Amir Sembiring menyatakan, penarikan pasukan yang berasal dari luar Irian Jaya belum saatnya karena masih diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Ia juga menyatakan bahwa

Kodam Trikora akan merekrut 1.000 orang untuk menjadi anggota keamanan rakyat (kamra).

8 Januari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura mendesak Gubernur Numberi untuk mengadakan pemilihan ulang Bupati Nabire. Alasannya, bupati yang baru pernah dihukum satu tahun penjara karena terlibat kasus korupsi.

10 Januari

Menanggapi keputusan Kodam Trikora untuk tidak menambah dan tidak mengurangi pasukan militer, Drs. Very R. Pioh, dosen Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura, menyatakan, "Dari kaca mata masyarakat awam niat baik ABRI seakan-akan mengesankan ABRI tidak konsekuen dengan pernyataan semula. Mestinya pencabutan Irian Jaya sebagai status DOM (daerah operasi militer), konsekuensinya ditindaklanjuti penarikan satuan nonorganik."

11 Januari

- ❖ Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) Trikora, Letkol (Inf.) Herry Risdiyanto, mengatakan bahwa kondisi Irian Jaya, Aceh, dan Timtim berbeda. Dengan berbagai pertimbangan, Kodam Trikora tidak akan ikut-ikutan mengurangi pasukan nonorganik. Keputusan ini, kata Herry, merupakan itikad baik Kodam dalam menyikapi aspirasi masyarakat Irian Jaya, khususnya yang berada di pedalaman.
- ❖ Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer (Aster Kasdam) Trikora, Kol. (Art.) Wais Ningkeula, menyayangkan wakil rakyat maupun pengamat yang hanya duduk di belakang meja, dan tidak pernah melihat langsung kondisi masyarakat di pedalaman serta hasil karya ABRI di sana, tapi menghujat dan mencurigai ABRI bertindak macam-macam.

13 Januari

Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI Wiranto menegaskan,

“Sebagai pertanggungjawaban ABRI sudah kita perintahkan segera mengusut tuntas prajurit yang melakukan tindakan yang indisipliner. Apa pun pangkat yang mereka miliki, supaya secepatnya bisa disidangkan dengan proses yang jujur, adil, dan terbuka.”

22 Januari

Sekitar 20 orang warga Skamto mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Irian Jaya untuk meminta PT Hanurata diusir dari hak ulayat hutan wilayah Skamto karena dinilai mendiskreditkan masyarakat.

26 Januari

Menanggapi maraknya isu sembilan provokator telah masuk ke Jayapura, Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI), Pdt. Herman Saud, dan Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM, mengatakan bahwa jika benar-benar ada provokator yang masuk ke Jayapura maka pihak intelijen harus membuktikan siapa oknum-oknumnya untuk kemudian menangkapnya dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

FEBRUARI

4 Februari

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Irian Jaya berhasil menduduki posisi empat besar dalam mengungkap kasus korupsi sejak 1998 di bawah Kejaksaan Agung, Kejati Sumsel, Kejati DKI Jakarta, dan Kejati Yogyakarta.

11 Februari

Pangdam Trikora menyatakan bahwa Kodam Trikora tidak menutup diri, apalagi memusuhi kelompok OPM di Irian Jaya. Sebaliknya, Kodam selalu siap berembuk dengan siapa saja, termasuk pihak OPM.

15 Februari

Niat Pangdam Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring untuk berdialog dengan tokoh OPM Mathias Wenda makin jelas, kendati waktunya belum pasti.

16 Februari

Kesiapan PT Freeport Indonesia untuk membayar royalti lebih besar kepada Pemerintah Indonesia dinilai Econit hanya bualan semata. Alasannya, janji PT Freeport tersebut tidak realistis. Anehnya, Pemerintah Indonesia seolah terbuai oleh janji manis perusahaan penambangan emas dan tembaga tersebut.

17 Februari

- ❖ Niat 18 tokoh yang mengatasnamakan diri OPM di Jayapura untuk berdialog dengan Pangdam Trikora dinilai positif oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Irian Jaya, Budi Baldus Waromi.
- ❖ Mantan Gubernur Irian Jaya dan juga putra daerah, Barnabas Suebu, S.H., dilantik menjadi dutabesar untuk Meksiko dan Panama.

18 Februari

Rencana dialog Pangdam Trikora dengan OPM terancam batal karena agenda dialog belum jelas.

19 Februari

Dialog antara Pangdam Trikora dan OPM batal sehingga utusan OPM pulang.

21 Februari

- ❖ Rencana dialog Presiden B.J. Habibie dengan masyarakat Irian Jaya makin jelas menyusul terbitnya surat Mensesneg tanggal 2 Februari 1999 dan radiogram Gubernur Irian Jaya No. 200.06/401/set tanggal 17 Februari 1999.
- ❖ Suku-suku di Merauke menginginkan agar dialog dengan Presiden Habibie jangan direkayasa.

23 Februari

Pangdam Trikora menyatakan, "Batalnya Dialog Nasional antara utusan Mathias Wenda dan Pangdam karena kedatangan 18 orang OPM ke Jayapura itu sebelumnya tidak memberikan informasi."

26 Februari

- ❖ Masyarakat Papua, melalui suatu perwakilan yang disebut "Tim 100", mengungkapkan aspirasi mereka kepada Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Tim 100, Tom Beanal, menyatakan bahwa masyarakat Papua sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah Indonesia. Penderitaan rakyat Papua selama 38 tahun sudah cukup menjadi alasan untuk tidak lagi berintegrasi dengan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Presiden diminta untuk mengakui kedaulatan Papua Barat sebagaimana pada 1 Desember 1961. Lantaran tidak siap menerima aspirasi kemerdekaan rakyat Papua, Presiden meminta kepada anggota Tim 100 untuk merenungkan kembali aspirasi mereka.
- ❖ Menanggapi aspirasi Tim 100, Mensesneg Ir. Akbar Tanjung menyatakan bahwa tuntutan merdeka tidak mewakili aspirasi rakyat Irian Jaya. Sebaliknya, rakyat Irian Jaya meminta diberi otonomi dan pembangunan ditingkatkan, sebagaimana diungkapkan oleh K.H. Mara, mantan pejuang Trikora.

MARET

1 Maret

Menurut Ny. Dra. Yemima Handono, anggota MPR utusan Irian Jaya, tuntutan masyarakat Irian Jaya untuk merdeka, seperti diungkapkan peserta dialog dengan Presiden Habibie, tidaklah mudah terwujud. Yang lebih penting, kata Yemima, adalah mengusahakan agar pembangunan benar-benar menyentuh dan menyejahterakan masyarakat Irian Jaya sehingga mereka merasa hidup di atas tanahnya sendiri. Hal inilah yang diperjuangkan oleh Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi.

2 Maret

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah (Kabag Humas Pemda) Kabupaten Jayapura Habel Suwae menegaskan, peserta Dialog Nasional yang baru saja kembali dari Jakarta bertanggungjawab untuk menjelaskan hasil dialog kepada masyarakat Irian Jaya.

3 Maret

- ❖ Di Kabupaten Yapen Waropen isu Papua merdeka dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menyebarkan selebaran yang isinya meminta sumbangan dana kepada para pengusaha bila masih ingin berusaha di wilayah Irian Jaya.
- ❖ Muncul selebaran yang isinya mengusir warga pendatang. Theys H. Eluay, Ketua Lembaga Adat Irian Jaya yang juga mengaku sebagai pemimpin Papua, segera memerintahkan anak buahnya di Posko Ondofolo untuk mencabut seluruh selebaran dan melaporkan ke Polsek Sentani. Theys H. Eluay menyatakan dirinya siap dibantai terlebih dahulu bila ada pihak yang berniat mengusir pendatang dari Irian Jaya.

4 Maret

Aster Kasdam Trikora Kol. (Inf.) Wais Ningkeula mengatakan, “Jangan kita keliru menafsirkan petunjuk dan imbauan Presiden yang mengajak merenung kembali. Merenungkan yang dimaksud bukan mendirikan suatu negara baru, tetapi bagaimana membangun Irian ke depan demi kesejahteraan masyarakat di daerah ini.”

5 Maret

- ❖ Don Flassy, M.A., Ketua Komite Independen Papua, menyatakan, “Dengan dialog kita bisa mencari jalan keluar atas dua tawaran yang diajukan karena dengan dialog berarti ada yang menyampaikan aspirasi dan ada yang menanggapi. Saya sendiri kalau ditanya pilih “O” atau “M” saya bilang pilih dialog saja.”
- ❖ Raja Muda Ati-ati Fakfak, Inya Bay, S.E., menilai permintaan merdeka serta kedaulatan penuh bagi Irian Jaya kepada Presiden

B.J. Habibie merupakan pernyataan sepihak.

- ❖ Kepala Suku Besar Lembah Baliem, Nico Huby, mengatakan bahwa masyarakat Jayawijaya menginginkan pembangunan di Irian Jaya melalui otonomi seluas-luasnya.

7 Maret

- ❖ Mantan anggota Tentara Teluk Cenderawasih, Yakob Rumpaidus, dan anggota pasukan Gerilyawan 200, Jonathan Pariri, mengharapakan pemerintah pusat segera memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Propinsi Irian Jaya. Selain otonomi luas, Irian Jaya harus dimekarkan sesegera mungkin demi mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
- ❖ Yoke Isir (salah seorang peserta dialog dari Kabupaten Sorong) meminta kepada segenap masyarakat Papua pro-kemerdekaan untuk bersabar dan tidak berbuat hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan dan perjuangan, sebab keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan proses yang panjang.
- ❖ Ny. Basik-basik, tokoh masyarakat Merauke, menyatakan bahwa masyarakat harus siap menerima apa pun keputusan Presiden Habibie karena kemerdekaan bukanlah suatu proses yang singkat. Pernyataan dilontarkan dalam pertemuan antara empat orang peserta Dialog Nasional dan masyarakat serta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Merauke.
- ❖ Naligis Kurisi, Kepala Adat Lembah Baliem Wilayah Dua, mengaku kurang puas atas hasil Dialog Nasional karena aspirasi yang disampaikan utusan Jayawijaya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keinginan utusan Jayawijaya, kata Naligis Kurisi, bertentangan dengan falsafah negara RI.

8 Maret

Legitimasi Tim 100 dipertanyakan, karena aspirasi yang mereka sampaikan dinilai oleh salah satu utusan, Gerson Olua, keluar dari *draft* TOR (*term of reference*) Terpadu 4 yang digodok Tim FORERI (Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya), pemerintah daerah (pemda), dan pemerintah pusat. Menurut Olua, aspirasi mayoritas masyarakat Irian Jaya, yakni otonomi, seolah tertutup aspirasi "M".

9 Maret

Sejumlah utusan Dialog Nasional diintimidasi oleh pihak yang tidak dikenal. Mereka yang diintimidasi ialah Herman Wayoi, Johanis Bonay, Don Flassy (Jayapura), Max Mahuse, dan John Wob (Merauke).

10 Maret

Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi menyatakan menolak tuntutan kemerdekaan Papua dan meminta otonomi khusus bagi Propinsi Irian Jaya.

14 Maret

- ❖ Menanggapi isu sebagian masyarakat akan memboikot Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa pesta demokrasi tersebut tidak boleh gagal sebab sangat penting untuk menentukan nasib bangsa. Lebih jauh Numberi menyatakan, sukses tidaknya pemilu menjadi tanggungjawab bupati atau walikota. Bila pemilu tak sukses alias gagal bupatinya akan dicopot.
- ❖ Freddy Numberi menyatakan bahwa Dialog Nasional tidak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama antara FORERI, Setneg, dan Pemda Irian Jaya. “Yang kita harapkan dalam dialog tersebut terjadi komunikasi dua arah antara Presiden dengan masyarakatnya tentang masalah yang ada. Ternyata dalam kegiatannya sendiri tidak ada dialog sama sekali. Hanya penyampaian aspirasi ingin merdeka,” kata Numberi.

15 Maret

Muncul isu anggota gerakan pengacau keamanan (GPK) menembaki warga transmigran di Muting SP IV dan Bupul XIII, Merauke (versi aparat keamanan). Insiden tersebut lebih merupakan bentrokan antara sekelompok warga Papua New Guinea (PNG) dan sekelompok masyarakat setempat menyangkut “soal perempuan” (versi perwakilan Gereja setempat).

28 Maret

Drs. Obeth Badii, M.A., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT)

Fajar Timur, meninggal dunia secara mencurigakan. Masyarakat suku Mee berunjuk rasa di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura sehingga timbul ketegangan di Kota Abepura.

30 Maret

Acara pemakaman jenazah Drs. Obeth Badii, M.A. di Tanah Hitam berlangsung aman dan tertib. Jenazah diusung dari rumah duka di Kompleks SMU Taruna Bhakti Waena dan diantar ribuan massa hingga ke makam dengan berjalan kaki.

APRIL

6 April

Status Irian Jaya sebagai bagian dari wilayah NKRI digugat oleh salah satu tokoh OPM, Yance Hembring. Pada 25 Maret Yance mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura.

9 April

- ❖ Theys H. Eluay menilai bahwa pilihan rakyat Papua untuk tidak ikut Pemilu 1999, sebagaimana dinyatakan dalam dialog dengan Presiden Habibie, bukan untuk memboikot pemilu. Menurut ketentuan perundang-undangan negara RI, setiap warganegara berhak memilih atau tidak memilih.
- ❖ Kendati Theys H. Eluay menolak dijadikan calon legislatif Golongan Karya (Golkar), partai politik ini tidak patah semangat. Ketua DPD Partai Golkar Irian Jaya, T.N. Kaiway, S.H., tampak berusaha kuat menggandeng Theys H. Eluay.

15 April

Michael Kareth, orang yang menyatakan dirinya sebagai Presiden West Papua Congress, akan dideportasi dari PNG. Menurut Dutabesar RI di PNG, Benny Mandalika, Pemerintah PNG tidak mau wilayahnya digunakan oleh kaum separatis yang bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

17 April

- ❖ Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Irian Jaya Brigjen (Pol.) Hotman Siagian mengeluarkan maklumat No. MK/01/IV/1999 tertanggal 17 April 1999. Isi maklumat: melarang mensosialisasikan hasil Dialog Nasional dengan Presiden Habibie dan melarang mendirikan posko-posko Papua Barat karena dianggap meresahkan masyarakat.
- ❖ Theys H. Eluay meminta kepada Kapolda untuk menarik maklumat No. MK/01/IV/1999. Menurut Theys, maklumat Kapolda dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Bila kejadian tersebut benar-benar terjadi, Kapolda harus bertanggungjawab.

19 April

Limabelas anggota Tim 100, menanggapi maklumat Kapolda, menyatakan, “Kami merasa maklumat Kapolda tidak adil, dengan menyatakan bahwa ini gerakan separatis. Karena hasil dialog sendiri adalah aspirasi murni masyarakat dan secara demokratis disampaikan dengan jujur, sopan, dan terbuka di hadapan Presiden B.J. Habibie. Di sisi lain sosialisasi yang dibuat selama ini, dilihat turut menciptakan kamtibmas di tengah masyarakat sehingga masyarakat non-Papua pun merasa aman. Karena itu kami minta maklumat itu perlu ditinjau kembali sehingga jangan sampai ada korban.”

20 April

Ketua Umum Partai Buruh Nasional (PBN) Dr. Muchtar Pakpahan mengatakan, referendum merupakan satu-satunya cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui secara internasional untuk mewujudkan kemerdekaan Papua Barat. Memang ada cara lain selain referendum, yakni perjuangan fisik, tetapi akan sulit terwujud.

21 April

- ❖ Ketua Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I Irian Jaya Drs. Ben Vincent Djeharu menilai bahwa aspirasi merdeka yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Irian Jaya menjadi

duri bagi pelaksanaan Pemilu 1999. “Memang, tak bisa dipungkiri adanya aspirasi “M” itu merupakan duri dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Bahkan boleh dikata ini menjadi kerikil tajam dalam pelaksanaan pemilu di Irian,” ujar Vincent.

- ❖ Ketua DPD PDI Irian Jaya Drs. Anthonius Rahail menyatakan, pernyataan Ketua Umum PBN Dr. M. Pakpahan bahwa referendum sebagai satu-satunya cara yang bisa dipertanggungjawabkan tidak tepat.

22 April

- ❖ Meskipun banyak kalangan meminta maklumat Kapolda dicabut, Kapolda tetap memberlakukan maklumat tersebut.
- ❖ Presiden Habibie meminta pemerintah untuk memekarkan Propinsi Irian Jaya menjadi tiga propinsi sebelum Pemilu 7 Juni 1999. Rencana ini mengundang komentar banyak pihak. Sejak itu bergulirlah polemik tentang pemekaran Propinsi Irian Jaya.

25-30 April

Terjadi pembubaran Posko Papua Barat di Depapre (25/4), di Biak (26/4), dan di Serui (29/4), yang menimbulkan bentrokan antara warga asli Serui dan pendatang serta aparat keamanan. Terjadi pelemparan batu terhadap rumah-rumah pendatang.

30 April-1 Mei

Theys H. Eluay menyatakan, isu pemekaran wilayah di Irian Jaya tidak aktual lagi. Persoalan yang lebih mendesak adalah mencari jalan untuk memenuhi tuntutan rakyat dan mengembalikan kedaulatan rakyat Papua. Rakyat akan terus menuntut memisahkan diri selama pemerintah masih membodohi masyarakat dengan kebijakan politik yang kurang transparan dan dengan maksud-maksud tertentu di belakangnya.

MEI

2 Mei

Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi optimis terhadap rencana

pemekaran Irian Jaya, walaupun diakui pelaksanaannya tidak mudah dan butuh waktu yang lama.

3 Mei

Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa tidak ada kompromi bagi paham komunisme dan tidak ada tempat bagi pihak-pihak yang ingin melepaskan diri dari NKRI. "Mereka akan berhadapan dengan seluruh kekuatan yang ada di negara RI," kata Habibie.

4 Mei

- ❖ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran pemilih di Irian Jaya hingga 15 Mei 1999, sebab yang terdaftar baru 50,73 persen dari seluruh calon pemilih.
- ❖ Tiga tokoh masyarakat, Bram Atururi, T.N. Kaiway, dan Theys H. Eluay, mendukung penggantian nama Propinsi Irian Jaya menjadi Papua. Menurut mereka, nama Irian Jaya dilatarbelakangi kepentingan politik.

5 Mei

- ❖ Dua peleton anggota Polres Fakfak dan dua peleton anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 1706 Fakfak membubarkan Rapat Papua Barat di Fakfak. Tujuh puluh empat orang peserta rapat dibawa ke Polres Fakfak, dan sebelumnya polisi menggeledah dua rumah penduduk dan menyita dokumen pribadi serta dokumen Papua.
- ❖ Empat karyawan PT Perkebunan (PTP) II Arso dibunuh dan 11 orang disandera. Mereka yang dibunuh ialah Bangit, Prayitno, Paino, dan Edi Pranoto, yang ditemukan kemudian di Desa Yamara PIR V. Pemerintah menuduh GPK sebagai pelakunya, sementara beberapa tokoh masyarakat menyatakan kejadian tersebut sebagai rekayasa pihak yang berwajib.
- ❖ Selama beberapa minggu muncul berita yang simpang-siur mengenai pembunuhan dan penyanderaan tersebut. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui duduk perkara kejadian tersebut. Berita yang menonjol adalah upaya pembebasan para sandera.

12 Mei

Prof. Dr. Emil Salim menyatakan, "Seharusnya perlu atau tidak pemekaran ditentukan oleh masyarakat dan orang di daerah ini. Karena yang dimekarkan adalah orang di daerah, bukan orang di Jakarta. Jadi janganlah tergesa-gesa, jangan ada kesan terburu-buru atas pertimbangan politik."

14 Mei

Theys H. Eluay mengeluarkan selebaran No. 1/posko-doa utama/5/99 tertanggal 9/5/99 yang berisi seruan kepada masyarakat Papua dan seluruh Gereja di Papua untuk berdoa bersama.

17 Mei

- ❖ Pertemuan antara 141 kepala suku se-Jayapura dan ABRI di Hotel Sentani Indah menghasilkan kesepakatan yang isinya 11 tetua adat Sentani siap menyukseskan Pemilu 1999.
- ❖ Polres Manokwari mendapat telepon yang mengadukan bahwa ada orang mabuk di daerah Sanggeng. Polisi turun ke lapangan dan menemukan Naftali Sawaki dalam keadaan mabuk. Karena itu, pihak kepolisian membawanya dengan mobil patroli menuju Mapolres. Akan tetapi, setelah berjalan sekitar 50 meter, Naftali berusaha meloloskan diri dengan melompat dari mobil sehingga terjatuh dan bagian belakang kepalanya terbentur jalan. Dia dibawa ke RSUD di Kampung Ambon dan meninggal tiga hari kemudian. Akibatnya masyarakat mengamuk karena mencurigai Naftali meninggal akibat dipukul polisi dan menuntut Kapolres Manokwari Letkol (Pol.) R.E. Hutabarat mundur.

18 Mei

Guna mengamankan jalannya kampanye, pemilu, dan Sidang Umum MPR, Pangdam Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring mem-BKO-kan tiga batalyon ke Polda Irian Jaya (BKO = bawah kendali operasi).

24 Mei

Dua wanita, Yulita Dendegau (14) dan Merry Agimbau (20), ditembak di KM 64 Sentriko Topo, Nabire, pada pukul 14.30 WIT.

Insiden ini merupakan buntut dari bentrokan yang berawal dari perselisihan dengan seorang tukang emas yang menyatakan emas yang ditawarkan kepadanya palsu. Akibat penembakan tersebut, yang diduga kuat dilakukan oleh seorang prajurit, masyarakat resah. Mereka memasang penghalang jalan sehingga rombongan Partai Murba tidak bisa berkampanye di pedalaman.

27 Mei

- ❖ Theys H. Eluay menyerukan agar masyarakat Papua berpartisipasi dalam pemilu supaya aspirasi mereka tersalurkan.
- ❖ Seorang anggota polisi di Wamena menembak seorang perempuan, Weniki Wenda, dan peluru bersarang di paha kiri.

31 Mei

Sebelas warga Arso yang disandera oleh kelompok OPM Hans Bomay dibebaskan oleh tentara PNG di Lembah Bewani dan akan diserahkan kepada pihak Kodam Trikora.

JUNI

1 Juni

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Akbar Tanjung, dalam kampanye di Sentani menegaskan bahwa rakyat Irian Jaya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Untuk itu Partai Golkar tidak mendukung aspirasi merdeka yang disampaikan oleh Tim 100 kepada Presiden Habibie.

2 Juni

Sebelas orang sandera yang dibebaskan oleh kelompok OPM Hans Bomay diserahkan kepada Pemerintah PNG. Pada hari itu juga para sandera dibawa dengan helikopter ke Kodam Trikora untuk selanjutnya menjalani karantina di RS Martin Indey. Para korban tidak boleh diwawancarai oleh siapa pun, termasuk wartawan.

6 Juni

Wilayah Abepura hingga Entrop terkena banjir akibat hujan deras

dan tersumbatnya berbagai saluran pembuangan sehingga Perumnas IV Padang Bulan tenggelam. Akibat bencana tersebut 4.700 warga Perumnas IV mengungsi ke enam pos penampungan. Salah seorang korban jiwa adalah Zakharias Sudir.

7 Juni

- ❖ Pemilihan Umum 1999 berlangsung.
- ❖ Hadi Prayitno, seorang tentara dari kesatuan Yonif 515/Kostrad, menembak Robert Young asal Genyem. Insiden ini terjadi karena mobil *pick-up* yang ditumpangi Robert tidak mau berhenti saat dua anggota TNI yang berdiri di pinggir jalan hendak menumpang. Robert, yang berada di bagian belakang mobil, langsung meninggal dunia dan Yan (sopir) luka-luka di bagian siku. Saat jenazah korban diarak di Kota Jayapura timbul ketegangan. Atas insiden tersebut Pangdam Trikora Amir Sembiring meminta maaf. Pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp500 juta.
- ❖ 227 kepala keluarga transmigran Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) 5 SP 5 Urfas, Waropen Bawah, lari dari lokasi transmigrasi.

9 Juni

- ❖ Sekitar 2.000 peserta pemilu dari Desa Aitiri disuruh pulang oleh Ketua Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu karena persediaan kartu suara tidak mencukupi.
- ❖ Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Amungme dan Komoro berunjuk rasa menentang rencana penggantian Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Timika Allo Rafra, S.H. oleh Drs. Momot. Alasannya, Allo Rafra telah mengenal dan menyatu dengan masyarakat.

10 Juni

Masyarakat Desa Jigi II, Mapnduma, menolak ikut pemilu karena mendapat surat dari Daniel Kogoya, tokoh OPM dari Pegunungan Tengah, yang isinya menyatakan masyarakat tidak usah ikut Pemilu 1999. Alasannya, selama lima kali pemilu Pemerintah Orde Baru hanya mengobral janji. Atas imbauan tersebut Bupati Hubi turun ke lapangan dan memberikan pengarahan. Akhirnya sebagian

masyarakat Desa Jigi II bersedia mencoblos.

14 Juni

Tujuh puluh mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Jayapura (STTJ) yang tergabung dalam Kelompok Peduli Banjir yang dipimpin Hasbi Suiwaib berunjuk rasa menuntut pemda, Perum Perumnas, Bappeda, dan walikota Jayapura untuk segera mengatasi masalah banjir dan memperhatikan korban yang ditampung di tenda-tenda. Mahasiswa memberi batas waktu 7x24 jam kepada Walikota Jayapura.

18 Juni

Warga KPR BPD yang terkena bencana banjir menuntut dipindahkan ke tempat yang layak, sementara warga Blok A Perumnas IV Waena menuntut supaya diberi ganti rugi. Masyarakat mengaku pemerintah dan Perumnas banyak berjanji tetapi belum ada bukti. Di pihak lain, Lurah Hedam Eveline The merasa kesal karena jumlah bantuan beras sebanyak dua ton dari dinas sosial untuk korban banjir ternyata kurang dari dua ton (13 karung). Alasannya, Dinas Sosial dan Kanwil Sosial Irian Jaya tidak memiliki data korban banjir.

19 Juni

Warga Merauke, dalam suatu diskusi di Gedung Mean Sai, menyatakan menolak rencana pemekaran Propinsi Irian Jaya. Alasannya, rencana tersebut tidak melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat Merauke. Menurut mereka, pemekaran seharusnya dimulai dari tingkat kabupaten, baru kemudian tingkat propinsi.

21 Juni

Sekitar 70 warga Perumnas IV Waena Blok B dan C berunjuk rasa di kantor gubernur. Mereka menuntut Gubernur Freddy Numberi segera menyelesaikan masalah bantuan bencana banjir di Padang Bulan. Warga juga menuntut ganti rugi kepada pihak Perum Perumnas sebesar Rp7 milyar atas kerugian yang mereka derita.

24 Juni

Karyawan dan satpam PT Kodeco dianiaya oleh lima oknum TNI AD di Kecamatan Dawai Waropen Timur pada 31 Mei 1999. Penganiayaan terjadi karena para korban menegur kelima pelaku yang mengambil ratusan tripleks untuk kepentingan pribadi.

25 Juni

Komunitas Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (KMPJ) yang diketuai Musa Mabel, S.Sos berunjuk rasa di PPD I Irian Jaya guna menolak tiga calon legislatif (caleg) Golkar untuk Jayawijaya. Menurut pengunjuk rasa, salah satu caleg bukan putra Jayawijaya dan yang lain dituduh terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga calon yang ditolak ialah T.N. Kaiway, Demas Patty, dan Paulus Sumino. KMPJ mengusulkan tiga nama lain, yakni Theo Sitokdana, Paskalis Kosay, dan Petrus Kombo.

26 Juni

Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa Presiden B.J. Habibie menyetujui dana penanggulangan banjir di Padang Bulan sebesar Rp50 milyar. Dana itu akan dipergunakan untuk proyek pemukiman kembali warga Perumnas IV Waena dan KPR BPD ke lokasi lain serta memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak. Gubernur juga mengemukakan usulan untuk memberikan uang kontrakan selama satu tahun sebelum rumah Tipe RSS (rumah sangat sederhana) seharga Rp20 juta dibangun.

27 Juni

- ❖ Sekretaris DPD Partai Golkar A.G. Subagi menyatakan bahwa DPD Golkar Irian Jaya tetap mencalonkan B.J. Habibie sebagai calon presiden.
- ❖ Theys H. Eluay menyerukan agar masyarakat Papua tidak terpengaruh oleh isu yang menyatakan pada 1 Juli akan terjadi aksi unjuk rasa dan pengibaran bendera Papua. Masyarakat diminta berdoa sebagai ganti kegiatan unjuk rasa.

28 Juni

- ❖ Sekretaris Badan Koordinasi LMA Suku Dani, Amaten Wanimbo,

mempertanyakan kebenaran tuntutan KMPJ. Dia menilai aspirasi KMPJ direkayasa.

- ❖ Anggota MPR Philip Wona menyatakan bahwa bantuan dana Rp50 milyar untuk korban bencana banjir di Padang Bulan jangan “diproyekkan”.
- ❖ Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi Depkeh No. F4-11.01.02-3.0178, lima orang warga Irian Jaya dicekal selama enam bulan mulai 28 Juni 1999. Mereka ialah Benny Giay, Willy Mandowen, Octo Mote, Tom Beanal, dan Herman Awom. Kelima orang tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam memajukan Dialog Nasional dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Papua. Tindakan ini dinilai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Clementino dos Reis Amaral, sebagai melanggar HAM.
- ❖ Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polda Irian Jaya Mayor Pol. Suripatty menilai imbauan Theys H. Eluay pada 27 Juni sebagai bijaksana. Dia menyatakan kepolisian tidak akan melarang warga yang akan menyatakan aspirasi, pendapat, atau protes. Namun, warga diharapkan menyalurkannya lewat jalur yang ada dan – memberitahu pihak kepolisian tiga hari sebelum aksi dilakukan.

29 Juni

- ❖ Ketua DPD Golkar Irian Jaya T.N. Kaiway menulis surat kepada Kapolres Jayapura untuk “mengamankan” Musa Mabel yang memimpin aksi unjuk rasa KMPJ. Alasannya, Musa Mabel mengatasnamakan kader Golkar, padahal Musa sudah keluar dari Golkar dan menjadi caleg dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB).
- ❖ Pangdam Trikora Amir Sembiring menyatakan bahwa peringatan “Uncen Berdarah” boleh saja tetapi mesti dipikirkan apa manfaatnya. Kodam tidak akan melarang aksi tersebut. Pangdam menyatakan ada tiga pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut: (1) penganiayaan terhadap Sersan (Pol.) Dahlan, (2) pengambilan pistol Sersan Dahlan selama dua malam tanpa hak, dan (3) penembakan Steven Suripatty dan Corina Onim oleh prajurit.
- ❖ Pemimpin Komite Nasional Pemuda Papua Barat, Isak

Yapsenang, mengaku kecewa karena rombongannya gagal menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya, T.N. Kaiway, untuk menyampaikan aspirasi Tim 100 dan menolak pemekaran wilayah Irian Jaya karena tidak melibatkan masyarakat.

30 Juni

- ❖ Menanggapi rencana peringatan “Uncen Berdarah” Wakil Gubernur (Wagub) Djopari mengatakan, “Kita harus tahu bahwa dalam alam demokrasi, demo itu kan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik. Tapi kita harus melihat dampak dari suatu aktivitas pengerahan massa yang besar. Apakah aktivitas ini akan berjalan sesuai norma yang ada, apakah aktivitas ini akan tetap memelihara persatuan dan kesatuan, dan apakah aktivitas yang demikian itu akan menjamin keamanan dan ketertiban?”
- ❖ Menteri Sosial Yustika Baharsyah, tatkala mengunjungi lokasi banjir di Perumnas IV Waena, mengecewakan masyarakat karena hanya mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Irian Jaya, Ir. Harjadi, dan tidak berdialog dengan korban bencana.

JULI

1 Juli

- ❖ Rektor Uncen, Ir. F. Wospakrik, dan Wagub Djopari menyatakan agar mahasiswa Jayapura jangan meniru gerakan demonstrasi mahasiswa di Jawa. Hal ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap peringatan kematian Steven Suripatty.
- ❖ Bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih oleh masyarakat di depan Kantor Camat Nimboran dan disaksikan sekitar 400 orang. Aksi diadakan atas perintah Yance Hembring melalui faksimile. Tidak ada korban jatuh dalam aksi ini.
- ❖ Kapolda Irian Jaya Brigjen (Pol.) Hotman Siagian menyatakan, jika terpaksa polisi dapat menggunakan peluru tajam untuk

menghalau masyarakat yang melanggar hukum karena polisi diberi senjata untuk itu, bukan sebagai pajangan.

2 Juli

Polres Jayapura memeriksa 15 orang yang terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Nimboran. Lima orang di antaranya menjadi tersangka. Menurut Maurits Wauw, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan Mesak Hembring sebagai hasil pembicaraannya dengan Yance Hembring via telepon, yang bertanggungjawab atas aksi tersebut ialah Yance Hembring.

3 Juli

Berlangsung peringatan setahun kematian Steven Suripatty oleh mahasiswa Uncen di Abepura. Peringatan "Uncen Berdarah" ini berlangsung aman dan tertib. Mahasiswa menuntut supaya POM segera mengungkap kasus tersebut. Koordinator Tim Pencari Fakta Uncen, Elly Lewerissa, S.H., menyatakan bahwa bukti sudah cukup untuk menyeret pelaku ke pengadilan militer, tapi hal ini belum bisa dilakukan karena pihak Kodam meminta pihak Uncen untuk menyerahkan para pelaku pengeroyokan anggota intel, Sersan (Pol.) Dahlan.

5 Juli

- ❖ Dipimpin oleh Yoas Yafle dan Hans Kambuaya bendera Bintang Kejora dikibarkan di Sorong. Aksi ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik antara masyarakat dan aparat keamanan. Warga masyarakat yang terdesak berlari ke arah Posko Papua Barat yang dipimpin Yakomina Isir. Aparat keamanan menyerbu dan membongkar Posko Papua Barat tersebut serta menahan sejumlah penduduk yang berada di sekitar Posko. Yakomina Isir dan Yance Wabardon turut ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang (UU) No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam insiden ini satu orang meninggal dunia, yakni Bani (28), seorang tukang ojek.
- ❖ Komandan Polisi Militer Daerah Militer (Danpomdam) Trikora, Letkol CPM Soegijanto, menanggapi permintaan Tim Pencari Fakta Uncen menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka

dan saksi peristiwa “Uncen Berdarah” telah selesai dan berkasnya siap dilimpahkan ke oditur militer. Mengenai penganiayaan terhadap Sersan (Pol.) Dahlan, kasusnya telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

6 Juli

- ❖ Ketua LMA Yapen Waropen Yusuf Tanawani mengemukakan bahwa kriteria calon Bupati Serui bukan soal berasal dari mana, tetapi dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun Serui. Atas dasar ini, calon bupati yang diusulkan ialah Drs. A.R. Makatita.
- ❖ DPRD Tingkat II Yawa (Serui) menetapkan 10 calon bupati, yakni Drs. M. Karubaba, Drs. A. Weno, Ir. L.A. Rumabar, Drs. Y.P. Mangge, John Ayomi, B.A., Letkol (Inf.) Nico Obadja Woru, Drs. Y.P. Ayorbaba, Dr. Nikolas Woroi, M.Si, Drs. Philip Wona, dan Drs. Edoard Fonataba.

7 Juli

- ❖ Sebanyak 10 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat di Kampung Harapan Sentani meminta uang ganti rugi sebesar Rp18,6 miliar untuk tanah seluas 62 hektar sebagaimana diputuskan oleh MA.
- ❖ Pengadilan Militer Kodam Trikora memvonis Prada Hadi Prayitno (pelaku penembakan Robert Young) lima tahun penjara dan dipecat dari dinas TNI.
- ❖ Tokoh-tokoh masyarakat Nabire memprotes pernyataan Wagub Djopari saat berlangsung acara tatap muka di ruang rapat Bupati Nabire (6/7) karena dianggap melecehkan martabat orang Papua. Dalam acara tersebut Djopari mengatakan bahwa merdeka tidak hanya berarti mendirikan negara tetapi harus mengurus diri sendiri, dan itu berarti otonomi. Oleh karena itu, kata Djopari, sangat bodoh kalau mau merdeka tapi menolak otonomi.

8 Juli

- ❖ Yakomina Isir (Yoke Isir) dijadikan tersangka aksi pengibaran bendera Bintang Kejora dengan tuduhan melakukan makar dan melanggar UU Pemilu. Keputusan ini memicu polemik

menyangkut prosedur yang ditempuh polisi serta ada-tidaknya unsur pelanggaran HAM.

- ❖ Di pendoponya di Sentani, Theys H. Eluay menyatakan bahwa aksi pengibaran bendera Papua di Genyem dan Sorong tergesa-gesa dan terlalu dini. Perjuangan, kata Theys, tidak harus dengan kekerasan, tetapi bisa dengan doa. Oleh karena itu dia menyerukan bangsa Papua untuk tidak mengibarkan bendera maupun melakukan kekerasan yang akhirnya merugikan diri sendiri.
- ❖ Sekitar 60 orang mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Pemuda Mekkesa Arfak Manokwari Cabang Jayapura berunjuk rasa di DPRD Tingkat I Irian Jaya untuk menolak rencana pemekaran wilayah Irian Jaya. Atas aksi tersebut Wagub Djopari menyatakan gagasan pemekaran wilayah sudah ada sejak 1993.

9 Juli

Daud Eduard Wanggai (27) tewas ditembak oleh anggota Detasemen Polisi Militer (Denpom) Sorong di Pelabuhan Jayapura. Tiga orang yang diduga menembak ialah Serda CPM Novi Tomaso, Sertu CPM Taufik Hidayat, dan Prada CPM A. Samsul. Ketiganya langsung ditahan oleh Denpom. Insiden ini memicu reaksi sejumlah tokoh masyarakat: Theys H. Eluay, yang meminta tentara ditarik dari Irian Jaya, Budi Setyanto (Ketua Forum Kerjasama LSM Irian Jaya), Abdul Rahman Upara (Direktur LBH Jayapura), dan Ramses Ohee (Ketua FKP DPRD Kabupaten Jayapura), yang meminta insiden diusut tuntas. Keluarga korban menuntut ganti rugi Rp200 juta.

10 Juli

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Els-HAM) menerbitkan laporan mengenai peristiwa Biak 6 Juli 1998 dengan judul *Biak Berdarah*.

11 Juli

Pangdam Trikora Amir Sembiring meminta maaf atas tindakan dua prajuritnya yang menewaskan Daud Wanggai di Pelabuhan Jayapura dan melayat ke rumah korban.

15 Juli

- ❖ Amir Sembiring menyatakan bahwa permintaan Theys H. Eluay agar TNI ditarik dari Irian Jaya adalah ungkapan emosional. Jika TNI ditarik maka tidak ada otoritas yang akan mengatasi berbagai kerusuhan dan kriminalitas di wilayah Irian Jaya. Anggota TNI, khususnya 10 ribu TNI AD yang ada di Irian Jaya, kata Amir, tidak semuanya bertindak sembrono. Sebagian besar masih menjalankan tugas sesuai prosedur; sedangkan anggota yang melanggar hukum akan diproses sesuai hukum yang berlaku dalam peradilan militer, yang kini terbuka dan bisa diikuti oleh masyarakat. Tanggapan senada dilontarkan oleh Gubernur Freddy Numberi. Sementara itu, Verry Ploh, pengamat politik dari Uncen, mengatakan bahwa antara individu (prajurit TNI) yang berbuat kesalahan dan lembaga TNI yang bertugas menjaga rasa aman dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Irian Jaya, harus dipisahkan.
- ❖ Duaratus orang Papua yang tergabung dalam Komite Solidaritas Rakyat Irian, Forum Komunikasi Generasi Muda Irian Jaya, Aliansi Muslim Irian Jaya, dan Mahasiswa Irian Jaya Bandung, berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua di Gedung DPR/MPR.

16 Juli

SKP Keuskupan Jayapura menerbitkan laporan mengenai intimidasi yang terjadi di wilayah Pegunungan Bintang.

19 Juli

Danpomdam Letkol CPM Soegijanto menyatakan bahwa Serda CPM Novi Tomaso dan Sertu CPM Taufik Hidayat resmi menjadi tersangka kasus penembakan Edward di Pelabuhan Jayapura. Berkasnya siap dilimpahkan ke Pengadilan Militer.

21 Juli

Penanganan korban banjir di Perumnas IV Padang Bulan belum tuntas. Tim Peduli Banjir telah menyerahkan data lengkap kepada Dinas Sosial Tingkat I, tetapi Kepala Dinas Sosial Drs. Dicky Asmuruf menilai data tersebut belum lengkap sehingga uang

pesangon sebesar Rp2 juta per KK tidak bisa dicairkan. Akibatnya, warga Perumnas IV Blok A, didampingi LBH Jayapura, mendatangi Pemda Irian Jaya untuk menanyakan realisasi pesangon tersebut.

23 Juli

Prof. Dr. J.E. Sahetapy menyerukan supaya Gereja-gereja berani menyuarakan keadilan dan kebenaran dalam suasana kritis yang berlangsung. Seruan ini ditanggapi positif oleh Ketua Sinode GKI, Pdt. Herman Saud. Herman bahkan menegaskan supaya meneliti permasalahan secara objektif, matang, dan tidak sembrono; dan Gereja-gereja diharapkan mampu berdiri di tengah.

25 Juli

- ❖ Wilayah Irian Jaya hampir pasti dimekarkan menjadi tiga propinsi. Selain itu, dimekarkan pula Kabupaten Administratif Mimika, Puncak Jaya, Paniai, dan Kota Administratif Sorong untuk menjadi daerah tingkat II otonom. Menanggapi rencana pemekaran tersebut, Pangdam Amir Sembiring menyatakan bahwa penempatan pasukan dan penanganan keamanan tidak menjadi masalah. Penempatan Korem sudah tepat, tinggal mengubah Kodim. Sementara itu Ernes Suwuh, Wakil Ketua DPRD I Irian Jaya, menyarankan perlunya sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Wilayah Irian Jaya kepada masyarakat sebelum disahkan.
- ❖ Meskipun belum menerima surat jaminan keamanan dari gubernur, HIMABI (Himpunan Mahasiswa Biak) berangkat ke Biak guna mencari fakta peristiwa “Biak Berdarah”. Tindakan ini dinilai oleh Theys H. Eluay sebagai gerakan moral dalam rangka mencari kebenaran.

26 Juli

Duaratus pedagang Pasar Nayak Wamena memprotes kebijakan pemerintah untuk memindahkan Pasar Nayak dan pedagang ke lokasi baru yang belum rampung.

27 Juli

Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Demta, Aris Priadi (30),

ditembak. Pelakunya telah ditemukan dan diduga keras ada anggota TNI AD yang terlibat.

28 Juli

Pendeta Herman Saud menyatakan bahwa ide pemekaran wilayah Irian Jaya sangat berbahaya karena tidak berasal dari mayoritas masyarakat. Jika dipaksakan, kata Herman, akan menimbulkan gejolak. Gereja juga belum menerima gagasan tersebut. Polemik tentang pemekaran wilayah Irian Jaya ini terus berlanjut hingga bulan berikutnya.

29 Juli

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Biak mengeluarkan pernyataan tentang "Biak Berdarah" yang isinya: (1) menuntut kepada semua pihak yang terkait untuk memperhatikan dan menuntaskan kasus "Biak Berdarah" secara serius; (2) meminta kepada Pemda Irian Jaya, Pangdam, dan Kapolda untuk segera mengeluarkan surat jaminan keamanan kepada tim pemantau mahasiswa, saksi, korban, dan keluarga korban demi kelancaran proses penuntasan kasus "Biak Berdarah"; (3) mendesak pemerintah daerah untuk membentuk tim independen internasional guna mengungkapkan peristiwa berdarah tersebut.

30 Juli

- ❖ Bas Youwe, Ketua PDKB Irian jaya, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya perlu diwujudkan segera, tetapi, dengan catatan tidak boleh ada kepentingan pemerintah pusat. Sementara itu, Paul Baut, seorang pengamat politik, menilai bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya belum saatnya karena lebih merupakan keinginan pemerintah pusat daripada keinginan masyarakat daerah. John Ibo, Ketua FKP DPRD Tingkat I, berpendapat bahwa sebaiknya masyarakat membuka diri terhadap rencana pemerintah pusat tersebut karena ada niat baik dan banyak hal positif.
- ❖ Penanganan masalah korban banjir Perumnas IV dan KPR BPD belum tuntas. Uang bantuan yang sedianya diberikan pada 28 Agustus 1999 (uang sewa rumah dan lauk-pauk) belum dicairkan.

Pihak yang berwenang menyatakan perlu menunggu kedatangan Gubernur Freddy Numberi dari Jakarta. Oleh karena itu, warga Blok D Perumnas IV mempertanyakan transparansi pembagian uang bantuan tersebut dan uang sumbangan lain, antara lain dari PT Freeport sebesar Rp100 juta.

31 Juli

Gubernur Freddy Numberi menandatangani surat jaminan keamanan bagi HIMABI yang bermaksud mengungkapkan kasus “Biak Berdarah”. Gubernur juga mengingatkan supaya aspirasi murni mahasiswa jangan direkayasa.

AGUSTUS

2 Agustus

- ❖ Nasib korban banjir di Perumnas IV Padang Bulan dan KPR BPD masih tidak menentu karena bantuan Rp2 juta per KK belum bisa dicairkan dan masih harus dibicarakan dengan pemerintah. Demikian pula dengan uang bantuan Presiden sebesar Rp50 milyar karena kesibukan Sidang Umum MPR. Tim Pokja Penanggulangan Korban Banjir kembali turun ke lokasi untuk mengecek bangunan warga di Blok A Perumnas IV.
- ❖ Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral, dalam dialog dengan keluarga korban “Biak Berdarah”, LSM, dan Gereja-gereja di Biak mendesak supaya TNI segera membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus “Biak Berdarah”. Dia juga menduga terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.
- ❖ ICRC (International Committee of Red Cross—Palang Merah Internasional), melalui faksimile ke harian *Cenderawasih Pos*, membantah tuduhan HIMABI bahwa pihaknya memberikan fasilitas helikopter kepada militer dalam pembebasan sandera di Mapnduma pada 1996. Oleh karena itu ICRC mendesak kepada pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi sehingga kebenaran bisa terungkap.

3 Agustus

- ❖ Pemuda Papua mendatangi kantor gubernur untuk menolak rencana pemekaran wilayah Irian Jaya. Sementara itu Kabag Humas Kabupaten Sorong menyatakan bahwa Sorong siap menjadi ibukota Propinsi Irian Jaya Barat.
- ❖ Tim DPR RI tiba di Jayapura untuk mensosialisasikan ide pemekaran wilayah Irian Jaya. Gubernur Freddy Numberi berkomentar bahwa pemekaran wilayah akan menguntungkan Irian Jaya di masa depan. Rektor Uncen Wospakrik berpendapat bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya tidak perlu terlalu dipermasalahkan, pro-kontra adalah hal yang wajar. Pangdam Trikora Amir Sembiring menyatakan bahwa pihak Kodam tidak akan menambah jumlah Kodam di wilayah Irian Jaya, tetapi, mendukung rencana pemekaran wilayah.
- ❖ Komnas HAM berdialog dengan warga Sorong di Aula Katedral Kampung Baru, dipimpin oleh Ketua Els-HAM Cabang Sorong, Paskalis Baru. Dalam acara tersebut masyarakat menyatakan: (1) Yakomina Isir dan Pdt. Hans Mobalem hendaknya dibebaskan karena tidak berkaitan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 5 Juli, (2) menolak pemekaran wilayah, (3) menuntut dikembalikannya status politik Papua, dan (4) menuntut dikembalikannya nama Papua.

4 Agustus

- ❖ *Proyektil (peluru) yang menewaskan Eduard AE Wanggai di Pelabuhan Jayapura diserahkan keluarga korban kepada Pangdam Trikora Amir Sembiring.*
- ❖ Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral menyatakan bahwa pencekalan lima warga Irian Jaya adalah melanggar HAM. Lebih jauh Amaral menyatakan bahwa menyangkut segala pengaduan yang ada, Komnas HAM akan mendesak pemerintah untuk segera memperhatikan aspirasi rakyat Papua.
- ❖ HIMABI, menanggapi pernyataan ICRC, menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikukuh ICRC telah memberikan fasilitas helikopter kepada militer dalam pembebasan sandera di Mapnduma. Hal ini didasarkan pada data-data yang dimiliki Apolos Sroyer, Sekretaris HIMABI.

6 Agustus

Wagub I Djopari dan Komisi II DPR RI menenggalkan Manokwari lebih cepat dari rencana semula dengan kawalan ketat, karena dituntut menjelaskan secara rinci soal pemekaran wilayah Irian jaya.

8 Agustus

- ❖ Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Manokwari menyatakan menerima pemekaran wilayah dengan dua syarat: (1) aparaturnya diprioritaskan bagi putera daerah; (2) peningkatan jumlah pegawai negeri di tiga propinsi Irian Jaya juga diprioritaskan bagi putera daerah. Pernyataan tersebut disampaikan kepada tim Komisi II DPR-RI yang mengunjungi Manokwari.
- ❖ Di Bar Romantika di Merauke seorang oknum polisi menembakkan pistolnya tanpa alasan dan mengenai Antonius Raubaba (16), siswa SMK I Merauke, dan Busari (20). Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Merauke.

9 Agustus

Kelompok massa yang menamakan diri Masyarakat Papua Manokwari berunjuk rasa menolak pemekaran wilayah Irian Jaya. Aksi tersebut dilakukan di depan Hotel Mutiara, tempat Komisi II DPR-RI dan Wagub I Irian Jaya Djopari menginap.

10 Agustus

- ❖ Masyarakat suku Arfak berunjuk rasa menentang kelompok yang menolak pemekaran wilayah Irian Jaya dan mendukung rencana tersebut. Pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Manokwari Drs. Mulyono.
- ❖ Pemberian dana sebesar Rp2 juta per KK untuk 540 KK dan Rp500 ribu per orang untuk 220 mahasiswa korban banjir di Padang Bulan belum direalisasikan. Pasalnya, Pemda Tingkat I Irian Jaya belum jelas apakah dana tersebut masuk dalam bantuan Presiden. Pemda menjanjikan bahwa sebelum 17 Agustus 1999 dana tersebut sudah dibagikan sebagai kado HUT Proklamasi RI.

11 Agustus

Kepala Dinas Sosial Tingkat I Irian Jaya, yang sekaligus Ketua Pokja Penanganan Korban Banjir, Drs. Asmuruf, menyatakan bahwa dana Rp2 juta per KK bagi korban banjir di Padang Bulan sudah tersedia di BPD Irian Jaya, tetapi belum bisa dicairkan. Pasalnya, kelengkapan administrasi Pokja Kotamadya belum terpenuhi, sementara Ketua Pokja Kotamadya, Thamrin Sagala, S.H., sedang berada di Jawa. Untuk itu Dinas Sosial Tingkat I Irian Jaya berusaha mengusahakan surat dari gubernur kepada Direktur BPD untuk mencairkan dana bantuan tersebut.

12 Agustus

Kasdam Trikora Brigjen Idris Gasing menyatakan kepada Dubes Jepang bahwa OPM yang memiliki senjata ada sekitar 287 orang dan tinggal di perbatasan Irian Jaya dengan PNG. Adapun yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya hanyalah simpatisan dan tak bersenjata. Menanggapi hal ini, Pdt. Herman Saud menyatakan tidak tahu-menahu tetapi mengajak masyarakat supaya tidak terprovokasi.

15 Agustus

Ketua Fraksi PDI Budi Baldus Waromi, menanggapi soal senjata OPM menyatakan bahwa pihak TNI dan Polri bisa merampas senjata-senjata tersebut jika benar ada. Tetapi, tindakan tersebut harus dilaksanakan secara bijaksana dan hati-hati.

17 Agustus

♦ Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa masalah senjata OPM tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena bukan persoalan besar. Keberadaan mereka sudah diketahui dari dulu dan selama OPM tidak berbuat sesuatu yang merugikan tidak menjadi masalah. Aparat keamanan tidak bisa merampas senjata mereka karena anggota OPM selalu berpindah ke PNG. Sementara itu Pangdam Amir Sembiring menyatakan bahwa jumlah senjata yang dimiliki tidak sampai 287 buah, melainkan hanya puluhan saja dan sekarang tidak digunakan.

- ❖ Dari 544 napi di LP Irian Jaya 336 mendapat remisi sebagai kado HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

18 Agustus

Korban banjir di Padang Bulan tetap belum mendapatkan bantuan. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Jayapura, Drs. Sudarmadji, menyatakan bahwa pihaknya belum berani mencairkan dana karena belum ada perintah tertulis dari Gubernur. Sementara itu kuasa hukum korban, Pieter Ell, S.H. dari LBH Jayapura menyatakan bahwa ada cedera janji dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1365 KUHP.

19 Agustus

- ❖ Dua kelompok pengunjuk rasa mendatangi Kantor Gubernur Irian Jaya, Dok II. Kelompok pertama adalah rombongan karyawan dinas kesehatan yang menuntut supaya Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Irian Jaya, dr. Dimpudus, dan teman-temannya diganti karena dinilai tidak memperhatikan putera daerah. Kelompok kedua (berjumlah sekitar 300 orang) adalah korban bencana banjir Padang Bulan yang menuntut uang bantuan. Wagub III Bram Atururi, mewakili Gubernur Irian Jaya yang tidak berada di tempat, menyatakan bahwa uang sebesar Rp1.081.080.942 sudah diterima panitia tingkat Kotamadya Jayapura dan akan dibayarkan keesokan harinya. Jika tidak dibayarkan, Wagub mempersilakan warga untuk berunjuk rasa lagi.
- ❖ Kapal motor (KM) Sembra dan KM Panca Sejahtera tenggelam di perairan Sorong. Puluhan orang tewas dan 73 orang selamat dalam bencana tersebut. Selain faktor angin, penyebab kecelakaan kapal berkapasitas 55 orang itu diduga kelebihan penumpang (berjumlah hingga 101 orang). Ketua DPRD I Irian Jaya, T.N. Kaiway, menyesalkan musibah tersebut dan meminta pemerintah dan masyarakat supaya memperhatikan keselamatan pelayaran.

20 Agustus

- ❖ Rombongan Komisi II DPR-RI dan Wagub I Djopari didemo di Sorong. Masyarakat menolak rencana pemekaran wilayah dan meminta kemerdekaan. Aksi yang sama sebelumnya terjadi di Manokwari, Jayapura, dan Timika.
- ❖ Pembagian dana bantuan kepada korban bencana banjir di Kelurahan Hedam berjalan lancar. Empat oknum yang menipu data dilaporkan oleh warga.

24 Agustus

- ❖ Delegasi Irian Jaya (Gereja-gereja dan Els-HAM) melaporkan kasus pelanggaran HAM dalam operasi pembebasan sandera di Mapnduma pada 1996 kepada Komisi I DPR-RI dan Komnas HAM.
- ❖ Komnas HAM mengumumkan bahwa di Irian telah terjadi pelanggaran HAM sejak diperlakukan DOM dan terjadi ketidakadilan dan diskriminasi politik-ekonomi-sosial terhadap masyarakat pribumi.

25 Agustus

DPD II Sorong menyatakan akan memanggil pengurus KPLP (kesatuan penjaga laut dan pantai), Syahbandar Teminabuan, dan pengurus ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tenggelamnya KM Sembra dan KM Panca Sejahtera.

26 Agustus

- ❖ Korban banjir di Padang Bulan Waena berunjuk rasa di Kantor Depsos Irian Jaya menuntut Kakanwil Depsos Irian Jaya, Drs. D. Dimara, segera menyerahkan uang bantuan Mensos sebesar Rp412 juta dalam bentuk uang tunai, bukan bahan makanan. Menanggapi tuntutan tersebut Dimara menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi warga dan akan menyampaikannya kepada gubernur. Kanwil tidak berhak memberikan uang tunai karena sudah ada instruksi dari Mensos untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan makanan.

- ❖ Sekitar 60 orang dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pegunungan Tengah di Jayapura berunjuk rasa di Kantor DPRD Tingkat I Irian Jaya atas terjadinya pelanggaran HAM dalam pembebasan sandera di Mapnduma, khususnya mengenai keterlibatan ICRC dan TNI.

29 Agustus

Kadispen Polda Irian Jaya, Mayor (Pol.) D. Suripatty, menanggapi pernyataan Komnas HAM pada 24 Agustus menyatakan bahwa pernyataan Komnas HAM belum terbukti dan sekadar ingin mencari masalah, sebab ada tidaknya pelanggaran HAM ditentukan oleh pengadilan.

30 Agustus

Pangdam Trikora Amir Sembiring membantah pernyataan Komnas HAM dengan mengatakan, “Tidak benar semua yang diucapkan Komnas HAM dan belum ada buktinya. Kalau memang mereka mempunyai bukti yang kuat, ya tolong diteruskan ke proses hukum.”

31 Agustus

Kapolda Irian Jaya Brigjen (Pol.) Drs. Hotman Siagian menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang unjuk rasa asalkan sesuai aturan yang berlaku dalam UU No. 9/1999. Mengenai pernyataan Komnas HAM, Kapolda sependapat dengan Pangdam Trikora, “Pernyataan Komnas HAM itu apakah sudah merupakan *statement* yang pasti benar. Jangan percaya begitu saja, sedangkan mereka saja tidak pernah membawa bukti dan hanya mengeluarkan pernyataan ini, pernyataan itu.”

SEPTEMBER

1 September

Dalam jumpa pers di Aula GKI, HIMABI, Els-HAM, FKMPPT (Forum Komunikasi Mahasiswa Pegunungan Tengah), dan Kelompok Peduli HAM Irian Jaya menyatakan bahwa penindasan dan kekerasan yang

dilakukan oleh militer di Tanah Papua sudah berlangsung lama. Contoh yang paling jelas terjadi di Biak dan Mapnduma. Yohanis Bonay, Direktur Els-HAM, menyatakan tidak akan menanggapi pernyataan Pangdam pada 30 Agustus dan mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri.

2 September

- ❖ Keluarga korban kecelakaan KM Sembra di Sorong menuntut ganti rugi kepada pihak Pemda Sorong sebesar Rp20 juta per kepala atau seluruhnya sekitar Rp1,7 miliar. Meski demikian, menurut Ketua DPC PPP Hasmi Moha tuntutan tersebut bukan harga mati dan masih bisa dirundingkan.
- ❖ Kakanwil Depsos Drs. D. Dimara menjelaskan bahwa penggunaan dana bantuan Mensos untuk korban banjir di Padang Bulan Waena Rp412 juta, Rp156.362.000 dipakai untuk bahan makanan, obat-obatan, pakaian korban banjir, dan Rp256.538.000 masih tersimpan di rekening BPD di bawah pengawasan gubernur. Sisa uang yang ada tidak akan dibagikan secara tunai kepada korban karena akan dipakai sebagai Dana Kesiapsediaan Bencana Alam.
- ❖ Kapendam Trikora Mayor (Inf.) R. Siregar menilai bahwa pernyataan Els-HAM, HIMABI, Kelompok Peduli HAM Irian Jaya, dan FKMPPT mengenai bukti dan saksi hidup kasus Mapnduma dan Biak adalah mengada-ada. "Panglima kan sudah pernah sampaikan beberapa hari lalu, seandainya ada bukti, laporkan saja, karena ini kan negara hukum. Biar pengadilan yang menentukan. Bukannya membuat pernyataan sana-sini yang membingungkan masyarakat."

3 September

Sekitar 800 warga masyarakat Timika menggelar aksi unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua Barat. Sementara itu, Yance Hembring (tokoh pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 1999 di Nimboran) dinyatakan buron oleh pihak kepolisian.

4 September

Kapendam Trikora Mayor (Inf.) R. Siregar mempertegas

pernyataannya pada 2 September dengan menyatakan, “Dengan *statement* yang dikeluarkan Komnas HAM, HIMABI, Els-HAM, dan FKMPT, TNI, dalam hal ini Kodam XVII/Trikora, tidak akan pernah menanggapi lagi karena mereka bertindak hanya itu-itu saja, dan mereka pun sudah tidak pernah mengindahkan peraturan... Untuk mengungkap dosa maupun pelanggaran atau suatu tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum dan yang memutuskan pengadilan.”

6 September

- ❖ Surat Uskup Jayapura yang ditujukan kepada Pangdam Trikora tertanggal 1 September dimuat di *Cenderawasih Pos*. Dalam surat tersebut Uskup menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Pangdam dan mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Pangdam. Uskup menekankan bahwa pihak berwajib mesti membuka diri bagi kenyataan yang ada dan jangan mempersalahkan pihak lain tanpa dasar.
- ❖ Sekitar 70 KK dari 138 KK korban banjir Waena yang belum mendapatkan dana bantuan resah. Pasalnya, tidak ada kejelasan apakah pencairan dana tahap II akan direalisasi oleh pemerintah atau tidak. Menurut Humas Kodya Jayapura, data 138 KK belum lengkap, yakni kesediaan surat pernyataan. Sementara itu 60 KK menolak pindah ke lokasi baru.
- ❖ Ratusan mahasiswa dari unsur Gereja, kaum Muslim, dan ikatan mahasiswa Dati II se-Irian Jaya berdemonstrasi di kantor gubernur untuk menolak pemekaran Propinsi Irian Jaya serta menuntut mundur Wagub I, Drs. Djopari, M.A., karena dinilai tidak aspiratif dalam menjalankan tugas.

7 September

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis S. Sofyan Yoman berpendapat, pemekaran wilayah Irian Jaya baru bisa dilakukan 10 tahun mendatang, itu pun dengan persiapan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat yang matang. Oleh karena itu, kata Sofyan Yoman, tuntutan mahasiswa yang dinyatakan dalam unjuk rasa di kantor Gubernur untuk mengirim 1.500 orang putra/putri Papua untuk studi S1, S2, S3 sangat logis.

8 September

Drs. Florens Imbiri, anggota DPRD Irian Jaya, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya tidak akan memusnahkan etnis Papua. Pemekaran yang diusulkan oleh pemerintah tersebut, kata Florens Imbiri, adalah baik. Sementara itu, Bambang Susanto alias Monidandani, menyatakan, "Saya atas nama masyarakat pedalaman Jayawijaya dan Paniai menyatakan mendukung pemekaran dan saya minta agar ini dapat diwujudkan bagi kesejahteraan masyarakat Irian Jaya semua." Drs. Michael Manufandu, pakar pemerintahan, menilai bahwa masyarakat menolak rencana pemekaran wilayah karena kurangnya sosialisasi, sementara pemimpin bekerja secara *single fighter*. Pemekaran wilayah, tambah Michael Manufandu, harus ditanggapi secara kritis karena dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan akibat isolasi geografis dan kultural.

9 September

- ❖ Theys H. Eluay menyatakan, dia akan menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin rakyat Papua kepada FORERI dan Tim 100. Acara serah-terima dijadwalkan pada 15 September.
- ❖ Bendera Bintang Kejora dikibarkan di Sorong dan Biak. Di Sorong satu orang (Denis Yowen, 22 tahun) meninggal dan dua luka-luka. Di Biak tidak ada korban.

10 September

- ❖ Setelah merenung seperti disarankan Presiden Habibie, Tim 100 menegaskan bahwa rakyat Papua berkehendak untuk memisahkan diri dari NKRI
- ❖ Tom Beanal, Ketua Tim 100, menyatakan bahwa aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Sorong sebagai ulah provokator yang ingin memanfaatkan keadaan dan memperkeruh suasana. Dia mengecam keras peristiwa tersebut dan menegaskan bukan ulah orang Papua, sebab orang Papua cinta damai dan tidak brutal. Sementara itu di Sorong, dalam acara pemakaman Denis, Pdt. Ny. M. Kabes menyatakan: (1) keluarga korban minta kasus diusut tuntas; (2) otopsi Denis dinilai cacat hukum.

12 September

Menanggapi pernyataan Tim 100, Gubernur Freddy Numberi menyatakan bahwa aspirasi boleh saja disampaikan asal melalui jalur hukum. Aparat keamanan selalu siap untuk mengamankan negara, sebab pemerintah tidak akan menolerir pelbagai upaya yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Sementara itu, berkaitan dengan aksi pengibaran Bintang Kejora di Sorong dan Biak, pengamat hukum internasional, Marthen Ferry Kareih, S.H., menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kemerdekaan Papua Barat mesti ditempuh lewat jalur diplomasi, bukan melalui aksi pengibaran bendera, sebab Irian Jaya masih merupakan bagian dari NKRI.

13 September

Ketua Sinode GKI Irian Jaya, Pdt. Herman Saud, menyatakan sangat prihatin atas kondisi rakyat di Bumi Cenderawasih, khususnya dengan peristiwa Sorong. Dia menyesalkan sikap aparat keamanan yang justru terpancing ulah provokator. Oleh karena itu Herman menyarankan supaya aparat keamanan belajar dari kasus Timtim. "Ingat, Irian ini hampir sama dengan Timtim, hanya sejarahnya yang berbeda. Tetapi selama 32 tahun Tanah Papua disebut wilayah NKRI, rakyat di sini tidak merasa memiliki, bahkan kalau dibikin jajak pendapat seperti Timtim, bisa jadi rakyat Papua hanya 10 atau lima persen yang merasa rakyat Indonesia," kata Herman.

14 September

Drs. John Ibo, Ketua FKP DPRD Irian Jaya, menanggapi pernyataan Tim 100 menyatakan bahwa yang menentukan aspirasi merdeka adalah Tuhan. Dia mengakui, secara politik dirinya tidak dapat berbuat banyak karena kondisi belum memungkinkan. Jika memaksakan kehendak, kata John Ibo, yang timbul hanyalah pertumpahan darah yang tidak perlu.

15 September

Theys H. Eluay, Ketua Lembaga Adat Irian Jaya, meminta anggota DPRD Irian Jaya untuk: (1) memikirkan kembali penggunaan nama Papua Barat sebagai ganti nama Irian Jaya; (2) menindaklanjuti

aspirasi penolakan rencana memekarkan wilayah Irian Jaya. Dia juga menjelaskan soal penyerahan jabatan pemimpin perjuangan Papua Barat dengan menyatakan bahwa pemimpin (*ondofolo*) tidak dapat diserahkan kecuali kepada anak keturunannya. Kalau ada yang mau memimpin perjuangan dipersilakan dan dia mengikuti dari belakang.

16 September

- ❖ DPR-RI menyetujui RUU Pemekaran Wilayah Maluku dan Irian Jaya. Kabupaten Administratif Mimika, Puncak Jaya, disetujui menjadi daerah otonom dan Kota Administratif (Kotif) Sorong menjadi kotamadya.
- ❖ Ketua Fraksi Daulat Rakyat Irian Jaya, Abdul Hakim Achmad, mengemukakan bahwa alat kelengkapan DPRD Irian Jaya belum mencukupi dan perlu ditinjau kembali. Menurut Achmad, mendesak untuk membentuk satu komisi yang khusus mengurus masalah HAM dan lingkungan hidup, karena selama ini pemerintah dinilai belum menangani kedua masalah tersebut secara sungguh-sungguh.
- ❖ T.N. Kaiway dari FKP dipilih kembali sebagai Ketua DPRD Irian Jaya dalam Rapat Paripurna DPRD Irian Jaya. Rapat ini diboikot oleh Fraksi PDI-P karena mekanisme pencalonan ketua dinilai tidak prosedural. Persoalan ini berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan polemik di media massa.

17 September

- ❖ Rektor Uncen Ir. F.A. Wospakrik M.Sc menegaskan bahwa pemda harus dapat membuktikan secara konkrit dan segera kepada masyarakat bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya untuk masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan terus-menerus melakukan aksi protes dan berbagai aksi negatif lain.
- ❖ Lukas Kadepa, utusan masyarakat Suku Mee Jayawijaya di Jayapura, menyampaikan dukungan masyarakat Pegunungan Tengah kepada T.N. Kaiway sebagai Ketua DPRD Irian Jaya 1999-2004. Kaiway dinilai sangat dekat dan menyatu dengan masyarakat pedalaman.

18 September

Puluhan massa yang dipimpin oleh Ketua LMA Yapen Waropen, M.Y. Tanawani, mendatangi kantor bupati dan menuntut kemerdekaan Papua Barat. Bupati Laban Samori menanggapi tuntutan massa mengatakan bahwa kewenangan untuk menjawab tuntutan tersebut berada di tangan presiden.

19 September

Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi menyatakan, disetujuinya RUU Pemekaran Wilayah bukan berarti pemekaran harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. "Undang-undang yang lahir ini kan tidak langsung dilaksanakan. Masih membutuhkan waktu untuk persiapan seperti sosialisasi dan lainnya. Kita perkirakan ini akan memakan waktu tiga tahun dan diharapkan mulai dari sekarang kita sudah harus mengkaji bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana lainnya."

20 September

- ❖ Menanggapi persetujuan DPR-RI atas RUU Pemekaran Wilayah, Florens Imbiri, ketua sementara DPRD Irian Jaya, mengatakan bahwa pemekaran tidak menyelesaikan berbagai masalah yang bergolak di Irian Jaya. Sebaliknya, tugas pemda semakin berat karena rencana tersebut telah disetujui oleh pemda dan direkomendasi oleh beberapa pihak, termasuk DPRD Irian Jaya terdahulu.
- ❖ Kapolres Sorong Letkol (Pol.) Drs. Viktor Sitorus menyatakan, Yakomina Isir, Mesakh Wabdaron, Yoab Safle, dan beberapa orang lain yang ditahan pihak keamanan di Sorong sejak 12 September resmi berstatus tersangka. Sementara itu, dalang peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora masih buron.

21 September

Darius Kokonani Tau menurunkan bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman Kantor DPRD Irian Jaya dan langsung ditahan di Mapolres Jayapura. Darius mengaku melakukan tindakan tersebut karena melihat yang berkibar adalah bendera

Bintang Kejora bukan Merah Putih, sehingga dia berupaya menurunkan bendera tersebut sampai setengah tiang.

22 September

- ❖ John Ibo, Ketua FKP DPRD Irian Jaya, menyatakan setuju atas pendeportasian dua anggota Tim Penelitian Pelanggaran HAM di wilayah kerja PT Freeport, Christopher Hugh Lewis dan Abras Abigail Eleanor, karena mereka menggunakan visa turis untuk kegiatan penelitian di Papua.
- ❖ Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura memilih Drs. Theophilus Bonay dari FKP sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura dengan 15 suara dari total 30 suara, mengungguli Kamarudin Watubun dari FPDI-P dengan 12 suara. Rapat sempat diskors karena penghitungan suara tidak disaksikan oleh para saksi. Kamarudin Watubun mengaku puas dengan hasil tersebut.

23 September

Menanggapi gerakan Papua merdeka, Theys H. Eluay menegaskan bahwa keinginan memisahkan diri dari NKRI sudah ada sejak dahulu. Tanpa atau dengan pembangunan dan kesejahteraan yang merata, masyarakat Papua tetap menuntut kemerdekaan. Pernyataan ini dikemukakan untuk menanggapi pernyataan Michael Manufandu, M.A.

24 September

Aparat keamanan menembaki warga masyarakat di Manokwari sehingga memicu kerusuhan massa. Akibat insiden tersebut dua orang, Ambram Mambraku dan John Wamafma, meninggal dunia, sedangkan dua orang, Markus Kambu dan Yan Makabori, luka berat.

27 September

Forum Kerjasama (Foker) LSM Irian Jaya menuntut gubernur dan Kapolda untuk menjelaskan insiden di Manokwari.

30 September

Bermula dari konflik antarwarga pecah kerusuhan massa di Timika. Sebagian Pasar Timika dibakar oleh warga yang mengamuk. Akibat

kejadian tersebut empat orang meninggal dunia, yakni Jusri Siregar (karyawan PT Freeport Indonesia), Firman Mohamad (karyawan bengkel), Matius, dan Agustina. Tom Beanal datang dan berhasil menenangkan massa. Pangdam Trikora Mayjen Amir Sembiring menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah perbuatan pihak ketiga yang berpura-pura mabuk untuk memancing situasi.

30 September

Kapolres Manokwari Ajun Komisaris Besar Polisi R.E. Hutabarat menyangkal anggotanya menembaki warga ketika pecah kerusuhan massa di Manokwari.

OKTOBER

1 Oktober

Martinus Ayomi, S.H. menilai insiden di Manokwari tidak perlu terjadi bila Kapolda Irian Jaya secara arif dan bijaksana menanggapi aspirasi masyarakat yang menuntut mundur Kapolres Manokwari, Letkol (Pol.) Drs. R.E. Hutabarat.

2 Oktober

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen Johny Lumintang menyatakan, TNI bertekad mempertahankan wilayah NKRI. Karena itu, menghadapi aspirasi kemerdekaan Papua, aparat keamanan akan mengambil tindakan bagi yang melanggar hukum.

3 Oktober

Komandan Resort Militer (Danrem) 171 PVT, Kol. T.H. Sinambela, menduga unjuk rasa di Manokwari dipimpin oleh orang-orang yang terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, seperti John Martin yang sedang dicari oleh aparat keamanan. Mengenai kejadian di Timika, Danrem menyatakan tidak berhubungan dengan seorang turis Australia yang kebetulan berada di lokasi kejadian.

4 Oktober

Brigjen Abraham Atururi, Ketua Tim Pencari Fakta Insiden Manokwari, menyatakan bahwa berdasarkan visum dokter semua korban terkena tembakan. Karena itu, Kapolres Manokwari Letkol (Pol.) R.E. Hutabarat, sebagai penjaga keamanan masyarakat, harus bertanggungjawab. Hasil investigasi tersebut akan dilaporkan kepada gubernur, Muspida, DPRD Irian Jaya, dan Kapolri. Kapolri menyatakan Kapolres Manokwari harus sudah diganti dalam waktu 14 hari terhitung sejak 1 Oktober.

5 Oktober

Kapolres Manokwari Letkol (Pol.) Drs. R.E. Hutabarat dan Kapolda Irian Jaya dituntut mundur karena tidak mampu menyelesaikan insiden di Manokwari. Tuntutan ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDKB DPRD Irian Jaya, Drs. Florens Imbiri. Hal senada dinyatakan oleh Ketua Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD Irian Jaya, H. Sindjilala.

6 Oktober

Jabatan Kapolres Manokwari diserahkan dari Letkol (Pol.) Drs. R.E. Hutabarat kepada Letkol (Pol.) Drs. Agung Sabar Santoso dalam upacara tertutup. Menurut Wakapolda Irian Jaya Kolonel (Pol.) Drs. Ayub Sawaki, pergantian ini tidak berhubungan dengan kerusuhan di Manokwari.

7 Oktober

Dana Bandes Merauke 1997/1998 (total Rp1,2 milyar) diduga disunat oleh oknum tertentu karena yang dibagikan per desa hanya Rp3,5 juta dari yang seharusnya Rp6 juta. Asisten I Setwilda Merauke Amry Karim tidak bersedia memberi penjelasan mengenai hal ini.

8 Oktober

Zainal Sukri, S.H., praktisi hukum, menilai pencopotan Kapolres Manokwari bukan berarti yang bersangkutan lepas dari jerat hukum, melainkan justru harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana di depan polisi militer dan Mahkamah Militer.

Kapolda Irian Jaya Brigjen (Pol.) Hotman Siagian, sebagai atasan, juga harus bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya.

10 Oktober

Komandan Detasemen Polisi Militer (Danden POM) Sorong, Letkol CPM Drs. Achmad Solichin, menyatakan bahwa dua proyektil yang mengenai korban masih dalam penyelidikan, begitu pula 37 saksi. Belum diketahui siapa yang memuntahkan proyektil tajam yang mengenai korban. Sementara itu Kadispem Polda Irian Jaya Letkol (Pol.) Drs. Suripatty menyatakan kepada wartawan bahwa tuntutan pengunduran diri Kapolda adalah hak masyarakat, tetapi yang berhak memutuskan adalah Kapolri. Dia juga menyatakan bahwa pemberitaan wartawan sudah terlalu jauh dan memojokkan institusi Polri sehingga bisa saja pihak Polri mengajukan tuntutan hukum.

11 Oktober

❖ Delapanpuluh buruh proyek pembangunan Hotel Relat Indah di Argapura Bawah berunjuk rasa menuntut upah yang layak dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Sejumlah buruh Papua merasa upah mereka dibedakan dari buruh pendatang. Pemimpin proyek, Ir. Junaidi, menyatakan bahwa perbedaan upah disebabkan oleh perbedaan jam kerja, bukan karena suku. Jamsostek sulit diterapkan karena tenaga buruh selalu berganti-ganti.

❖ Pelantikan dua gubernur yang baru, Herman Monim dan Abraham Atururi, dilangsungkan di Jakarta secara diam-diam. Pelantikan ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat Papua, baik melalui unjuk rasa maupun surat pernyataan.

12 Oktober

Ketua Ikatan Keluarga Indonesia Maluku (IKIM) Sorong HR Maitimu menyatakan, pelantikan Abraham Atururi sebagai Gubernur Irian Jaya Barat adalah tepat karena Abraham telah memimpin Kabupaten Sorong selama satu periode.

13-17 Oktober

Mahasiswa dan masyarakat dengan dukungan Gereja-gereja, menduduki Kantor Gubernur Irian Jaya di Dok II untuk menuntut pencabutan UU tentang Pemekaran Wilayah Irian Jaya dan Keppres tentang pengangkatan dua gubernur baru. Tuntutan juga didukung oleh Gubernur Freddy Numberi, Bram Atururi, dan kalangan DPRD Tingkat I Irian Jaya. Sementara itu, Mendagri Feisal Tanjung menyatakan tidak berani memutuskan permintaan mahasiswa untuk membatalkan pemekaran wilayah. Unjuk rasa serupa dilakukan di Taman Gizi di Nabire, Timika, Sorong.

16 Oktober

DPRD Tingkat I Irian Jaya mengadakan sidang istimewa guna membahas keputusan pemekaran wilayah Irian Jaya dan pelantikan dua gubernur baru. Hasilnya: DPRD meminta UU Pemekaran Wilayah Irian Jaya dan Keppres tentang pengangkatan dua gubernur dicabut.

17 Oktober

Uskup Leo Laba Ladjar menilai bahwa kekhawatiran mahasiswa mengenai pemekaran wilayah cukup beralasan, karena dengan wilayah yang makin sempit dan kontrol yang makin ketat sedikit gesekan mudah menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, Uskup juga menyinggung soal penyelesaian kasus Manokwari dan Timika. Secara moral, kata Uskup, kedua kasus tersebut menjadi tanggungjawab Kapolda, sedangkan bentuk penyelesaiannya disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat.

18 Oktober

KM Bimas Raya II tenggelam di perairan antara Pulau Habee dan Pulau Habekee (Laut Arafuru). Diduga 300 penumpang tewas tenggelam. Kecelakaan ini menimbulkan kemarahan massa di Kota Merauke. Massa menjarah dan merusak pertokoan serta menuntut kemerdekaan Papua Barat.

19 Oktober

Tom Beanal menyatakan bahwa latar belakang rencana pemekaran wilayah adalah pemerintah pusat tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Tom bahkan melihat rencana tersebut sebagai bentuk penjajahan pemerintah pusat terhadap daerah. Oleh karena itu, Tom mendukung gerakan mahasiswa.

22 Oktober

- ❖ Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi membentuk dua tim untuk menyelidiki tenggelamnya KM Bimas Raya II dan kerusakan sebagai akibat musibah tersebut. Pihak Ditsospol dan Irwilprop akan menangani dua masalah tersebut.
- ❖ Ribuan massa di Merauke mendatangi DPRD Merauke guna menyampaikan aspirasi merdeka dan menolak pemekaran wilayah Irian Jaya. Massa juga menyatakan: (1) menolak dan mengusir PT Bimas Raya, syahbandar, dan administrator pelabuhan (Adpel); (2) meminta pemda untuk memperhatikan keluarga korban musibah.

24 Oktober

Tim SAR Merauke terus mencari korban tenggelamnya KM Bimas Raya II. Dari 339 orang penumpang (kapasitas maksimal 125 orang), ditemukan 68 orang, 33 meninggal dan 35 selamat. Jenazah korban diperiksa di RSUD Merauke.

26 Oktober

- ❖ Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi diangkat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Wakil Ketua Sinode GKI Irian Jaya, Pdt. Herman Awom, S.Th, pengangkatan tersebut merupakan langkah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat demi mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Sementara itu Pangdam Amir Sembiring menyatakan bahwa pengangkatan tersebut merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap putra daerah Irian Jaya.
- ❖ Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Jayapura Yulius Mambay menanggapi surat Dirjen PUOD, yang menghendaki pemilihan

Walikota Jayapura dilakukan dengan UU Pemda yang lama No. 5/1974, menyatakan bahwa surat tersebut sebagai upaya pemaksaan kehendak oleh pemerintah pusat. Dewan bersikap tidak mempedulikan surat dirjen tersebut.

- ❖ Lembaga Independen Peduli HAM Masyarakat Papua Barat di Sorong dibentuk. Tujuan lembaga ini untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan.

28 Oktober

- ❖ Tom Beanal menyatakan menolak pengangkatan Numberi menjadi menteri jika ternyata pengangkatan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk meredam aspirasi "M" masyarakat Papua.
- ❖ Mahasiswa sejumlah kampus di Jayapura mendatangi DPRD Tingkat I untuk mempertanyakan kelanjutan keputusan DPRD menolak kebijakan pemekaran wilayah Irian Jaya.
- ❖ Yakomina Isir yang dituduh melakukan makar dalam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora 5 Juli 1999 disidangkan di PN Sorong tanpa didampingi penasihat hukum.

29 Oktober

- ❖ Mahasiswa Merauke berunjuk rasa di DPRD Tingkat I Irian Jaya menuntut Kakanwil Perhubungan Irian Jaya serta Bupati Sukardjo mengundurkan diri menyusul tenggelamnya KM Bimas Raya II.
- ❖ Ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya T.N. Kaiway, S.H. membantah adanya rencana pemilu lokal di dua propinsi yang baru, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, mengingat pemekaran daerah ditolak masyarakat.

31 Oktober

Bram Ondi, Bambang Subyanto, S.H., M. Kholifan, dan beberapa orang lain dari Tim Study Resolusi Konflik Irian Jaya, didampingi Budi Setyanto, S.H., Sekretaris Eksekutif Foker LSM Irian Jaya, menemui Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pertemuan bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan politik di Irian Jaya. Dalam kesempatan tersebut Gus Dur mengungkapkan bahwa untuk

menjawab persoalan Irian Jaya dibutuhkan suatu kajian yang obyektif dan menyeluruh atas pelbagai konflik yang berkembang.

NOVEMBER

1-2 November

Massa yang berjumlah sekitar 1.000 orang bergerak menyegei Kantor Bupati Fakfak dan menuntut supaya dalam waktu 3x24 jam bupati meletakkan jabatannya. Aksi ini mengakibatkan kegiatan masyarakat lumpuh.

4 November

Gubernur Freddy Numberi tiba di Sentani setelah dilantik menjadi Menteri Negara PAN. Berkembang diskusi mengenai persyaratan calon gubernur (seperti harus orang Papua asli) dan otonomi khusus untuk Irian Jaya.

5 November

Kapolda Irian Jaya Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menyatakan bahwa maklumat Kapolda tentang pelarangan pendirian posko Papua Barat tetap berlaku. Dia menyatakan bahwa negara ini tidak boleh dipisah-pisahkan.

6 November

Serah-terima Kapolda Irian Jaya dari Brigjen (Pol.) Drs. Hotman Siagian kepada Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas berlangsung di Jayapura.

7 November

Sekitar 1.000 lebih warga Nabire yang berunjuk rasa damai di Taman Gizi Nabire menyatakan menolak otonomi khusus dan tetap menuntut merdeka. Pernyataan dibacakan oleh pemimpin aksi, Kobogau.

8 November

Sekitar 300 warga dari Paniai, Serui, Nabire, dan Puncak Jaya tiba di Jayapura dengan KM Umsini. Mereka menyatakan menolak otonomi khusus dan meminta diadakan rekonsiliasi antara Theys H. Eluay dan Tom Beanal.

10 November

Bendera Bintang Kejora dikibarkan di halaman Gereja Katolik Tiga Raja, Timika, pada pukul 04.00 WIT. Walaupun tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut, Ibu Yosepha Alomang dan Pdt. Isaac Onawame, tokoh masyarakat suku Amungme, menyatakan bertanggungjawab. Aksi tersebut diikuti dengan mendirikan posko-posko di sekeliling tembok pagar gereja.

12 November

Berlangsung perayaan HUT ke-62 Theys H. Eluay di Sentani. Acara dihadiri sekitar 3.000 orang, antara lain Yorris Raweyai. Hadir pula wakil-wakil dari Polri dan TNI. Dalam acara ini Theys H. Eluay menyerukan supaya bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh Irian Jaya pada 1 Desember 1999. Seruan ini segera bergema ke seluruh penjuru Papua.

14 November

- ❖ Pangdam Trikora Amir Sembiring menanggapi seruan Theys H. Eluay dengan mengatakan, “Silakan saja mereka kibarkan bendera asal saat pengibaran itu jangan sampai terjadi tindakan-tindakan fisik atau kekerasan yang merugikan orang lain, mengancam nyawa orang, merugikan harta benda, dan kenyamanan yang ada. Ya, silakan saja asal sesuai dengan mekanisme yang ada, kalau melanggar ya kita sikat sesuai dengan prosedur hukum yang ada.”
- ❖ Rektor Uncen Ir. Frans Wospakrik menanggapi seruan Theys H. Eluay menyatakan bahwa rencana pengibaran bendera Bintang Kejora adalah bagian dari alam demokrasi sehingga boleh disampaikan oleh siapa saja asal tidak diwujudkan dengan sikap anarkis, merusak lingkungan, dan mengganggu masyarakat lain.

- ❖ Drs. Jaap Salossa, anggota DPR-RI, menyatakan supaya pemerintah berdialog dengan masyarakat Irian Jaya mengenai aspirasi merdeka.

15 November

- ❖ Kapolda Irian Jaya Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menyatakan, “Mengibarkan bendera silakan-silakan saja. Yang penting jangan bikin kerusuhan, kekacauan, dan lain sebagainya. Di mana-mana seperti di Aceh, Ujungpandang, boleh mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera merupakan salah satu penyampaian aspirasi dari mereka. Kita harus dewasa dan menerima.”
- ❖ Di Sorong, sidang kasus “makar” ditanggapi dengan unjuk rasa damai oleh masyarakat dan mahasiswa.

16 November

- ❖ Gubernur Freddy Numberi menyatakan, pembentukan negara dengan memisahkan diri dari NKRI tidak dibenarkan karena negara ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ada aspirasi lain masyarakat hendaknya menyampaikan lewat mekanisme yang ada, yakni DPRD. Sementara itu, Ketua FPDI-DPRD Irian Jaya Gerit Erens Waimuri yakin bahwa suatu saat Pemerintah Indonesia akan memberikan kemerdekaan penuh kepada bangsa Papua.
- ❖ Pernyataan Pangdam dan Kapolda ditanggapi oleh seorang praktisi hukum, Bernard Akasian, S.H., sebagai *move* politik dan dari segi hukum dipandang tidak konsisten. Alasannya, berbagai kasus dengan *modus operandi* yang sama tetap dituduh makar dan disidangkan, seperti kasus di Sorong dan Jayapura.

17 November

Tom Beanal menyatakan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak boleh menimbulkan korban yang sia-sia karena yang diinginkan adalah kemerdekaan, bukan kematian; bukan merampok dan tak ingin dirampok, bukan memukul dan tak ingin dipukul. Untuk itu, semua tindakan harus dipertimbangkan secara baik-baik. Sementara itu, Theys H. Eluay mengecam pernyataan Gubernur Freddy Numberi yang melarang pengibaran bendera.

18 November

Ketua Sinode GKI Pdt. Herman Saud menyatakan setuju masyarakat Irian Jaya merdeka. Kemerdekaan tersebut, menurut dia, merupakan hak orang Papua untuk memperoleh kembali martabat dan kebebasan mereka yang telah dirampas antara 1962-1998. Untuk mencapai kemerdekaan, menurut Herman, terlebih dahulu dengan UU otonomi.

19 November

- ❖ Els-HAM mengeluarkan siaran pers berjudul “Rakyat Papua Bergolak, Kepemimpinan tidak Jelas, Penguasa Malas Tahu”. Sekretaris Eksekutif FORERI Willy Mandowen menyatakan bahwa FORERI tidak menolak atau merekomendasikan pengibaran bendera Bintang Kejora.
- ❖ Berbagai tanggapan atas rencana pengibaran bendera Bintang Kejora bermunculan, antara lain dari Martinus Ayomi, S.H., yang menyatakan aksi tersebut merupakan aspirasi seluruh masyarakat Papua. Ishak Tabuni, anggota DPRD Irian Jaya, berkomentar bahwa bila aspirasi tersebut sesuai hukum atau undang-undang tidak masalah. Masyarakat bawah, kata Ishak, merasa hak-hak mereka diinjak-injak lebih dari 30 tahun. Sementara itu FORERI, Els-HAM, dan SKP berpendapat bahwa rencana tersebut dapat menimbulkan bentrokan besar-besaran dengan pihak keamanan.

20 November

Karena bingung atas sikap mendua pemimpin pusat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menanggukhan penahanan 20 orang, termasuk Yoke Isir dan Yance Mesak Wabdaron, yang didakwa terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora.

21 November

- ❖ Ketua Dewan Revolusi OPM Moses Weror di PNG menyerukan untuk tetap mengibarkan bendera nasional Papua pada 1 Desember 1999. Dia juga menyerukan supaya gereja-gereja dan masjid-masjid membunyikan lonceng dan tanda pada saat

bendera Bintang Kejora dan Merah Putih dikibarkan, dan harus disertai doa.

- ❖ John Robert Fachiri, S.H., anggota MPR-RI asal Irian Jaya, menyatakan bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora merupakan hak masyarakat dan menunjukkan keinginan masyarakat untuk merdeka. Sementara itu Wagub II Herman Monim menegaskan bahwa pengibaran bendera adalah soal penyampaian aspirasi sehingga TNI/Polri jangan bertindak gegabah; kalau sudah menurunkan Merah Putih Polri/TNI pantas mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

22 November

- ❖ Pangdam Trikora Amir Sembiring menyatakan, tidak melarang rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember bukan berarti mengizinkan. "Tidak melarang dengan maksud disesuaikan dengan situasi."
- ❖ Ketua Komisi A DPRD Irian Jaya Adolf Gim Perangin menghimbau supaya masyarakat tetap merasa aman menjelang aksi 1 Desember 1999.

23 November

- ❖ Dua mantan tahanan politik (tapol)/narapidana politik (napol) Kalisosok Surabaya, Saul J. Bomay dan Jordan Ick menyatakan tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua. Mereka berkeyakinan bahwa bila rakyat Papua berjuang secara damai Pemerintah RI sebagai bapak akan memberikan kemerdekaan kepada anaknya.
- ❖ Pangab Laksamana Widodo A.S. menegaskan, TNI siap melaksanakan darurat militer tidak hanya di Aceh tapi juga di wilayah lain yang ada GPK.

24 November

- ❖ Tom Beanal, Ketua Tim 100, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Papua menuju kemerdekaan baru sampai pada tahap menyamakan visi dan misi perjuangan sehingga pengibaran bendera pada 1 Desember belum berarti merdeka penuh. Jika

dipaksakan, kata Tom, bangsa Papua tidak hanya akan berhadapan dengan Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa lain seperti Amerika dan Belanda, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

- ❖ Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow-Geisler berlangsung pertemuan antartokoh Papua untuk membicarakan aksi 1 Desember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan sejumlah hal, seperti landasan pemikiran pengibaran bendera, pelaksanaan Perjanjian New York 1962, Perjanjian Roma, serta perbedaan pendapat antara Tom Beanal dan Theys H. Eluay.
- ❖ Pangdam Trikora Amir Sembiring secara tegas menyatakan, pengibaran bendera Bintang Kejora melanggar hukum. Aspirasi masyarakat hendaknya disalurkan melalui wadah yang tepat, yakni DPRD Irian Jaya.
- ❖ Yorrays Raweyai mengakui bahwa Deklarasi 12 November 1999 sudah dikirim ke Belanda. Dia juga menyatakan siap jika dipanggil Pangab untuk mempertanggungjawabkan Deklarasi 12 November 1999.

25 November

- ❖ Kasad Jenderal Subagyo H.S. menegaskan, TNI berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.
- ❖ Saul J. Bomay menyatakan akan menyiapkan 2.000 orang Satgas Papua untuk mengamankan pelaksanaan aksi 1 Desember sehingga setiap orang merasa aman. Dia juga menyatakan, “Kalau ada yang turunkan Merah Putih, berhadapan dengan saya.”
- ❖ Mantan tokoh OPM Yap Marey di Nabire menyatakan bahwa izin pengibaran bendera dari Kapolda harus tertulis, tidak hanya lisan.

26 November

- ❖ Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Irian Jaya Koos Urbinas, S.E., menegaskan bahwa masyarakat Papua perlu belajar dari masa lalu. “Selama ini bila bendera Bintang Kejora dikibarkan apa hasilnya? Ada tanggapan dari luar negeri? Seperti dari negara adikuasa Amerika Serikat, dalam hal ini Bill Clinton? Kalau

tanggapan luar negeri dari Weror sama saja dari Theys H. Eluay di Sentani saja. Jangan mau mati konyol.”

- ❖ Di Wamena, Niko Hubi menegaskan bahwa pernyataannya untuk tidak mendukung pengibaran bendera Bintang Kejora datang dari hati nurani dan bukan karena rekayasa pihak luar. Hal senada dikatakan oleh tokoh masyarakat Fakfak, Pdt. J. Kabes, yang mengatakan keinginan untuk tetap berada dalam NKRI.

27 November

Berlangsung perundingan soal pengibaran bendera Bintang Kejora antara Muspida dan tokoh-tokoh Papua di Mapolda Irian Jaya. Hadir dalam acara tersebut Kapolda Irian Jaya, Pangdam Trikora, Theys H. Eluay, Willy Mandowen, dan Don Flassy. Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya. Kelompok pemimpin Papua bersikeras mengibarkan Bintang Kejora di tiga tempat di Jayapura, sementara Muspida melarang aksi tersebut dan akan menindak tegas secara hukum.

29 November

- ❖ Budi Baldus Waromi, anggota MPR dari Irian Jaya, menyatakan bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora melanggar hukum sehingga tidak usah dilakukan, kecuali bila mereka bersedia menanggung akibatnya.
- ❖ Di Jakarta, sekitar 200 mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut: (1) Pemerintah RI mengakui kemerdekaan Papua Barat; (2) Pemerintah RI mengusut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Papua Barat.
- ❖ Jabatan Pangdam Trikora diserahkan dari Mayjen Amir Sembiring kepada Brigjen Albert Inkiriwang di Makodam Irian Jaya.

30 November

- ❖ Kapolda S.Y. Wenas menyatakan bahwa Polri menyiagakan 2/3 pasukan untuk mengamankan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999. Sekitar pukul 14.00 larangan gubernur untuk mengibarkan Bintang Kejora disebarkan lewat helikopter.

- ❖ Di Merauke, DPRD menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora. Sementara DPRD Sorong dan masyarakat sepakat pada 1 Desember akan dilangsungkan doa bersama.

DESEMBER

1 Desember

Di berbagai tempat di Tanah Papua dikibarkan bendera Bintang Kejora, kecuali di Biak.

- ❖ Di Jayapura aksi yang dipimpin oleh Theys H. Eluay dipusatkan di Taman Imbi dan berjalan damai. Pukul 04.30 WIT bendera Bintang Kejora berkibar setelah pengibaran bendera Merah Putih. Dalam aksi ini Theys H. Eluay menyerukan tujuh tuntutan kepada Pemerintah RI, DPRD, dan masyarakat.
- ❖ Di Sentani aksi diadakan di Lapangan Sepakbola Sentani. Aksi dimulai pukul 6.30 WIT dengan pemimpin upacara Dominggus Yaffi dan inspektur upacara Sefnat Ohee. Bendera Merah Putih dikibarkan terlebih dulu, menyusul bendera Bintang Kejora sekitar pukul 7.15 WIT.
- ❖ Di Merauke pengibaran Bintang Kejora yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Merauke berjalan damai pada pukul 09.00 WIT.
- ❖ Di Sorong pengibaran bendera Bintang Kejora dilaksanakan pukul 10.35 WIT secara damai, meski sebelumnya disepakati tidak akan ada aksi pengibaran bendera.
- ❖ Di Wamena pengibaran bendera Bintang Kejora dilaksanakan di Bokondini pada pukul 07.20 WIT karena Bupati David Hubi tidak mengizinkan aksi pengibaran bendera dilaksanakan di Wamena. Penurunan bendera dilakukan pukul 15.45 WIT setelah ada imbauan dari Kapolres Jayawijaya Ajun Komisariss Besar (Pol.) Daniel Suripatty, tokoh masyarakat, anggota Tim 100, dan tokoh agama. Di Wamena, massa beribadah bersama dan tidak mengibarkan bendera.
- ❖ Di Fakfak kegiatan dilaksanakan pukul 05.00 WIT dengan didahului perundingan alot dengan DPRD II. Pengibaran bendera Bintang Kejora (tanpa Merah Putih) dipimpin oleh Conradus

Constantinus Bauw. Bendera diturunkan pukul 17.00 WIT.

- ❖ Di Serui bendera Bintang Kejora dikibarkan pukul 09.15 WIT di Lapangan Trikora dipimpin oleh Ketua LMA Yapen Waropen, M.Y. Tanawani. Bendera diturunkan sore hari sekitar pukul 17.30 WIT.
- ❖ Di Nabire bendera Bintang Kejora dikibarkan pukul 10.40 WIT di atas tiang sepanjang 38 meter dipimpin oleh Ketua LMA Nabire, Menase Sayori. Pengibaran diikuti pidato politik yang isinya: (1) menolak hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 karena tidak sesuai dengan asas demokrasi dan melanggar HAM rakyat Papua, (2) meminta pemerintah meninjau status Propinsi Irian Jaya dalam NKRI serta mengadili Soeharto dan oknum-oknum jenderal yang terlibat langsung dalam DOM di Tanah Papua Barat, dan (3) menuntut pemerintah mengakui kedaulatan bangsa Papua Barat yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961 serta segera menyelesaikan semua pelanggaran HAM.
- ❖ Di Manokwari pengibaran bendera Bintang Kejora dilaksanakan di Lapangan Doreri dan dipimpin oleh Abraham Ramar. Bendera Bintang Kejora berkibar pukul 09.00 WIT dan diturunkan pada pukul 17.30 WIT. Dandim 1703 Manokwari Letkol Adjie Sudarmadji menyatakan bahwa aksi tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan.
- ❖ Di Puncak Jaya, pengibaran bendera dipimpin oleh Anton Tabuni (anggota Tim 100) dan dikibarkan hingga 5 Desember 1999. Penurunan bendera diikuti pesta adat.

2 Desember

- ❖ Di Timika polisi menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa dan (menurut laporan awal) mengakibatkan sekitar 38 orang terluka, tiga di antaranya luka berat. Kejadian tersebut mendapat sorotan tajam dari kalangan pejuang HAM. Komnas HAM meminta aparat untuk membebaskan Pdt. Isaac Onawame dan Mama Josepha Alomang agar mereka bisa membantu menenangkan massa.
- ❖ Di Nabire bendera Bintang Kejora tetap berkibar dan dijaga oleh Satgas Papua.
- ❖ Ketua DPRD Sorong Robert M. Nauw menyatakan siap disidik

oleh polisi berkaitan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Dia hadir dalam aksi tersebut untuk menjaga keamanan kota dengan mengupayakan pendekatan persuasif.

3 Desember

- ❖ Ibu Abilah Murib meninggal dunia akibat pukulan popor senjata aparat dalam insiden penurunan bendera Bintang Kejora secara paksa di halaman Gereja Tiga Raja Timika.
- ❖ Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pembela Kedaulatan Bangsa mendatangi DPR RI dan mendesak TNI/Polri tetap mengibarkan bendera Merah Putih di Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.
- ❖ Menurut Ketua DPRD Irian Jaya T.N. Kaiway, DPRD tidak berkompoten membahas aspirasi "M". Lebih jauh Kaiway menyatakan, "Kita harus melihat aspirasi "M" ini sebagai aspirasi masyarakat, akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa masalah merdeka ini adalah masalah bangsa Indonesia. Jadi untuk di DPRD ini kami tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan sama sekali untuk membahasnya. Ini adalah porsi pemerintah pusat."
- ❖ Ketua DPRD Sorong Robby M. Nauw menyatakan dirinya siap diperiksa aparat bila disebut berada di balik aksi pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999 di Sorong.

4 Desember

- ❖ Kapolda Irian Jaya S.Y. Wenas mengatakan, polisi akan memeriksa tujuh orang yang diduga terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Taman Imbi (Jayapura). Dia juga menyatakan bahwa korban yang meninggal di Timika bukan karena penyerbuan tetapi memang sudah meninggal sebelum 1 Desember, dan saat itu jenazahnya sedang disemayamkan di halaman Gereja Tiga Raja. Sementara itu, Kapendam, Mayor (Inf.) R. Siregar, menegaskan bahwa TNI tidak terlibat langsung dalam insiden di Timika pada 2 Desember.
- ❖ Di Timika 30–40 orang Satgas Papua memeriksa dan mencegah orang Papua yang hendak bepergian dari Bandara Timika.

5 Desember

- ❖ Di Jakarta KNPI mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPD KNPI Sultra, Endang Abbas. Pernyataan itu menegaskan bahwa KNPI tidak rela bila salah satu daerah lepas dari NKRI. Permasalahan Aceh dan Irian Jaya berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga harus diatasi oleh segenap kekuatan bangsa. KNPI juga menolak tuntutan negara federal dan mendukung otonomi daerah seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.
- ❖ Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat menyatakan bahwa keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti di Aceh dan Irian Jaya adalah kegiatan separatis.
- ❖ Ketua LMA Yapen Waropen Marthin Yusuf Tanawani mendatangi DPRD Yapen Waropen untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan Papua.
- ❖ Ketua FORERI Biak Decky Iwanggin menyatakan akan meneruskan pernyataan sikap masyarakat Biak yang disampaikan pada 1 Desember kepada pemerintah melalui Gubernur Irian Jaya. Pernyataan sikap tersebut, antara lain, mendesak pemerintah mengadakan dialog tahap kedua dengan rakyat Papua, mendesak pemerintah mengadili pelaku pelanggaran HAM di Irian Jaya, terutama dalam peristiwa Biak 6 Juli 1998, dan mengharapkan pemerintah atau pemimpin tertentu tidak menjadikan isu putra daerah sebagai komoditi politik.
- ❖ Polres Jayapura memanggil dan memeriksa tujuh orang yang diduga terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember di Jayapura, termasuk Theys Hiyo Eluay.

6 Desember

- ❖ Kapolres Jayapura Letkol (Pol.) Drs. Daud Sihombing, S.H. mengancam menjemput paksa delapan tokoh Papua yang dianggap bertanggungjawab atas aksi pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999 apabila tidak memenuhi panggilan polisi.
- ❖ DPRD Tingkat I Irian Jaya membentuk pansus (panitia khusus) untuk membahas tujuh tuntutan masyarakat yang dinyatakan pada 1 Desember untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

- ❖ Berkas kasus makar Theys H. Eluay dan kawan-kawan, berkaitan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada Juli 1998 di Jayapura, diserahkan kepada kejaksaan.
- ❖ Mahasiswa asal Jayawijaya, Timika, dan Pegunungan Tengah berdemonstrasi di Mapolda Jayapura untuk mempertanyakan tindakan aparat kepolisian menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa di Timika sehingga menimbulkan korban jiwa.

8 Desember

- ❖ Theys H. Eluay menyatakan dirinya sangat siap diperiksa polisi sehubungan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember, namun dirinya belum menerima surat panggilan dari Polres. Dia menyatakan kaget ketika pada 6 Desember pagi rumahnya dikepung oleh aparat keamanan dari kesatuan Brimob.
- ❖ Theys H. Eluay menulis surat No. 03/PNB-PBD/1999 menyangkut peristiwa di Nabire. Surat tersebut menyatakan:
 1. Memang betul ada Deklarasi 12 November 1999 yang isinya menyerukan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora mulai 1 Desember 1999—1 Mei 2000, tetapi dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada pemerintah, sebab rakyat Papua masih merupakan bagian negara Indonesia.
 2. Hasil pertemuan dengan Kapolda dan Pangdam Trikora menghasilkan keputusan bahwa bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan pada pukul 06.00 WIT dan diturunkan pukul 18.00 WIT dengan didahului ibadah subuh dan ibadah sore hari.
 3. Pemimpin bangsa Papua Theys H. Eluay dengan tegas dan terbuka menyatakan kepada pemerintah, dalam hal ini Kapolda Irian Jaya dan Pangdam Trikora, bahwa semua akibat pelanggaran hukum yang terjadi akan dipertanggungjawabkan.
 4. LMA Nabire Mantri Sayori harus menerima dan menyadari dengan hati damai dan cinta kasih agar bendera Papua Barat yang masih berkibar diturunkan sehingga rakyat tidak menjadi korban.
- ❖ Mama Josepha Alomang, seorang pejuang HAM yang dihormati penghargaan tahunan “Yap Thiam Hien Human Rights Award”,

menolak menghadiri acara penyerahan penghargaan tersebut di Jakarta. Sikap tersebut diambil sebagai protes atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap penderitaan rakyat di Irian Jaya.

9 Desember

Di Sarmi tiga warga dilaporkan hilang. Mereka ialah Oktovianus Imaron, Erol Yomaki, dan Eril Suwarjono. Ada kabar mereka disandera GPK/OPM sejak 10 November 1999.

10 Desember

Els-HAM menerbitkan laporan investigasi mengenai peristiwa Timika 2 Desember 1999.

11 Desember

- ❖ Tim 7 berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan DPR/MPR guna menyampaikan aspirasi merdeka. Tim ini terdiri dari Herman Awom (ketua), Agus Alua (wakil intelektual), Thaha Alhamid (wakil Solidaritas Muslim Papua), Martinus Werimon (wakil mahasiswa), John Awi (wakil pemuda), Saul Bomay (wakil mantan tapol/napol), Beatrix Koibur (wakil perempuan). Tim ini ditambah empat orang dari Jakarta, yakni Yorris Raweyai, Hengki Mansawan, Andy Manobi, dan Demianus Wanimbo. Menyusul juga Willy Mandowen dan Tom Beanal.
- ❖ Anggota DPRD Irian Jaya Komisi A, Drs. Anton Kelanangame, menyatakan bahwa persetujuan DPR untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua menunjukkan wakil rakyat mulai mau mendengarkan tuntutan masyarakat.

12 Desember

- ❖ Di Wamena, Kapolres Jayawijaya Letkol (Pol) D. Suripatty memeriksa sembilan orang pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999. Di Sorong, polisi memeriksa Koordinator Mahasiswa Papua Barat Sorong, Maximus Air, selaku penanggungjawab di lapangan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora.
- ❖ Ketua DPRD Sorong Robby M. Nauw menyatakan siap meletakkan jabatan jika terbukti terlibat dalam aksi pengibaran bendera Papua di Sorong.

13 Desember

Dalam kunjungan ke Biak Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan, "Tanpa Irian, Indonesia tidak komplet, tidak menjadi satu wilayah, Indonesia tidak utuh. Dan Irian merupakan bagian dari Indonesia." Wapres mengajak masyarakat Irian Jaya untuk menanggapi seluruh persoalan dengan segala kerendahan dan kelembutan hati serta tidak menggunakan emosi.

15 Desember

Pangdam Trikora Brigjen Albert Inkiriwang menyatakan bahwa meskipun pengibaran bendera Papua belum mengarah kepada disintegrasi bangsa tetapi melanggar hukum. Irpolda Irian Jaya Kol. Suwondo menyatakan bahwa pengibaran bendera Papua diizinkan oleh Polda karena alasan toleransi.

16 Desember

Sebuah delegasi pemimpin masyarakat dan anggota DPRD Irian Jaya yang dipimpin T.N. Kaiway mendatangi DPR untuk menyampaikan tujuh tuntutan, yaitu:

1. Diadakan dialog internasional sebagai tindak lanjut dari Dialog Nasional antara Tim 100 dan Presiden B.J. Habibie pada Februari 1999.
2. Pembebasan seluruh tahanan politik Papua.
3. DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II diijinkan menyelenggarakan sidang umum untuk menyalurkan tuntutan masyarakat mengenai kemerdekaan Papua Barat.
4. Penarikan seluruh aparat keamanan dari wilayah Irian Jaya.
5. Dilakukan investigasi atas pelanggaran HAM di Irian Jaya antara 1961—1999.
6. Pengakuan negara Papua Barat dengan Port Numbay (Jayapura) sebagai ibukota.
7. Pengibaran bendera PBB, Indonesia, dan Papua Barat hingga Mei 2000 di seluruh wilayah Papua sampai dihasilkan penyelesaian yang menyeluruh.

17 Desember

Hans Yoweni, aktivis OPM, menolak tuduhan OPM menyandera

tiga orang dari VIM (Kompleks Melati). “Itu tudingan palsu yang mencemarkan nama serta derajat bangsa Papua Barat secara umum dan organisasi Tentara Pembebasan Nasional (TPN),” kata Yoweni.

19 Desember

- ❖ Kapolres Jayawijaya Daniel Suripatty mengumumkan bahwa tersangka aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember di Bokondini, Jayawijaya, bertambah satu sehingga seluruhnya menjadi 10 orang. Mereka dituduh melanggar Pasal 106–110 KUHP jo. Pasal 155 KUHP tentang makar/usaha memisahkan diri dari NKRI dan kejahatan terhadap keamanan umum.
- ❖ Ketua PWI Irian Jaya, Usman Fakaubun, menyesalkan pengusiran wartawan oleh Dandim 1709/Yapen Waropen dan akan melaporkan tindakan tersebut kepada Pangdam Trikora.
- ❖ Wakil Ketua IV LMA Irian Jaya Wihelmus Masnandifu mengharapkan Pemerintah Indonesia segera membebaskan tapol dan napol Papua tanpa syarat. “Mereka yang dituduh makar karena mengibarkan bendera saya nilai kurang tepat. Apa yang dilakukan rakyat Papua selama ini merupakan dampak perlakuan yang dibuat Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi kalau sekarang kami minta memisahkan diri, tidak lain ingin menuntut hak kami yang telah dirampas.”
- ❖ Komite Independen Papua yang dipimpin Don Flassy menggelar aksi pengumpulan dana dengan nama Aksi Seribuan. Aksi ini bertujuan mendukung perjuangan bangsa Papua. Warga masyarakat, baik asli Papua maupun pendatang yang bersimpati, dihimbau untuk menyumbangkan Rp1.000/minggu.

20 Desember

Dandim 1709/Yapen Waropen Letkol (Inf.) Niko Obadja Woru meminta maaf kepada para wartawan yang diusir saat meliput kegiatan di Gedung Silas Papare.

21 Desember

Menteri PAN Numberi mengajak seluruh masyarakat di Irian Jaya

untuk membangun jalur komunikasi demokrasi dengan tujuan meredam aspirasi merdeka dan tidak perlu alergi atau takut terhadap kata tersebut. Menurut Numberi, semua pemimpin, baik di daerah maupun di pusat, termasuk Presiden, tidak akan mengabulkan permintaan “M” masyarakat Irian Jaya.

22 Desember

Kodam Trikora menyatakan keluar dari urusan politik praktis. Menurut Kapendam Mayor Inf. R Siregar keputusan ini diambil karena TNI tak ingin lagi terlibat dalam urusan di luar tugasnya.

23 Desember

- ❖ Theys H. Eluay resmi menjadi tersangka kasus 1 Desember 1999 dan dijerat “pasal makar”.
- ❖ Ketua DPRD Irian Jaya T.N. Kaiway, S.H. menyatakan perlu ada kesamaan pendapat jika aspirasi “M” akan didialogkan di tingkat nasional maupun internasional, seperti permintaan Dewan Presidium yang disetujui oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

26 Desember

- ❖ Satgas Papua di Nabire merampas dua pucuk senjata dan dua buah mesin pembuat senjata serta menahan dua orang warga yang diduga sebagai otak pembuatnya. Menurut pemimpinnya, Willem Wanimarba, senjata tersebut dirakit oleh warga transmigran di Desa Bumiwonorejo serta kompleks pensiunan Polri dan TNI di Nabire.
- ❖ Tadeus Yogi, yang menyebut dirinya pejuang OPM di Paniai, diundang pemerintah untuk berdialog dengan Presiden Gus Dur di Jayapura.

27 Desember

Mama Yosefa Alomang dan Pdt. Isak Onawame dijadikan tersangka aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Gereja Tiga Raja Timika dengan tuduhan melanggar Pasal 106 jo. 154 jo. 155 KUHP tentang Makar dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

28 Desember

Presiden Abdurrahman Wahid memberikan abolisi kepada 31 orang tapol dan amnesti kepada 33 orang napol Papua, baik yang berada di Papua maupun di luar Papua, melalui Keppres No. 174/1999 tentang Pemberian Abolisi dan Amnesti kepada Tapol/Napol di Indonesia.

29 Desember

Tujuh warga Kampung Sungai, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, dijadikan tersangka aksi pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999 dengan tuduhan melanggar Pasal 154 dan 155 KUHP.

30 Desember

- ❖ Sehubungan dengan kedatangan Presiden Gus Dur ke Irian Jaya, para pemimpin Gereja-gereja di Jayapura menghimbau masyarakat memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi mereka.
- ❖ Beberapa tokoh pengibar bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 di Manokwari diperiksa oleh Mapolres Manokwari.
- ❖ Penasihat Menteri Negara HAM untuk Irian Jaya dan anggota Pokja Hubungan Sipil-Militer Lemhanas, Karel Phil Erari, berpendapat, “Pemberontakan, tuntutan keadilan, hingga tuntutan kemerdekaan di sejumlah wilayah, termasuk Irian Jaya, disebabkan sentralisasi kekuasaan dalam negara kesatuan telah merelatifkan harga diri wilayah di pinggiran Republik ini.”

31 Desember

Dalam kunjungannya ke Irian Jaya Presiden Abdurrahman Wahid meminta maaf atas pelanggaran HAM di Irian Jaya selama ini dan menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden dengan tegas menolak permintaan merdeka, tetapi membuka kesempatan yang luas untuk berdialog.

Bagian II

Perkembangan Gerakan

Aspirasi M(erdeka)

pada 1999

1. LATAR BELAKANG UMUM

1.1. Sikap Dasar Bangsa Papua

Bangsa Papua memiliki satu kultur yang mampu melestarikan keberadaannya selama berabad-abad, yakni sikap untuk “mengatur diri sendiri”. Sikap dasar ini selalu ditunjukkan oleh bangsa Papua saat berhubungan dengan pihak-pihak lain, seperti Pemerintah Kolonial Belanda, kaum misionaris, pedagang, dan pendatang pada umumnya. Bila ada pihak luar yang hendak mengurangi peluang untuk mengatur diri sendiri, bangsa Papua akan mempertahankan diri sekuat tenaga, sehingga pihak luar tersebut umumnya lantas memakai kekerasan untuk mencapai maksudnya.

Menyadari adanya sikap dasar tersebut, pada 1 Desember 1961 Pemerintah Kolonial Belanda mulai menggunakan perspektif yang dirasa sangat cocok, yakni “proses pemerdekaan”. Hilangnya perspektif ini dalam percaturan politik internasional pada 1960-an telah meninggalkan luka yang sangat mendalam.

1.2. Tiga Unsur Faktual

Sambil mengingat sikap dasar tersebut, kita perlu memperhatikan tiga unsur faktual yang turut melatarbelakangi persoalan di Papua dewasa ini:

1.2.1. *Memoria passionis*

Sumber *memoria passionis* atau ingatan penderitaan sebangsa adalah:

- ❖ Kebijakan pembangunan yang diterapkan Pemerintah Indonesia selama 38 tahun terakhir.
- ❖ Terjadinya berbagai pelanggaran HAM di wilayah Papua selama berintegrasi dengan Republik Indonesia.
- ❖ Kehadiran serta tindakan TNI di Papua yang arogan, main kuasa, dan sewenang-wenang.

1.2.2. *Berbagai peristiwa dalam sejarah bangsa Papua*

- ❖ Kemerdekaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada 1 Desember 1961 dengan: (1) mengangkat wakil-wakil masyarakat setempat menjadi 50 persen dari jumlah anggota *Nieuw Guinea Raad* (DPR), (2) membebaskan rakyat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Belanda, dan (3) mensosialisasikan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua".
- ❖ Penetapan *New York Agreement* (NYA) pada 1962 yang menjadi dasar peralihan *Nederlands Nieuw Guinea* dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini ditetapkan tanpa mengikutsertakan bangsa Papua dalam perundingan.
- ❖ Pepera 1969, yang dilaksanakan dengan intimidasi, paksaan, penganiayaan, dan penafsiran NYA secara sepihak sehingga dinilai cacat hukum oleh masyarakat Papua.

1.2.3. *Protes masyarakat yang tidak pernah ditanggapi secara serius oleh penguasa*

Sikap penguasa tersebut mengakibatkan:

- ❖ Bangsa Papua merasa martabat dan keberadaannya sebagai manusia tidak dihargai.
- ❖ Rakyat Papua merasa tidak pernah diakui dan dilindungi secara penuh sebagai warganegara Indonesia dengan segala hak serta kewajibannya, seperti digariskan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

1.3. Diam karena Tak Berdaya

Penderitaan yang dialami masyarakat Papua, sebagaimana dirangkum di atas, menghasilkan masyarakat yang kecewa, diam, takut, merasa dikucilkan, merasa di-obyek/proyek-kan, dan menyimpan kemarahan. Tidak mengherankan bila ingatan penderitaan kolektif tersebut kemudian muncul dan menjadi sumber kekuatan perjuangan tatkala mendapat kesempatan.

2. PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 1999²

Gerakan Aspirasi Merdeka (GERASEM) merupakan salah satu peristiwa kunci di Papua pada 1999. Sejumlah peristiwa kunci lain adalah:

- ❖ Pertemuan Tim 100 dengan Presiden Habibie di Jakarta (26/2).
- ❖ Pembentukan secara spontan posko-posko di seluruh wilayah Papua seusai pertemuan dengan Presiden Habibie.
- ❖ Masyarakat Papua kurang berpartisipasi dalam Pemilu 1999 (7/6).
- ❖ Pengibaran bendera Papua di Nimboran (1/7) dan Sorong (5/7).
- ❖ Pengibaran bendera Papua di Biak (9/9)
- ❖ Pengumuman hasil renungan Tim 100 (10/9).
- ❖ Penolakan berbagai kalangan atas rencana pemekaran wilayah Irian Jaya.
- ❖ Pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gereja di Timika sejak 10 November.
- ❖ Pengumuman rencana aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh wilayah Papua serta pengukuhan kepemimpinan Theys H. Eluay dalam pertemuan akbar di Sentani (12/11).

² Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya terbatas. Catatan yang lebih lengkap dapat dibaca di Bagian I.

- ❖ Pengibaran bendera Papua di seluruh wilayah Papua (1/12).
- ❖ Penyerahan berbagai tuntutan kepada DPRD Papua (2/12).
- ❖ Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid (31/12) yang menjadi momen perubahan nama “Irian Jaya” menjadi “Papua” dan pengumuman rencana Kongres Papua 2000.

3. URAIAN SINGKAT

3.1. Peluang Baru

3.1.1. *Era reformasi*

Jatuhnya Pemerintah Soeharto pada 20 Mei 1998 membuka peluang bagi rakyat Papua untuk mengungkapkan isi hati mereka: menuntut kemerdekaan Papua. Tuntutan ini merupakan puncak dari protes politik yang berawal dari ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan yang ada—seperti terjadi pula di daerah-daerah lain—dan dipicu peristiwa Biak 6 Juli 1998. Tuntutan tersebut mula-mula disalurkan melalui FORERI, karena berbagi saluran lain seperti DPRD tersumbat dan melalui Dialog Nasional.

3.1.2. *Aspirasi “M” terungkap di depan Kepala Negara*

Aspirasi M (merdeka) tersebut terungkap jelas dalam pertemuan antara Tim 100 dan Presiden Habibie. Dalam pertemuan tersebut Tim 100 menyatakan, “Kami sudah cukup menderita; kami sebenarnya sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961; kedaulatan kami dirampas oleh Republik Indonesia; kami sebagai bangsa tidak diakui dan martabat kami diinjak; segala hal ini terbukti dalam sejumlah besar pelanggaran hak-hak asasi orang Papua. Segalanya itu menjadi dasar nyata untuk menyatakan bahwa sekarang sudah cukup, dan kepercayaan masyarakat Papua pada Pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi.”³

3.1.3. *Titik awal gerakan kerakyatan*

Pernyataan Tim 100 di hadapan Presiden Habibie tersebut mengagetkan banyak orang, termasuk Presiden sendiri, hingga

³ Rangkuman bebas dari Wakil-wakil Bangsa Papua Barat, “Pernyataan Politik Bangsa Papua Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia”, Jakarta, 26 Februari 1999.

Presiden bungkam seribu bahasa dan hanya bisa meminta kepada Tim 100 untuk merenungkan kembali isi pernyataan mereka. Sebaliknya, warga Papua yang merasa diwakili oleh Tim 100 merasa lega karena isi hati mereka terungkap di forum nasional. Demikianlah, benih suatu gerakan kerakyatan sudah dilahirkan.

3.2. Tanggapan Masyarakat

3.2.1 Reaksi awal

Segera setelah anggota Tim 100 pulang ke daerah masing-masing, warga secara spontan mendirikan posko di banyak tempat sebagai “langkah awal” perjuangan. Posko menjadi semacam bentuk konkret tindakan lebih lanjut yang bersifat lokal, sekaligus sebagai lambang harapan masyarakat yang lama terpendam dan kini terungkap. Posko juga menjadi tempat masyarakat bertemu atau menanti datangnya kemerdekaan (yang biasanya dikatakan sudah dekat!). Di Posko masyarakat berkumpul, berceritera mengenai pengalaman serta harapan mereka, bergembira bersama, dan memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir. Posko akhirnya menjadi tempat sosialisasi tuntutan yang disampaikan oleh Tim 100 kepada Presiden Habibie.

3.2.2. Posko-posko ditantang

Arti penting posko ternyata “dimengerti” oleh pihak aparat keamanan. Pada 17 April 1999 Kapolda Propinsi Irian Jaya mengeluarkan maklumat yang isinya menginstruksikan supaya semua posko dibubarkan dalam waktu 48 jam. Aparat keamanan menilai posko sebagai tempat berpolitik praktis menuju makar. Kapolda juga menyatakan segala bentuk sosialisasi isi pertemuan Tim 100 dengan Presiden Habibie dilarang.

Terbitnya maklumat tersebut ternyata justru menambah semangat juang elit politik dan masyarakat Papua. Mereka menuntut Kapolda mencabut maklumatnya. Tuntutan tersebut tidak diindahkan, tetapi maklumat tersebut juga tidak diterapkan secara konsekuen; hanya beberapa posko yang dibubarkan. Meski demikian, para pejuang mengajak masyarakat tetap tenang, bersikap damai, dan berdoa agar perjuangan berhasil.

3.3.3. *Gaya yang khas*

Perkembangan GERASEM menunjukkan gaya yang mungkin khas Papua. Setelah beramai-ramai menyambut anggota Tim 100 yang pulang dari Jakarta dan mengadakan sejumlah pertemuan massal untuk mensosialisasikan isi pertemuan Tim 100 dengan Habibie, banyak pejuang, bahkan anggota Tim 100 sendiri, kembali pada kehidupan mereka semula. Mereka sibuk dengan hal-hal biasa sambil menikmati ingatan manis peran mereka sebagai wakil masyarakat. Hanya sejumlah orang yang terus berkeliling dan menjadi penyambung lidah masyarakat di forum nasional maupun internasional. Kebanyakan anggota Tim 100 mengambil sikap berdiam diri.

Sikap para pejuang dan anggota Tim 100 tersebut membingungkan masyarakat luas, karena masyarakat ingin melihat langkah konkret berikutnya. Bukan hanya itu. Tim 100 juga terkesan bersikap mendua. Pada 26 Februari 1999, misalnya, Tim 100 menyatakan akan memboikot Pemilu 1999, namun pernyataan tersebut tidak diikuti dengan petunjuk lebih lanjut. Bahkan tersiar berita sejumlah anggota Tim 100 menjadi tokoh salah satu partai politik peserta pemilu.

3.2.4. *Informasi terbatas serta pengaruhnya*

Keadaan tersebut di atas sering bercampur dengan tidak jelasnya harapan yang secara realistis bisa diwujudkan karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Isi pembicaraan masyarakat Papua menunjukkan seolah-olah merdeka sudah di depan mata, padahal perjuangan yang harus ditempuh masih panjang dan berliku.⁴ Ironisnya, tidak ada pihak yang membantu menyadarkan masyarakat mengenai hal tersebut. Boleh jadi sikap tersebut berkaitan erat dengan latar belakang budaya yang bercampur “pengharapan gaya *cargocult*” sehingga masyarakat sulit menerima kenyataan. Banyak orang Papua mengatakan, “*Kitorang* nanti 1 Desember 1999 kasih naik bendera dan selesai; *kitorang*

⁴ Informasi yang didapat kadang tidak betul, seperti mengenai dukungan PBB dan sejumlah negara asing, yang mudah memunculkan harapan yang berlebihan. Bandingkan dengan keterangan pers Els-HAM pada 5 Februari 2000. *Cenderawasih Pos*, 6 Februari 2000.

merdeka sudah!⁵ Dengan kondisi semacam ini, tanpa sadar, mental masyarakat bisa turun akibat kecewa, jengkel, dan lelah yang bergabung menjadi satu, sampai-sampai pertolongan orang di pinggir jalan untuk memberi seteguk air tidak ditanggapi.

3.2.5. Hilangnya koordinasi perjuangan

Kekaburan strategi perjuangan mengakibatkan sejumlah aksi terkesan tidak ada koordinasi. Pada awal Juli 1999, misalnya, ketika bendera Papua dikibarkan di dua tempat, Nimboran dan Sorong, para pemimpin GERASEM dalam berbagai kesempatan justru mengajak masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera Papua.

Demikian pula dengan aksi yang terjadi di Manokwari, ketika Satgas Papua memeriksa para penumpang yang turun dari kapal antarpulau pada 19 September; di Timika, ketika bendera Papua dikibarkan mulai 10 November 1999; di Nabire, ketika bendera Papua tetap dikibarkan sesuai upacara pada 1 Desember 1999. Masyarakat yang terlibat berbagai aksi tersebut seolah tidak memiliki pemimpin lagi sehingga mudah diperalat oleh pihak lain.⁶ Ternyata suara “pemimpin” tidak selalu ditanggapi sebagaimana yang dikehendaki; apalagi mulai beredar isu aksi-aksi tersebut direkayasa oleh pihak ketiga (umumnya disebut provokator).

3.3. Gaya Kepemimpinan

3.3.1. Tahap awal

Dalam berbagai aksi unjuk rasa pada bulan-bulan awal 1998 pusat kepemimpinan belum kentara. Aksi sesekali dimotori oleh mahasiswa, sesekali oleh aktivis pemuda atau LSM, sesekali oleh kalangan Gereja. Namun, setelah komunikasi antarunsur tersebut terjalin, pusat kepemimpinan gerakan mulai tampak, yakni dengan dibentuknya Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI) pada 27 Juli 1998. Forum ini, yang terdiri dari unsur adat, Gereja, LSM, mahasiswa, dan kaum perempuan, berfungsi sebagai “tempat pertemuan serta perundingan/dialog bagi segala aspirasi.”

⁵ Ungkapan yang sering terdengar setelah rencana aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 diumumkan.

⁶ Bandingkan dengan berita 3 September 1999 mengenai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Nimboran dan berita 10 September 1999.

Kepemimpinan terletak pada lembaga-lembaga ketimbang pribadi-pribadi.

Berbagai aspirasi yang berkembang dalam forum tersebut adalah: “O” (otonomi), “F” (federasi), dan “M” (merdeka). Tentu saja yang populer adalah “M”, yang sulit disalurkan melalui wakil rakyat resmi. Oleh karena itu, FORERI diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi alternatif yang efektif, mampu memajukan suatu refleksi atas segala pengalaman serta penderitaan masyarakat Papua selama 38 tahun bergabung dengan Republik Indonesia, dan mampu merumuskan arah perjuangan di masa depan.

3.3.2. Tahap peralihan I

Menjelang pelaksanaan Dialog Nasional terjadi suatu perubahan penting. Semula, FORERI diandalkan sebagai fasilitator Dialog Nasional dan perumus isi dialog, namun tugas tersebut diambil alih oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Tim 100 yang dipimpin Tom Beanal. Anggota tim ini dipilih tanpa kriteria yang ketat. Pribadi-pribadi yang cukup vokal pada saat itu, seperti Theys H. Eluay dan Don Flassy, tidak masuk dalam Tim 100 lantaran masih berstatus tahanan kota dan menunggu penyelesaian hukum atas tuduhan berbuat makar. Mulai saat itu bukan lagi lembaga-lembaga yang menentukan arah perjuangan, melainkan Tim 100.

3.3.3. Tahap peralihan II

Walaupun Tim 100 tidak dapat disamakan dengan pribadi pemimpinnya, masyarakat sering mengharapkan “arahan” dari pemimpin tim tersebut, tetapi tidak ada reaksi. Selama beberapa bulan Tim 100 dan pemimpinnya cenderung diam dan membiarkan berbagai peristiwa, seperti Pemilu 1999, berlangsung seperti biasa. Sikap ini menunjukkan tuntutan mereka pada 26 Februari bukanlah harga mati—sebagaimana tuntutan dibentuknya pemerintah transisi sebelum 31 Maret 1999—dan perjuangan kemerdekaan dijalankan secara damai.

Setelah didorong oleh beberapa kejadian di wilayah Papua, seperti di Nimboran, Sorong, Manokwari, dan Biak yang terkesan “di luar kordinasi”, setelah masyarakat terus mempertanyakan keberadaan Tim 100, dan setelah pemerintah pusat terkesan tidak terlalu ambil pusing terhadap aspirasi masyarakat Papua, Tim 100

akhirnya angkat suara lagi. Pada 10 September tim ini mengumumkan hasil renungannya, seperti diminta oleh Presiden Habibie, yang intinya sama dengan tuntutan pada 26 Februari.

3.3.4. Tahap peralihan III

Pada saat yang sama, 10 September, Theys H. Eluay menawarkan perannya sebagai pemimpin rakyat Papua dialihkan kepada pihak lain (FORERI/Tim 100), namun tawaran tersebut tidak ditanggapi secara positif dan akhirnya hilang secara perlahan. Baru setelah Theys H. Eluay menggelar suatu pertemuan yang cukup menghebohkan, saat merayakan HUT-nya pada 12 November 1999, dan membiarkan dirinya dinobatkan sebagai Pemimpin Besar Rakyat Papua, masalah kepemimpinan gerakan mulai didiskusikan secara lebih serius.

Pada acara tersebut Theys H. Eluay menyerukan untuk mengibarkan bendera Papua mulai 1 Desember 1999 hingga 1 Mei 2000. Seruan ini dinilai sensitif dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang tidak dikehendaki oleh pemimpin masyarakat Papua lain. Apalagi dalam acara tersebut Theys H. Eluay mengangkat Yorris Raweyai sebagai pendampingnya selaku Pemimpin Masyarakat Papua di luar Tanah Papua, sehingga menimbulkan polemik yang cukup panas.

Menjelang 1 Desember 1999, beberapa nama seperti Tom Beanal (Ketua Tim 100), Herman Awom (Wakil Ketua Sinode GKI), Willy Mandowen (FORERI), Thaha Moh. Alhamid, Yusuf Tanawani (Ketua LMA Serui), dan Don Flassy makin mengemuka. Mereka aktif melobi berbagai pihak sehingga Peristiwa 1 Desember 1999 berlangsung tanpa kekerasan. Orang-orang ini, yang bertindak dengan gaya "politikus" ketimbang Theys H. Eluay, seperti mengisyaratkan gaya kepemimpinan Papua sudah saatnya disesuaikan dengan kebutuhan baru.

3.3.5. Tahap pembulatan

Perkembangan semakin mengkrystal pada Desember 1999, ketika sebuah tim yang terdiri dari pemimpin masyarakat mondar-mandir Papua-Jakarta untuk bernegosiasi. Tim ini ketika bertemu anggota DPRD Tingkat I pada 2 Desember berjumlah 124 orang,

tetapi ketika berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR/MPR-RI pada 11 Desember tinggal tujuh orang. Tim ini pula yang aktif terlibat dalam pertemuan dengan Presiden RI yang baru, Abdurrahman Wahid, pada 31 Desember 1999 (termasuk menentukan isi pertemuan) dan menjadi pelaksana Musyawarah Besar pada 26-28 Februari 2000 yang menghasilkan suatu presidium (konsorsium pemimpin). Perkembangan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang lebih personal dengan kerangka yang lebih demokratis (Presidium serta Dewan Papua) makin menonjol.⁷

3.4. Materi Perjuangan

Tuntutan di depan Presiden Habibie pada 26 Februari 1999 dibuka dengan pernyataan:

Bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak tahun 1963 sampai sekarang ini bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status politik Papua Barat yang pada tanggal 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah negara merdeka di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pernyataan tersebut menjadi alternatif terbaik bagi sebuah harapan dan cita-cita masa depan bangsa Papua Barat, namun telah dianeksasi oleh negara Republik Indonesia.⁸

Pernyataan tersebut diikuti dengan keterangan lanjutan yang berisi sejumlah unsur yang menjadi “dasar perjuangan”. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

3.4.1. *Memoria passionis*

Mengunjungi berbagai pelosok Tanah Papua dengan mudah kita mendengar bermacam kisah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat. Rakyat dengan tajam dan jernih merekam penderitaan mereka. “Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama ABRI; di

⁷ Dalam struktur kepemimpinan yang terbaru perlu disebut Front Nasional Papua (FNP) yang dibentuk pada 23 Juni 2000. FNP dipimpin oleh Herman Wayoi, seorang tokoh masyarakat Papua.

⁸ Wakil-wakil Bangsa Papua Barat, “Pernyataan Politik Bangsa Papua Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia”, Jakarta, 26 Februari 1999, hlm. 1.

lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya, sekarang orang sudah kasih rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal,” cerita mereka. Itu baru sedikit cerita yang tidak pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun. Inti dari semua cerita mereka, “Kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek, obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme, dan sebagainya. Itulah sudah.”

Secara lebih sistematis penderitaan mereka bisa dikelompokkan menjadi lima macam.

3.4.1.1. Pelanggaran HAM

Kondisi HAM di Tanah Papua memprihatinkan. Peristiwa Pepera 1969 benar-benar dicatat dalam ingatan kolektif bangsa Papua sebagai pelanggaran hak mereka.

Selama ini, ketika rakyat hendak mempertahankan identitas kultural mereka (baik tatanan sosial, tatanan kepemimpinan, maupun tatanan hak-kewajiban) sebagai pegangan hidup, mereka dinilai pemerintah menolak pembangunan. Rakyat seringkali juga terjepit antara ikatan kultural mereka dan kelompok yang dicap OPM dan tuntutan pemerintah serta ABRI. Akibat puluhan tahun berada dalam kondisi tersebut, struktur mental bangsa Papua yang terbentuk adalah ketakutan. Beberapa laporan mengenai pelanggaran HAM⁹ sudah diterbitkan, namun investigasi independen untuk menyingkapkan semua bukti belum dilakukan.

3.4.1.2. Hilangnya identitas

Kebudayaan orang Papua oleh pihak luar dipersempit menjadi kesenian serta kerajinan tradisional semata. Kebudayaan tidak dilihat sebagai sebuah filsafat hidup yang lengkap, sebagai cara memandang dunia. Sikap etnosentris pihak luar tidak membantu bangsa Papua mengembangkan nilai-nilai budaya mereka agar lebih

⁹ Lihat Bagian III buku ini.

dinamis. Berbagai nilai, seperti pandangan tradisional terhadap alam yang membuat lingkungan hidup lestari, relasi antarpihak dan antarpribadi yang egaliter, atau sistem pertanian yang adaptif terhadap alam pegunungan, misalnya, selayaknya dikembangkan secara serius. Pengembangan budaya bukan saja penting bagi nilai-nilai asli yang berharga, tetapi juga untuk mengurangi dampak negatif sejumlah aspek yang menghambat perkembangan budaya, seperti paham sukuisme, pengaruh minuman keras, serta kurangnya penghargaan terhadap perempuan.

3.4.1.3. Pergeseran komposisi penduduk

Arus transmigran—baik yang terencana maupun spontan—di Tanah Papua telah mengakibatkan terjadinya pergeseran komposisi penduduk. Bangsa Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Tetapi, soal yang lebih mendasar adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara penduduk asli dan transmigran. Selain itu, proses integrasi budaya pendatang dengan budaya asli tidak terjadi.

Kesenjangan tersebut berpotensi memicu konflik, apalagi ditambah kekecewaan terhadap pemerintah yang main ambil tanah adat. Dengan dalih tanah dikuasai negara dan pembangunan nasional harus didahulukan, pemerintah menguasai tanah-tanah adat, yang dalam budaya Papua merupakan warisan, bukan komoditas. Inilah yang menjadi salah satu trauma.

Dalam pada itu bukan rahasia lagi bahwa banyak warga transmigran yang terlantar karena berbagai prasarana, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, hingga fasilitas peribadatan tidak tersedia secara memadai. Akibatnya, banyak dari mereka meninggalkan lahan dan menjadi buruh di pabrik kelapa sawit atau pabrik pengolahan kayu.

3.4.1.4. Pengurusan kekayaan alam

Sumber daya alam Bangsa Papua dihisap oleh kaum pemodal dalam jumlah yang sangat besar, tetapi hasilnya tidak dirasakan oleh orang Papua. Hampir semua perusahaan yang beroperasi di Papua, seperti perusahaan kayu gelondongan, kayu lapis, kayu gaharu, perkebunan kelapa sawit, perikanan berskala besar,

tambang emas dan tembaga, tidak membuat struktur ekonomi rakyat berdaya saing. Sikap kewirausahaan rakyat setempat kurang dikembangkan; sementara rakyat Papua telah kehilangan tanah mereka karena “dibagi-bagi” untuk berbagai perusahaan. Akibatnya, muncul berbagai protes masyarakat, sebagaimana terjadi pada 1998-1999, terutama kepada PT Freeport. Perusahaan ini selalu menjadi sasaran kemarahan rakyat karena dianggap sebagai “lambang” pelanggaran hak-hak rakyat Papua oleh perusahaan industrial yang beroperasi di Papua.

3.4.1.5. Pengembangan SDM yang tidak serius

Pemerintah kurang serius mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Jika kita berkesempatan mengunjungi berbagai kampung di pedalaman, tampak banyak bangunan sekolah dasar (SD), pondasi pendidikan, nyaris roboh. Tidak hanya itu, satu atau dua guru harus mengajar enam kelas, buku pelajaran tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, atau keluhan guru yang gajinya selalu terlambat beberapa bulan. Jika di tingkat dasar saja pendidikan tidak beres, bisa dibayangkan keadaan di tingkat berikutnya. Selain pendidikan, layanan kesehatan juga sulit dijangkau oleh rakyat. Seorang mantri, apalagi seorang dokter, terampil yang siap melayani masyarakat adalah sebuah kemewahan di pedalaman.

3.4.2. Rangkuman materi perjuangan GERASEM

Berbagai keadaan tersebut di atas menjadi ingatan kolektif bangsa Papua. Ingatan tersebut, yang mengandung kekuatan, diwariskan turun-temurun. Karena itulah, GERASEM bertujuan untuk mengatasi ingatan *passionis* yang telah melumpuhkan kehidupan masyarakat Papua dewasa ini dan menutupi suatu perspektif cerah di masa mendatang.

Secara rinci, tujuan GERASEM adalah: (1) meluruskan sejarah, (2) mencari keadilan (sosial) serta menegakkan hukum, dan (3) mencari pengakuan atas hak-hak mereka sebagai bangsa yang memiliki identitas sendiri. Satu tahun terakhir unsur pelurusan sejarah makin diangkat dan menjadi dasar utama perjuangan. Sangat ditekankan bahwa: (1) kedaulatan sudah diperoleh pada 1

Desember 1961, (2) segala kesepakatan internasional dibuat tanpa mengikutkan suara bangsa Papua (sehingga *New York Agreement* 1962 ditolak mentah-mentah), dan (3) Pepera 1969 cacat hukum. Pelurusan sejarah tersebut terkesan menomorduakan persoalan pelanggaran HAM.¹⁰

¹⁰ Perkembangan ini diperlihatkan saat berlangsung Musyawarah Besar pada 23–26 Februari 2000, dan lebih jelas terungkap dalam Kongres Papua II, 29 Mei–4 Juni 2000.

Bagian III Kondisi Hak Asasi Manusia pada 1999

1. LATAR BELAKANG

Kondisi HAM di Tanah Papua sepanjang 1999 bisa disoroti dari berbagai segi. Uraian berikut membatasi diri pada hak-hak sipil dan politik.

Pada dasarnya kondisi HAM di Papua 1999 bisa dianalisis dari para pelaku utama berbagai peristiwa sosio-politik yang berdampak luas, yakni: (1) masyarakat akar rumput, (2) organisasi nonpemerintah (ornop), yakni LSM, Komnas HAM, dan Gereja-gereja, (3) OPM dan Satgas Papua, (4) aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, dan (5) pemerintah sipil.

2. PERISTIWA-PERISTIWA KUNCI 1999¹¹

Setelah memeriksa berbagai peristiwa menyangkut HAM yang dilaporkan sepanjang 1999, kami dapat menyebut sejumlah peristiwa kunci, yakni:

- ❖ Dialog Nasional antara Presiden Habibie dan Tim 100 (26/2).
- ❖ Sejumlah peserta Dialog Nasional diteror sepulang dari Jakarta (9/3) dan dicekal (28/6).

¹¹ Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya terbatas. Catatan yang lebih lengkap dapat dibaca di Bagian I.

- ❖ Terjadi penembakan/pertikaian di beberapa tempat, seperti di Waena (Obeth Badii, 28/3), di Arso (empat karyawan PTP II, 5/5), di Manokwari (15/5), di Topo (24/5), di Genyem (7/6), di Jayapura (9/7), di Dempta (23/7), dan di Manokwari (24/9).
- ❖ Kapolda memerintahkan posko-posko masyarakat Papua dibubarkan (17/4).
- ❖ Sejumlah laporan pelanggaran HAM diterbitkan, yakni mengenai peristiwa di Biak (10/7), peristiwa di Pegunungan Bintang (19/7), peristiwa di Mapnduma (24/8), dan peristiwa di Timika (10/12).
- ❖ Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya mengenai pelanggaran HAM di Papua sejak diberlakukannya status DOM (24/8).
- ❖ Pangdam Trikora menyatakan, segala laporan pelanggaran HAM—termasuk laporan Komnas HAM—hanya dibuat-buat saja, atau menurut Kadispen Polda Irian Jaya “sekedar ingin mencari masalah” (29/8, 4/9).
- ❖ Uskup Jayapura mengecam pernyataan Pangdam dan Kapolda mengenai laporan-laporan HAM (6/9).
- ❖ Kerusuhan di Timika menyebabkan empat orang meninggal dunia (30/9).
- ❖ Bendera Papua yang dikibarkan di halaman Gereja Tiga Raja di Timika diturunkan paksa oleh aparat keamanan (2/12).

3. URAIAN SINGKAT

3.1. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Berbagai laporan pelanggaran HAM 1999 yang diterbitkan sejumlah lembaga sebagian berisi “laporan ulang” dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan-laporan pelanggaran HAM yang paling penting—karena bersifat massal dan struktural—adalah:

- ❖ Laporan penembakan peserta unjuk rasa damai di Biak pada 6 Juli 1998 (laporan yang disusun ulang oleh Els-HAM Irian Jaya).
- ❖ Laporan penembakan penduduk sipil dalam operasi militer pembebasan sandera di Mapnduma, Mei 1996. Laporan ini, yang diterbitkan oleh Els-HAM Irian Jaya, diserahkan kepada Komisi

I DPR-RI¹² dan Komnas HAM¹³ pada 24 Agustus dan didukung tiga Gereja di Papua.

- ❖ Laporan tindakan aparat keamanan di Pegunungan Bintang 1999 oleh SKP Keuskupan Jayapura. Laporan ini selain diserahkan kepada Komisi I DPR-RI dan Komnas HAM juga diserahkan kepada Pangdam Trikora pada 16 Juli.
- ❖ Peristiwa penembakan penduduk sipil di Manokwari pada November 1999. Peristiwa ini tidak pernah diungkap secara tuntas oleh pemerintah maupun kepolisian. Kalangan LSM dan Gereja telah melayangkan surat tuntutan kepada gubernur dan Kapolda untuk mengusut insiden tersebut dan menjelaskannya kepada masyarakat.
- ❖ Laporan awal mengenai penurunan paksa bendera Bintang Kejora di Timika, 2 Desember 1999. Laporan ini, yang disusun oleh Els-HAM, diumumkan kepada masyarakat dan pers pada 10 Desember.

Berbagai peristiwa lain yang kurang mendapat perhatian adalah: pembunuhan Obeth Badii di Waena (28/3), pembunuhan di Arso (5/5), pembunuhan di Genyem (7/6), pembunuhan di Pelabuhan Jayapura (9/7), dan peristiwa orang hilang atau pembunuhan di Sarmi (November-Desember). Sebagian dari berbagai kasus tersebut diselesaikan “secara kekeluargaan” dengan membayar denda dan membawa satu-dua pelaku ke pengadilan. Yang masih gelap adalah peristiwa di Arso, Sarmi, dan Waena.

3.2. Lima Kasus Khusus

Berdasarkan tanggapan dari pemerintah, DPR, Komnas HAM, masyarakat, aktivis LSM, TNI, dan Polri ada lima kasus yang perlu dicermati, yakni:

3.2.1. Kasus Biak

Setelah peristiwa penembakan di Biak pada 6 Juli 1998 terjadi, Komnas HAM datang ke lokasi kejadian dan melihat dari dekat

¹² Ketua Komisi I DPR-RI waktu itu ialah Aisyah Amini.

¹³ Ketua Komnas HAM waktu itu ialah Marzuki Darusman.

kondisi masyarakat yang berada dalam keadaan tegang. Komnas HAM berjanji akan melakukan investigasi yang lebih lengkap atas peristiwa tersebut, namun hingga laporan Els-HAM kepada pemerintah, DPR-RI, dan Komnas HAM diterbitkan, tidak ada langkah konkrit dari Komnas HAM. Pemerintah maupun DPR juga tidak menanggapi insiden tersebut secara serius, meski masyarakat Biak maupun mahasiswa HIMABI di Jayapura berunjuk rasa menuntut penyelesaian masalah tersebut. Pengaduan masyarakat melalui Els-HAM juga tetap tinggal laporan hingga kini.

3.2.2. Kasus Mapnduma

Kasus Mapnduma bergaung hingga ke tingkat dunia karena laporan Els-HAM dan tayangan di TV ABC oleh Mark Davis mengindikasikan ICRC dan tentara asing terlibat pembunuhan penduduk sipil. Pemerintah Indonesia, DPR-RI, dan TNI tidak bereaksi atas dugaan tersebut. Sebaliknya, ICRC segera menyewa investigator independen untuk menyelidiki kebenaran laporan Els-HAM dan TV ABC tersebut. Hasil penelitian investigator independen tersebut dikutip dalam butir-butir berikut ini:¹⁴

Conclusion:

- ❖ The information gathered in the course of Mr. Obuchowicz's investigation enabled the ICRC to state categorically that Syviane Bonadei did not take part in the military operation carried out in Nggeselema on 9 May 1996 to liberate the hostages held by the Free Papua Movement. For three years the ICRC failed unequivocally deny Ms Bonadei's involvement. The organization owes it to her to take a clear position on the matter.
- ❖ The ICRC withdrew from its role as a neutral intermediary in accordance with its established policy in such matters. Although the dangerous circumstances in which it was taken are sufficient to explain this abrupt decision, the head of delegation's handling of the situation failed to ensure adequate internal communication and lacked consistency with regard to its consequences.
- ❖ There can be no doubt that the military forces that took action on 9

¹⁴ Pieter Obuchowicz, seorang investigator independen, disewa oleh ICRC Geneva dan bekerja sejak 25 Oktober 1999. Hasil penelitiannya diumumkan pada 15 Maret 2000. Keterangan yang kami kutip adalah bagian dari "Summary and Conclusions of the Investigation into the events of 9 May 1996 in Western Papua, Entrusted by the ICRC to an Outside Consultant", 15 Maret 2000.

May 1996 in Nggeselema made perfidious use of the ICRC's role in the affair (i.e. the white helicopter). They may also have misused the emblem, though this has not been definitely proved.

Dengan penelitian tersebut ICRC ingin menjernihkan beberapa hal, seperti dugaan keterlibatan mantan staf ICRC, Sylvianne Bonadei, sekaligus mempertegas adanya kekuatan militer yang menjadi aktor utama dengan memperalat kehadiran Palang Merah Internasional (helikopter putih) dan lambang palang merah—meski hal yang terakhir sulit dibuktikan. Yang patut dicatat, setelah ada pernyataan resmi dari ICRC, tidak ada penjelasan resmi dari Mabes TNI yang bertanggungjawab atas seluruh operasi.

3.2.3. Kasus Pegunungan Bintang.

Mahasiswa Pegunungan Bintang di Jayapura berunjuk rasa bersama mahasiswa Biak (HIMABI) menuntut pemerintah, TNI, serta Polri menyelesaikan kasus Pegunungan Bintang (juga kasus Biak dan Mapnduma). Kendati di tingkat nasional tidak ada tanggapan, di tingkat propinsi pihak TNI/Polri cukup serius menindaklanjuti kasus tersebut setelah Uskup Jayapura mengeluarkan pernyataan yang sangat kritis kepada Pangdam Trikora (surat Uskup 1 September 1999).¹⁵ Kodam Trikora meneliti kebenaran laporan SKP dengan mengirimkan satu tim perwira¹⁶ ke Oksibil pada 14–15 September 1999 dan Abmisibil pada 16-19 September 1999. Tim tersebut bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan secara tekun dan terbuka semua kisah masyarakat dan korban. Hasil penyelidikan tim ini dituangkan dalam Surat Konfidensial Pangdam Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring kepada Keuskupan Jayapura.¹⁷ Mengingat sifat surat Pangdam, kami menilai kurang tepat mengutip isi surat tersebut. Tetapi, pada prinsipnya, Pangdam menyatakan isi laporan SKP benar dan akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Dengan

¹⁵ Bandingkan dengan catatan 4 September 1999.

¹⁶ Tim perwira tersebut terdiri dari Letkol Franses Siahaan (ketua), Mayor (Pol.) Rudi (anggota), Kapten Gurning (anggota), Letnan CPM Napitupulu (anggota), dan Letnan Jarwo, S.H. (anggota).

¹⁷ Surat Konfidensial Pangdam Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring No. K/219/IX/1999 tertanggal 30 September 1999.

tanggapan Pangdam Trikora tersebut masyarakat merasa lega karena didengar dan dihargai martabatnya.

Sebagai tindak lanjut penyelidikan, personel militer dan kepolisian di tiga kecamatan, Oksibil, Kiwirok, dan Okbibab, diganti. Apakah ada personel militer dan kepolisian yang diproses hingga pengadilan belum diketahui secara pasti.

3.2.4. Kasus Manokwari

Kasus penembakan di Manokwari, 24 September 1999, mengguncangkan kota tersebut dan memicu kerusuhan cukup luas. Suasana tegang meliputi kota selama dua hari. Dalam suasana demikian pemerintah daerah dan kepolisian tidak segera menyelesaikan masalah agar salah paham di antara masyarakat tidak meluas. Oleh karena itu, Foker LSM Irian Jaya mendesak Gubernur Freddy Numberi dan Kapolda untuk memberi penjelasan soal peristiwa tersebut, tetapi tidak ditanggapi. Malah, Kapolres Manokwari menyangkal anakbuahnya menembaki masyarakat.

3.2.5. Kasus Timika

Pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman Gereja Tiga Raja Timika sejak 10 November 1999 menimbulkan suasana khusus di tengah masyarakat Papua. Di tempat kejadian perwakilan suku-suku di Papua dari 13 kabupaten berkumpul dan menggelar semacam pesta rakyat. Pemerintah, polisi, dan DPRD berusaha berdialog agar bendera diturunkan, tetapi tidak berhasil, karena tidak jelas siapa yang bertanggungjawab atas aksi tersebut. Dalam keadaan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan tidak berusaha meminta jasa pihak ketiga yang dipercaya semua pihak untuk berunding. Akhirnya, kepolisian menempuh jalan kekerasan untuk membubarkan massa. Suasana tegang pun menyelimuti kota selama satu hingga dua hari. Meski selongsong dan peluru timah ditemukan di lokasi kejadian, Polda menyangkal anggotanya (kesatuan Brimob) melakukan penembakan.

3.3. Sejumlah Unsur Kesimpulan Kritis

3.3.1. Catatan kondisi HAM secara umum

Dari sejumlah kasus di atas dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat agar berbagai pelanggaran HAM diusut hingga tuntas

belum terwujud. Selain kasus-kasus yang ditonjolkan di atas, terdapat sejumlah “warisan kasus” yang belum diselesaikan, meskipun berulang kali diangkat, seperti kasus Timika (1995) dan kasus “Uncen Berdarah” (1998).

3.3.2. Masyarakat semakin kritis

Setelah lepas dari belenggu Pemerintah Orde Baru, masyarakat Papua semakin berani mengungkapkan penderitaan mereka hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Berbagai kejadian yang mereka alami tidak lagi sekedar menjadi percakapan di rumah adat, melainkan telah menjadi laporan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan lembaga resmi seperti pemerintah, DPR-RI, Komnas HAM, TNI, dan Polri. *Memoria passionis* mulai menampakkan kekuatannya untuk menggugat struktur yang mapan.

3.3.3. Penyelesaian kekeluargaan belum cukup

Beberapa kasus pelanggaran HAM diselesaikan secara kekeluargaan. Secara praktis, penyelesaian tersebut sangat berguna bila pihak-pihak yang terlibat merasa tidak terganggu lagi. Namun, mengingat pelanggaran HAM berdimensi struktural atau kelembagaan, patut dipertanyakan seberapa memadai penyelesaian tersebut dapat mencegah berulangnya kejadian serupa. Meski pelanggaran, dalam batas-batas tertentu, dapat dialamatkan kepada individu, patut diingat bahwa pelaku adalah anggota suatu lembaga atau struktur (dalam hal ini TNI atau Polri). Oleh karena itu perlu dipertanyakan, sejauh mana pelanggaran tersebut berakar pada kultur di lembaga bersangkutan? Dengan kata lain, sejauh mana cara pandang, sistem pendidikan, atau cara berkomunikasi dengan pihak lain cenderung menghasilkan anggota yang melanggar HAM? Pertanyaan kritis ini perlu dikemukakan agar setiap pelanggaran struktural tidak ditutupi dengan dalih “kesalahan oknum atau salah prosedur”.

3.3.4. Organisasi nonpemerintah: LSM dan Gereja-gereja

Sepanjang 1999 peran ornop di Papua, seperti Els-HAM, Foker LSM Irian Jaya, SKP, dan LBH Jayapura, dalam mengumpulkan fakta, merumuskan masalah, dan mengangkat

berbagai pelanggaran HAM hingga ke tingkat internasional cukup penting. Berbagai ornop juga mengajak masyarakat akar rumput untuk bersikap kritis dan peka terhadap keadaan di sekeliling mereka. Hasilnya, masyarakat akar rumput semakin berani mengangkat masalah mereka.

Di satu sisi apa yang dilakukan oleh ornop merupakan satu terobosan. Tetapi, di sisi lain, perlu dicermati seberapa jauh ornop mampu membangun sikap swabela dan kemampuan mengorganisasikan diri masyarakat akar rumput. Kerap kali terjadi ornop bertindak seperti kutu loncat, bergerak dari satu kasus ke kasus lain tanpa sempat mengembangkan kemandirian masyarakat akar rumput. Padahal, kemandirian ini penting agar masyarakat akar rumput mampu menangani sendiri masalah mereka dan bersikap kritis terhadap pihak lain (termasuk terhadap diri sendiri dan kalangan ornop). Tidak berlebihan bila dikatakan kemandirian dan sikap kritis masyarakat akar rumput merupakan salah satu indikator keberhasilan kerja ornop. Jika masyarakat tetap bergantung pada ornop, maka kinerja ornop patut ditinjau kembali.

3.3.5. Pola menggelapkan fakta masih berlangsung

Sejauh ini masyarakat, melalui LSM atau Gereja-gereja, belum mampu membongkar sistem penggelapan fakta pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Dari lima kasus pelanggaran HAM yang diangkat, hanya kasus Pegunungan Bintang yang ditanggapi oleh TNI/Polri, itupun di tingkat Kodam/Polda. Pemerintah dan DPR(D) terkesan tidak ambil pusing. Betapa tidak. Bila pemerintah dan DPR(D) punya perhatian, maka kasus Mapnduma segera diusut tuntas, mengingat kasus ini melibatkan banyak pihak. Tetapi, yang justru ditangani adalah kasus Pegunungan Bintang yang bersifat lokal. Muncul berbagai pertanyaan serius: apakah karena bersifat lokal dan agak terisolasi maka kasus Pegunungan Bintang yang diusut? Atau, apakah karena mereka sengaja membisu agar fakta yang sesungguhnya tetap gelap? Apakah tindakan tersebut untuk menunjukkan mereka kebal salah dan kebal hukum? Atau, apakah mereka memang tidak mampu menangani masalah?

3.3.6. Pola 'mendiamkan' masalah yang sangat mengganggu

Beberapa peristiwa pada 1999 yang dilaporkan oleh media

massa lokal dan menimbulkan reaksi masyarakat cukup hebat, seperti peristiwa di Merauke (Muting dan Bupul) sekitar 15 Maret, pembunuhan Obeth Badii di Waena pada 28 Maret, pembunuhan di Arso pada 5 Mei, dan hilangnya lima orang di Sarmi pada Desember, secara perlahan menghilang dari perhatian instansi yang berwenang (bahkan masyarakat sendiri).

Pada awalnya, aparat keamanan menyatakan berbagai peristiwa tersebut dilakukan oleh GPK. Kemudian, sejumlah tokoh masyarakat dan LSM menyatakan semuanya merupakan rekayasa aparat keamanan. Setelah timbul perdebatan sesaat, gaung berbagai peristiwa tersebut secara perlahan hilang. Timbul pertanyaan, mengapa pola 'mendiamkan' ini dibiarkan oleh aparat keamanan, DPRD, LSM, tokoh masyarakat, gereja-gereja? Apa pun jawabannya, muncul kesan orang mudah dibunuh dan tidak ada pengusutan secara tuntas. Ambil misal kasus Arso. Ketika para sandera dibebaskan dan pulang ke Jayapura, aparat keamanan sebenarnya berpeluang untuk mengusut tuntas kasus tersebut, tetapi hal ini tidak dilakukan. Para sandera bahkan dijaga untuk tidak membeberkan pengalaman mereka.

3.3.7. Sikap meremehkan laporan pihak lain

Sejumlah laporan (termasuk laporan Komnas HAM) dinilai dibuat-buat oleh Pangdam Trikora.¹⁸ Dapat dimengerti jika Pangdam merasa terganggu dengan berbagai laporan yang ada, namun tidak beralasan bila TNI meremehkan bobot berbagai laporan tersebut. Sikap ini, secara tidak langsung, meremehkan kredibilitas lembaga yang menyusun laporan tersebut. Tak kurang Keuskupan Jayapura mengecam sikap Pangdam tersebut, yang rupanya cukup ampuh sehingga Kodam Trikora bersedia mengusut peristiwa Pegunungan Bintang. Tetap tinggal pertanyaan: mengapa pihak penguasa tidak mau mengakui ada sesuatu yang tidak beres atau bersalah? Padahal, pengakuan demikian merupakan langkah awal yang baik bagi penyelesaian yang diharapkan. Pernyataan Pangdam Trikora, pada dasarnya, bukan saja merendahkan kredibilitas pelapor, tetapi juga kredibilitas TNI dan Polri sendiri.

¹⁸ Lihat catatan 4 September 1999.

3.3.8. Wakil rakyat belum bisa diandalkan

Wakil rakyat yang duduk di DPRD Tingkat I maupun DPR-RI sebenarnya mendapatkan laporan kelima kasus tersebut dari kalangan LSM atau Gereja. Tetapi, mereka tampak tidak peduli atau berpihak pada masyarakat. Kelima laporan tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti secara resmi, misalnya dengan merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk KPP HAM untuk kasus Biak, Mapnduma, Pegunungan Bintang, Manokwari, dan Timika atau merekomendasikan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk meneliti kebenaran kelima laporan tersebut.

3.3.9. Kinerja Komnas HAM di Papua dipertanyakan

Sejumlah pengaduan kasus dan serangkaian pertemuan antara masyarakat Papua dan Komnas HAM telah dilakukan. Akan tetapi, hingga kini belum terdapat langkah hukum sebagai tindak lanjut, bahkan untuk satu kasus pun, termasuk kasus Timika 1995. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila kinerja Komnas HAM dalam menangani berbagai kasus di Papua patut dipertanyakan. Apakah keadaan ini karena bertumpuknya masalah yang ditangani oleh Komnas HAM? Apakah karena instrumen hukum HAM—seperti peradilan HAM dan jaminan perlindungan korban dan saksi—belum tersedia? Ataukah karena Komnas HAM telah dikooptasi oleh kelompok-kelompok yang berkuasa?

Bagian IV Mereka yang Memainkan Peranan Kunci

A. OPM DAN SATGAS PAPUA

Dalam bagian ini diuraikan dua unsur yang mewarnai kehidupan masyarakat Papua pada 1999, yakni OPM dan Satgas Papua. Dibandingkan pada 1970-an hingga 1980-an, peranan OPM agak meredup dan secara perlahan digantikan oleh Satgas Papua.

1. Peristiwa-peristiwa Kunci 1999¹⁹

- ❖ Gagalnya dialog Kodam Trikora-OPM (17/2, 19/2, 23/2, 25/12).
- ❖ Seorang mantan pemimpin OPM mengharapkan agar pemerintah pusat segera memberikan otonomi seluas-luasnya (7/3) atau kemerdekaan (23/11) kepada Papua.
- ❖ Isu GPK menyerang transmigran di Muting dan Bupul (15-16/3), di Arso (5/5, 17/12), dan di Sarmi (9/12).
- ❖ Sebelas orang sandera dibebaskan oleh kelompok OPM pimpinan Hans Bomay (2/6).
- ❖ Kodam Trikora menyatakan OPM memiliki 287 pucuk senjata (12/8).
- ❖ Satgas Papua merazia penumpang kapal yang tiba di Manokwari (24/9).

¹⁹ Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya terbatas. Catatan yang lebih lengkap dapat dibaca di Bagian I.

- ❖ Mozes Weror (OPM di PNG) menginstruksikan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 (21/11).
- ❖ Duaribu anggota Satgas Papua disiapkan untuk mengamankan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember (25/11).
- ❖ Di Timika sekitar 30 anggota Satgas Papua memeriksa dan mencegah kepergian orang Papua di Bandar Udara Timika (4/12).
- ❖ Satgas Papua menemukan sejumlah senjata serta alat-alat perakitan senjata (26/12).

2. Uraian Singkat

2.1. Gerakan OPM

Gerakan OPM sebenarnya kurang mendapat perhatian masyarakat dan pers selama tidak melakukan tindak kekerasan. Namun, menurut pihak aparat keamanan, organisasi ini tetap beroperasi dan menimbulkan sejumlah kasus yang bersifat fatal. Berikut ini adalah beberapa kelompok OPM yang menyita perhatian.

2.1.1. Kelompok Hans Bomay di perbatasan Kerom dengan PNG

Kelompok ini banyak menimbulkan ketakutan masyarakat yang tinggal di wilayah Kerom, khususnya di daerah transmigran Arso. Beberapa kali transmigran di Arso dibunuh secara sadis. Pada 1999 kelompok ini melakukan peristiwa yang menggegerkan, yakni:

- ❖ Membunuh empat karyawan PTP II Arso pada 5 Mei 1999, yakni Bangit, Prayitno, Paino, dan Edi Pranoto, yang ditemukan kemudian di Desa Yamara PIR V.
- ❖ Menyandera 11 orang. Kesebelas sandera dibebaskan pada 2 Juni 1999 dan diserahkan kepada Pemerintah PNG. Pada hari itu juga para sandera dibawa dengan helikopter ke Kodam Trikora untuk selanjutnya menjalani karantina di RS Martin Indey.

2.1.2. Kelompok Matias Wenda di perbatasan Kerom dengan PNG

Berbeda dengan kelompok Hans Bomay, kelompok Matias

Wenda tidak terdengar membunuh dan menyandera. Sebaliknya, kelompok ini terkesan ingin berdialog dengan pihak Kodam Trikora yang bersikap, “Tidak menutup diri, apalagi sampai memusuhi kelompok OPM di Irian Jaya. Sebaliknya, Kodam pada prinsipnya selalu membuka diri dan siap berembuk dengan siapa saja termasuk pihak OPM.” Pernyataan Pangdam Trikora ini menarik karena di masa lampau OPM selalu dikejar-kejar oleh militer sebagai musuh negara, tetapi sekarang diajak duduk berunding.

2.1.3. Kelompok Willem Onde di Kabupaten Merauke

Pada April 1997 kelompok ini menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib di Mindiptana. Mereka menyerahkan senjata dan diberi perumahan di Mindiptana. Meski demikian, sang pemimpin, Willem Onde, lebih suka menetap di Merauke dan sekitarnya. Keberadaannya yang pasti tidak jelas, tetapi masyarakat yang didatangi kerap kali ditekan sehingga ketakutan.

Kendati tidak jelas apakah berhubungan dengan Willem Onde, sekelompok OPM di Merauke pada 15 Maret 1999 menembaki transmigran di Muting, Merauke. Ceritanya serba kabur sehingga fakta yang sebenarnya tetap gelap. Pihak aparat keamanan tidak berusaha mengusut peristiwa tersebut.

2.1.4. Kelompok Tadeus Yogi di Paniai

Kelompok Tadeus Yogi (biasa disebut Yogi) sudah beroperasi di Paniai sejak sekitar 1982.²⁰ Kehadiran kelompok ini mendatangkan status DOM di wilayah Paniai. Akan tetapi, operasi militer yang berlangsung hingga resmi dicabut pada 1998 tidak berdaya guna. Kelompok Yogi tetap hidup dan sekarang malah bebas bergerak keluar masuk ibukota Kabupaten Paniai.

Dalam sejumlah kesempatan, tentara sebenarnya bisa dengan mudah menumpas kelompok Yogi, tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan. Hal ini menimbulkan dugaan kelompok Yogi diperalat

²⁰ Kelompok Yogi muncul saat terjadi peristiwa Madi pada 1981, ketika pihak tentara bertempur dengan kelompok OPM. Lihat juga laporan SKP, “Sketsa Sejarah Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai Di Sekitar Tiga Danau Besar, Kabupaten Paniai, Papua” (Jayapura: November 2000).

TNI sebagai alat legitimasi kehadiran mereka.²¹ Dugaan ini semakin kuat ketika pada September 1999 sejumlah karyawan *base-camp* PT Freeport di Enarotali mengabarkan kelompok Yogi akan menyerahkan diri. Kabar tersebut, yang tidak diketahui penduduk setempat, aparat pemerintah daerah, atau petugas Gereja di Enarotali, semakin tidak jelas kebenarannya setelah coba dicek langsung kepada pihak Yogi. Akhirnya, secara perlahan kabar tersebut hilang bersama dengan kepergian karyawan *base-camp* PT Freeport.

2.1.5. Kelompok Kelly Kwalik di Pegunungan Tengah

Nama Kelly Kwalik berhubungan dengan peristiwa penyanderaan di wilayah Mapnduma (awal 1996) yang menyita perhatian masyarakat di dalam dan luar negeri. Kendati jarang muncul secara terbuka dalam berbagai pertemuan resmi, Kelly Kwalik menjadi lambang perjuangan banyak orang (lebih-lebih di wilayah suku Amungme). Namanya disebut-sebut berkaitan dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Timika pada 10 November 1999 dan pengangkatan Theys H. Eluay sebagai Kepala Suku Besar Masyarakat Papua, 12 November 1999.

2.1.6. Kelompok Paulus Kaladana dan Karel Uropkulin di Pegunungan Bintang

Kedua kelompok OPM ini bergerak di wilayah Pegunungan Bintang. Meski tidak banyak muncul di tengah masyarakat sepanjang 1999, keberadaannya cukup penting. Mereka kerap kali menjadi alat aparat keamanan untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam isu kemerdekaan Papua dan penyerangan oleh pihak OPM ke Oksibil, misalnya, ternyata hanya merupakan cara TNI untuk mengintimidasi masyarakat.²² Tentu saja masyarakat takut dengan berita-berita yang tampak akurat tersebut, bahkan masyarakat dibikin tegang dengan berbagai macam langkah antisipasi, padahal

²¹ Dalam "Laporan Situasi Hak-hak Azasi Manusia di Paniai dan Tigi, 1998" SKP Keuskupan Jayapura mengungkapkan pola yang dipakai TNI untuk memeralat kelompok Yogi.

²² Uraian selengkapnya terdapat dalam laporan SKP Keuskupan Jayapura, Juli 1999, "Dampak Kehadiran Aparat Keamanan Bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang Tahun 1998-Awal 1999".

semuanya hanya rekayasa belaka. Rekayasa aparat keamanan ini telah menjadi pola, tidak hanya di daerah yang berstatus DOM.

2.2. *Perkembangan Satgas Papua*

Satgas Papua dibentuk secara spontan untuk mengamankan anggota Tim 100 sebelum dan sesudah bertemu dengan Presiden Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. Pembentukan satgas ini dimotori oleh Solidaritas Mahasiswa Cenderawasih dan didukung oleh Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) serta dinaungi oleh Lembaga Masyarakat Adat Papua. Satgas ini ternyata cukup efektif mengamankan anggota Tim 100, seperti saat muncul intimidasi dan teror di Jayapura dan Merauke.²³

Secara perlahan Satgas Papua memperluas perannya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Peran penting yang dimainkan oleh Satgas Papua, misalnya, saat menjaga ketertiban sebelum dan selama berlangsung upacara pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 di sejumlah kabupaten, dan saat Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Jayapura pada 31 Desember 1999.

Persoalan muncul ketika Satgas Papua melangkah ke wewenang yang dimiliki Polri, seperti merazia minuman keras dan senjata rakitan, seperti yang berlangsung di Nabire, Manokwari, Jayapura, dan Timika. Satgas di Nabire malah mendirikan pos-pos di jalan yang menuju ke pendulangan emas Topo untuk meminta “sumbangan”. Ironisnya, pihak kepolisian tidak bereaksi, malah terkesan kuat membiarkan aksi tersebut. Akibatnya, keadaan sering tidak terkendali sehingga sempat muncul bentrokan fisik antara warga transmigran dengan Satgas Papua.

Satgas Papua bukanlah suatu organisasi yang teratur, dengan pemimpin yang jelas dan anggota yang diseleksi. Masyarakat Papua dengan mudah mengklaim dirinya sebagai anggota Satgas Papua untuk mencapai maksud yang kadang-kadang bersifat kriminal. Akibatnya, pihak luar dan aparat keamanan memandang seluruh tindakan orang Papua sebagai tindakan Satgas Papua.²⁴

²³ Lihat catatan peristiwa HAM 1999 di atas.

²⁴ Lihat laporan SKP atas kasus di Nabire 28 Februari 2000-4 Maret 2000.

Dalam konteks politik nasional, Satgas Papua bukanlah fenomena khas Papua. Kekuatan semi-militer yang tumbuh di sekitar pusat gerakan massa dan kekuasaan merupakan fenomena yang lazim di jaman Orde Baru, bahkan dilestarikan sebagai “premanisme”.²⁵ Premanisme ini dengan mudah ditemukan di mana saja dan di segala tingkat. Di masyarakat ada preman pasar, di parpol ada satgas partai, di “kelompok Cendana” ada Pemuda Pancasila. Gaya militeristik ini laku di masa Orde Baru karena rejim ini memang didirikan di atas landasan kekerasan yang bercorak militeristik.

Satgas Papua dan OPM memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni: *pertama*, bercorak militeristik. Baik OPM maupun Satgas Papua memiliki bahasa komando atau instruksi berikut lambang-lambang kepangkatan dan simbol-simbol penghormatan. *Kedua*, kedua organisasi dihargai sekaligus diragukan oleh masyarakat. Di satu sisi, masyarakat Papua menghargai OPM dan Satgas Papua karena mereka tegas-tegas menyuarakan aspirasi masyarakat Papua sehingga harkat dan martabat bangsa Papua dihargai dan dihormati oleh pihak luar. Di sisi lain, OPM maupun Satgas Papua kerap kali melukai hati masyarakat Papua dengan tindakan yang tidak terpuji, bahkan hingga mendatangkan trauma yang mendalam. Di masa lalu, masyarakat Papua kerap kali terjepit di tengah-tengah pertikaian antara POM dan TNI/Polri.

Perbedaannya: *pertama*, Satgas Papua diakui oleh polisi, sementara OPM ilegal. Aparat keamanan mengakui Satgas Papua karena fungsinya dianggap setara dengan satpam, kamra, satgas partai politik, atau kelompok ronda malam. Dengan pengakuan tersebut Satgas Papua memiliki ruang untuk bergerak. Sebaliknya dengan OPM. Organisasi ini murni politik dan bersenjata sehingga dikategorikan sebagai musuh negara yang terus diperangi oleh TNI, meski sejumlah kelompok telah menjadi alat rekayasa TNI. *Kedua*, Satgas Papua bersifat insidental dan baru, sementara OPM bersifat kelembagaan yang memiliki akar sejarah panjang. *Ketiga*, OPM berjuang dengan senjata, sementara Satgas Papua berjuang dengan

²⁵ Wawancara Radio Nederland dengan Prof. Benedict Anderson, pakar Indonesia, pada 30 Agustus 2000.

cara mengatur ketertiban setiap penyelenggaraan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat Papua.

2.3. *Proyeksi ke Depan*

Di masa mendatang, eksistensi Satgas Papua dan OPM tidak mudah diprediksikan karena empat hal:

- ❖ Potensi konflik intern. Meski sama-sama memperjuangkan aspirasi “M”, Satgas Papua dan OPM merupakan dua faksi yang tidak sekomando. OPM sendiri terbagi dalam berbagai faksi, sementara Satgas Papua tidak terorganisir secara rapi. Keadaan ini, yang merupakan kelemahan, telah dimengerti oleh masyarakat Papua. Perbedaan sejarah dan gengsi kelompok juga bisa menjadi sumber ketegangan dan tidak mustahil berkembang menjadi konflik intern.
- ❖ Kooptasi oleh pihak penguasa. Pengakuan terhadap Satgas Papua dan kerjasama antara aparat keamanan dan OPM mengindikasikan adanya kooptasi penguasa terhadap kedua organisasi semi-militer tersebut. Masyarakat Papua kiranya perlu menyadari hal ini agar aspirasi mereka tidak dibelokkan atau diperalat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- ❖ Terbukanya pintu kekerasan massa. Kehadiran Satgas Papua dan OPM membuka peluang terjadinya kekerasan massa sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi “M” atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bagi kalangan menengah, aspirasi “M” kiranya bisa terwadahi dalam struktur kepemimpinan yang sudah terbentuk, tetapi tidak demikian dengan masyarakat akar rumput. Luapan emosi mereka seringkali disalurkan dengan bahasa kemarahan atau kekerasan massa.
- ❖ Terbukanya peluang terbentuknya kekuatan tandingan. Belajar dari pengalaman Timor Timur, pembentukan Satgas Papua bisa mengundang kehadiran unsur tandingan, yakni “Satgas Merah Putih”. Kekuatan tandingan ini menyebabkan masyarakat semakin terpecah sehingga konflik horizontal mudah pecah.

B. SIKAP APARAT KEAMANAN

Sejak 5 Oktober 1999 Polri dipisahkan dari TNI. Polri ditugaskan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, sementara TNI ditugaskan untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Sepanjang 1999 peran tentara dan polisi di Papua tetap menonjol, dan mereka masih bertindak secara represif. Masyarakat semakin kritis menilai keberadaan mereka, terutama berkaitan dengan pelanggaran HAM dan aspirasi “M” serta hal-hal yang nonpolitik.²⁶

1. Peristiwa-peristiwa Kunci 1999²⁷

- ❖ Kapolres Fakfak menahan seorang wartawan (3/1).
- ❖ Pangdam Trikora menyatakan belum saatnya menarik pasukan dari Irian Jaya (6/1).
- ❖ Kodam Trikora merekrut 1.000 orang menjadi anggota kamra (6/1).
- ❖ Pangdam menyatakan berniat berdialog dengan pihak OPM (15/2).
- ❖ Kapolda mengeluarkan maklumat yang isinya membubarkan posko-posko dan melarang segala bentuk sosialisasi hasil pertemuan Tim 100 dengan Presiden Habibie (17/4).
- ❖ Aparat keamanan membubarkan posko di Fakfak (5/5) dan Sorong (5/7) dengan jalan kekerasan.
- ❖ Terjadi penembakan di Arso (5/5), Wamena (27/5), Genyem (7/6), Jayapura (9/7), Dempta (27/7), dan Manokwari (24/9).
- ❖ Lima tokoh pejuang Papua dicekal (28/6).
- ❖ Pangdam Trikora menyatakan bahwa berbagai laporan mengenai pelanggaran HAM sebagai mencari-cari masalah saja (29/8–4/9).
- ❖ Kodam Trikora mengirim tim pencari fakta ke Pegunungan

²⁶ Sikap aparat keamanan di bidang politik diuraikan secara panjang lebar dalam analisis mengenai Gerakan Aspirasi Merdeka dan sedikit disinggung dalam bagian ini, yakni tentang OPM dan Satgas Papua.

²⁷ Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya terbatas. Catatan yang lebih lengkap dapat dibaca di Bagian I.

Bintang untuk menindaklanjuti laporan SKP Keuskupan Jayapura (14/9).

- ❖ TNI menyatakan bertekad untuk mempertahankan wilayah NKRI (2/10, 23/11, 5/12).
- ❖ Penggantian Kapolres Manokwari (6/10), Kapolda Irian Jaya (6/11), dan Pangdam Trikora (29/11).
- ❖ Sikap aparat keamanan terhadap rencana aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 sangat membingungkan (15/11, 22/11, 24/11, 27/11, 5/12).
- ❖ Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora diamankan oleh Satgas Papua, dan aparat keamanan membiarkannya (1/12).
- ❖ Bendera Bintang Kejora di Timika diturunkan oleh aparat keamanan (2/12).
- ❖ Kodam Trikora menyatakan keluar dari urusan politik praktis (22/12).

2. Uraian Singkat

Berdasarkan berbagai peristiwa di atas bisa ditarik sejumlah hal:

2.1. Pendekatan Kasih Sayang Perlu Diuji

Menjelang akhir 1999 TNI dan Polri mengedepankan pendekatan baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosio-politik di Papua dengan nama “pendekatan kasih sayang”. Wujud pendekatan ini adalah sikap terbuka untuk berdialog dengan segala macam aspirasi dan faksi politik (seperti elit politik Papua, OPM, Satgas Papua, mantan tapol/napol Papua, dan mantan pejuang Pepera). Akan tetapi, berdasarkan sejumlah indikasi berikut, pelaksanaan pendekatan tersebut masih harus diuji:

1. Sikap mendua dalam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora: tidak melarang tetapi menilai sebagai tindakan melanggar hukum; menurunkan bendera Bintang Kejora dengan kekerasan di Timika; membiarkan pengibaran bendera Bintang Kejora sekaligus bertekad menjaga kesatuan NKRI.
2. Secara diam-diam menjalin hubungan dengan OPM (kelompok Hans Bomay dan kelompok Yogi).²⁸

²⁸ Lihat uraian sebelumnya mengenai “OPM dan Satgas Papua”.

3. Merasa tidak bersalah dan kebal hukum dalam berbagai pelanggaran HAM.²⁹
4. Kepolisian mengedepankan satuan Brimob sebagai pengganti TNI untuk menertibkan aksi-aksi masyarakat sehingga cenderung menimbulkan bentrokan fisik.

2.2. Sikap Arogan dan Sewenang-wenang

Penembakan tanpa alasan, penganiayaan warga masyarakat, dan penangkapan tanpa prosedur yang berlaku mudah terjadi dan pelakunya kerap kali lolos dari sanksi hukum. Kenyataan ini menjadikan sulit menepis kesimpulan bahwa TNI dan Polri di Papua belum beranjak dari gaya lama: arogan dan sewenang-wenang. Aparat keamanan tidak mampu mengembangkan sikap sebagai pendamping masyarakat, melainkan tetap sebagai pengawas dengan cara represif, seolah-olah masyarakat adalah musuh.

2.3. Sikap Menutup Diri terhadap Kritik

Aparat keamanan belum siap menerima kenyataan dirinya bisa salah. Sikap ini tampak jelas tatkala menolak laporan mengenai pelanggaran HAM yang disusun oleh berbagai pihak (masyarakat, LSM, Gereja-gereja, dan Komnas HAM). Sikap demikian mempersulit langkah untuk menciptakan suasana dialogis dan penegakan hukum.

2.4. Merasa Kebal Salah dan Kebal Hukum

Patut dicatat, selain pola menggelapkan fakta dalam kasus-kasus besar,³⁰ TNI dan Polri seolah merasa tidak bersalah dan kebal hukum. Pasalnya, jarang pelaku pelanggaran HAM, baik individu maupun lembaga, mendapat sanksi hukum yang sepadan. Keadaan ini, selain mempertegas kenyataan kekuasaan di atas hukum, sangat menghambat upaya aparat keamanan untuk memperbaiki citranya dengan semboyan “Pendekatan Kasih Sayang”.

²⁹ Lihat uraian sebelumnya mengenai “Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM”.

³⁰ Sikap yang sama muncul dalam menangani masalah Aceh, Ambon, dan Timor Timur.

2.5. Sikap Mendua yang Membingungkan

Setelah pertemuan di Sentani, 12 November 1999, TNI/Polri menunjukkan sikap yang membingungkan. Semula mereka menyatakan pengibaran bendera Bintang Kejora “boleh saja, karena merupakan ungkapan aspirasi rakyat,” namun kemudian dikatakan “pengibarannya dilarang karena melanggar hukum.” Sikap demikian menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan aksi pengibaran bendera akan dipakai sebagai alasan untuk bertindak sangat keras.. Buktinya, di Sorong sejumlah orang diadili karena terlibat aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Sikap mendua tersebut menciptakan suasana tak menentu, sehingga orang bisa main hakim sendiri. Padahal, masyarakat luas mengharapkan pihak keamanan memberikan jaminan kepastian hukum.

C. PERAN PEMERINTAH

Walaupun Republik Indonesia diperintah oleh pemerintah sipil, masyarakat Papua mengalami peran TNI dan Polri yang lebih dominan. Dominasi ini berdampak pada segala segi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila TNI/Polri menjadi sorotan utama masyarakat. Berikut ini sejumlah peristiwa kunci yang menyangkut pemerintah sipil:

1. Peristiwa-peristiwa Kunci 1999³¹

- ❖ Persiapan pertemuan antara Tim 100 dan Presiden Habibie (26/2).
- ❖ Gubernur Irian Jaya menolak aspirasi kemerdekaan Papua dan meminta otonomi khusus bagi Propinsi Irian Jaya (10/3, 16/11).
- ❖ Persiapan serta pelaksanaan Pemilu 1999 ditantang oleh aspirasi “M” (26/2, 21/4).
- ❖ Presiden Habibie meminta Propinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi tiga propinsi (22/4, 25/7, 2/8, 20/8, 17/9).

³¹ Pada bagian ini kami hanya mencatat beberapa peristiwa kunci sehingga jumlahnya terbatas. Catatan yang lebih lengkap dapat dibaca di Bagian I.

- ❖ Bencana banjir (5/6) di Abepura hingga Entrop ternyata berbuntut panjang, khususnya menyangkut pengelolaan uang bantuan Presiden sebesar Rp50 milyar.
- ❖ Para pejuang Papua menolak pemekaran Propinsi Irian Jaya (30/4, 3/8, 6/8, 21/8, 6/9).
- ❖ Pelaksanaan Pemilu 1999 berlangsung lancar dan damai (7/6).
- ❖ Presiden Habibie menyatakan, “Yang mau memisahkan diri dengan NKRI akan berhadapan dengan seluruh kekuatan yang ada di negara RI.” (3/5).
- ❖ Gubernur Irian Jaya menyatakan, “Aspirasi boleh disampaikan asal lewat jalan hukum.” (12/9).
- ❖ Pelantikan secara diam-diam dua gubernur tambahan untuk Propinsi Irian Jaya (11/10).
- ❖ Masyarakat Papua menolak dua gubernur yang baru dilantik (12/10).
- ❖ Tuntutan papuanisasi pejabat pemerintah (4/11).
- ❖ Penolakan masyarakat terhadap otonomi khusus (8/11).
- ❖ Penyampaian aspirasi masyarakat Papua kepada DPR oleh DPRD Irian Jaya (16/12).
- ❖ Nama Propinsi Irian Jaya diganti menjadi Propinsi Papua saat Presiden Abdurrahman wahid berkunjung (31/12).

2. Uraian Singkat

2.1. Pemerintah Sipil Tunduk pada Garis Kebijakan Aparat Keamanan

Bila kita memeriksa berbagai berita utama di harian *Cenderawasih Pos*, muncul kesan pemerintah daerah hanya menjadi “peran pembantu”. Betapa tidak. Berita utama didominasi oleh pernyataan Pangdam Trikora atau Kapolda Irian Jaya, baru kemudian gubernur. Sementara itu, DPRD tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat karena lembaga ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan tidak memiliki suara sendiri.

Sebenarnya, masyarakat sangat mengharapkan dukungan gubernur saat mengungkapkan pelanggaran HAM dan aspirasi “M”, tapi harapan tersebut sia-sia. Terhadap aspirasi “M”, misalnya,

gubernur justru menyatakan “aspirasi ‘M’ adalah aspirasi segelintir orang saja” sehingga tidak perlu diperhatikan secara serius. Perkembangan sepanjang 1999 membuktikan pernyataan gubernur tersebut keliru.

2.2. “Kami tidak Berwenang”

Atas berbagai keluhan/aspirasi masyarakat, DPRD maupun pemda biasanya menyatakan “kami tidak berwenang! Akan diteruskan kepada yang berwenang.” Sikap ini, yang merupakan warisan dari zaman Orde Baru, membuat masyarakat tidak menaruh harapan lagi kepada pemerintah dan DPRD. Masyarakat mau mengadu ke mana lagi?

2.3. Otonomi Daerah serta Pemekaran Wilayah

Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat Papua, terutama aspirasi “M”, pemerintah pusat menjawabnya dengan: (1) memberi otonomi daerah dan (2) memekarkan wilayah Irian Jaya menjadi tiga propinsi. Dalam konteks ini pemerintah daerah dan DPRD terkesan kuat hanya sebagai penyambung lidah pemerintah pusat. Kesan ini tampak dalam berbagai kunjungan mereka ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan kedua rencana tersebut dengan “*gaya briefing*”.

Jelaslah, kedua lembaga tersebut belum mengembangkan iklim dialogis, meski selalu mengaku diri “reformis”. Para pejabat seolah merasa paling tahu apa yang terbaik bagi masyarakat. Kenyataan ini terbukti dalam pengangkatan dua gubernur secara diam-diam pada 12 Oktober 1999, padahal berbagai kalangan tegas-tegas menolak pengangkatan tersebut.

2.4. Kekosongan Kepemimpinan

Perlu dicatat, pada akhir 1999 pemerintahan di Papua ditandai dengan “kekosongan kepemimpinan”. Gubernur Numberi diangkat menjadi menteri, sehingga *de facto* kursinya kosong, sejumlah kursi bupati juga kosong, Kapolda dan Pangdam diganti, dan anggota DPRD (tingkat I maupun II) dalam keadaan tidak aktif. Keadaan ini menjadikan masyarakat berjalan mengambang.

2.5. Penanganan Bencana Banjir

Bencana banjir yang melanda Perumnas IV Padang Bulan dan KPR BPD pada 5 Juni 1999 menunjukkan betapa buruknya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah tidak mampu mengelola dana bantuan yang bernilai milyaran rupiah secara profesional. Para korban harus menanti-nanti cairnya dana tersebut, bahkan harus dengan menuntut secara hukum (melalui LBH Jayapura); sementara instansi seperti Dinas Sosial Tingkat I Irian Jaya justru berpolemik soal akurasi data korban. Yang lebih memprihatinkan, Menteri Sosial yang berkunjung ke lokasi bencana (30/6/1999) hanya bersedia mendengarkan keterangan Kepala Dinas PU Irian Jaya, Ir. Harjadi.

2.6. Pemilihan Umum

Pemda berhasil menyelenggarakan Pemilu 1999 dengan cukup lancar. Seperti biasa, Partai Golkar menang. Kemenangan ini sebagian karena “bantuan wajib” pemerintah setempat yang belum memahami demokrasi. Meski demikian harus dicatat, partisipasi masyarakat Papua, terutama di pedalaman, dalam pemilu kurang, sebagian karena para pemimpin Papua menyerukan untuk memboikot Pemilu 1999.³²

³² Bandingkan dengan pernyataan Tim 100 pada 26 Februari 1999.

Bagian V

Kesimpulan Umum

S etelah mengikuti empat bagian terdahulu, dari sudut perkembangan GERASEM dan kondisi HAM, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai inti perjalanan masyarakat Papua pada 1999, yakni:

DINAMIKA SOSIAL POLITIK

1. Tiga peristiwa yang menjadi latar belakang *memoria passionis* masyarakat Papua adalah *New York Agreement*, pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak menghargai kebebasan masyarakat Papua, dan represi negara terhadap aspirasi masyarakat Papua sehingga mereka terdidik dalam ketakutan, sikap diam, pasif, dan selalu dijadikan obyek/proyek.
2. Reformasi telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyatakan aspirasi mereka, terutama aspirasi “M” seperti yang diungkapkan secara terbuka oleh Tim 100 di hadapan Presiden B.J. Habibie. Aspirasi “M” merupakan kristalisasi dari keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penderitaan.
3. Aspirasi M(erdeka) masyarakat Papua berkembang menjadi GERASEM, yang wujudnya berupa pendirian posko-posko, pengibaran bendera Papua, pembentukan kepemimpinan gerakan, serta lobi di tingkat nasional dan internasional. Akibat terbatasnya informasi, masyarakat kadang bertindak di luar proporsi.

4. Menanggapi GERASEM, TNI, Polri, dan pemerintah umumnya bersikap membiarkan, kecuali dalam hal sosialisasi hasil pertemuan Tim 100 dengan Presiden Habibie melalui posko-posko.

KONDISI HAM

1. Kondisi HAM di Papua secara mudah dapat dilihat dari lima laporan mengenai pelanggaran HAM yang disusun oleh kalangan LSM dan Gereja mengenai: (1) peristiwa Biak, (2) peristiwa Mapnduma, (3) peristiwa Pegunungan Bintang, (4) peristiwa Manokwari, dan (5) peristiwa Timika.
2. Atas lima laporan tersebut, pihak yang berwenang belum mengusutnya secara tuntas, apalagi menyeret pelaku pelanggaran ke pengadilan. Kendati demikian perlu dicatat, ICRC melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa Mapnduma dan Kodam Trikora menindaklanjuti laporan mengenai peristiwa Pegunungan Bintang.
3. Seiring dengan terbitnya kelima laporan tersebut, masyarakat semakin kritis dan berani mengemukakan fakta-fakta yang ada kepada berbagai lembaga di tingkat nasional maupun internasional. Munculnya sikap ini tak lepas dari peran kalangan LSM dan Gereja.
4. Keberanian masyarakat untuk mengungkapkan fakta dihadapkan pada sikap aparat keamanan yang tidak membantu, seperti pola menggelapkan fakta, mendiamkan masalah, atau meremehkan laporan berbagai pihak.
5. DPR-RI maupun DPRD, lembaga yang diharapkan mendukung perjuangan rakyat, terkesan tidak peduli terhadap berbagai laporan HAM yang disampaikan kepada mereka. Demikian pula sikap mereka terhadap GERASEM dan kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.
6. Komnas HAM berusaha menanggapi keberanian masyarakat untuk mengungkapkan fakta yang ada dengan melakukan investigasi, namun belum ada yang ditangani secara tuntas.
7. Satgas Papua merupakan fenomena baru di Papua yang bersifat spontan, cepat menonjol, cepat mendapat dukungan luas, dan

diakui oleh Polri. Di beberapa daerah, beberapa OPM tetap beroperasi secara tersembunyi dan cukup mengganggu kehidupan masyarakat. Satgas Papua dan OPM memiliki kesamaan dan perbedaan. Terdapat sejumlah indikasi Satgas Papua dan OPM diperalat oleh pihak ketiga untuk membelokkan aspirasi “M”.

8. Di seluruh sektor, pemda terkesan berperan sebagai “pemain pembantu”. Kesan tersebut, misalnya, tampak dalam: (1) menanggapi berbagai laporan pelanggaran HAM, (2) menyelenggarakan Pemilu 1999, (3) menanggapi gerakan aspirasi “M”, dan (4) menangani bencana banjir di Padang Bulan atau tenggelamnya kapal di Sorong dan Merauke.

Profil SKP Keuskupan Jayapura

PENDAHULUAN

SKP adalah bagian integral dari Sekretariat Keuskupan Jayapura dan berdiri sejak Juli 1998. Sekarang ini ditangani oleh dua bruder OFM (Theo van den Broek, OFM dan Budi Hernawan, OFM) dan seorang awam, Frederika Korain. SKP bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Uskup Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar, OFM.

Kegiatan SKP meliputi empat aspek besar: (1) melaporkan pelanggaran HAM, (2) mensosialisasikan pemahaman HAM, (3) mengupayakan jalan keluar, dan (4) berperan serta dalam jaringan kerja yang lebih luas.

1. Melaporkan Pelanggaran HAM

Bagi siapa pun yang mengetahui serba-sedikit situasi di Tanah Papua, bukan rahasia lagi kalau masyarakat asli Tanah Papua menderita akibat sering terjadinya manipulasi politik dan kekerasan. Setelah kehilangan statusnya sebagai jajahan Belanda pada 1962, Papua menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia lewat manipulasi politik internasional dan secara dramatis habislah harapan untuk menjadi negeri merdeka. Walaupun diadakan referendum di bawah pengawasan PBB pada 1969, tetapi rakyat

Papua tidak memiliki pilihan sama sekali. Aksi pengkhianatan internasional ini menyisakan pengalaman mendalam, kalau bukan traumatis, dan terpatri di dalam hati masyarakat Papua. Integrasi ini diikuti oleh pengalaman penindasan lebih dari 30 tahun, termasuk pembunuhan semena-mena, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Singkatnya, masyarakat Papua merasa semua ini sudah cukup!

Walaupun banyak penderitaan yang tidak terungkap, mengingat hampir tidak tersedia dokumentasi yang sistematis, sejumlah pengalaman terbaru terdokumentasikan dalam seri laporan pelanggaran HAM. Pendokumentasian ini dipicu oleh sebuah laporan Keuskupan Jayapura pada Agustus 1995 (sebuah laporan dipublikasikan di bawah tanggungjawab mantan Uskup Mgr. Herman Munninghoff OFM), yang umumnya terfokus pada pelanggaran HAM di area pertambangan di Timika (perusahaan Freeport McMoran). Sejak itu beberapa laporan diterbitkan atau disunting oleh SKP di samping Els-HAM (sebuah organisasi nonpemerintah [Ornop] HAM yang seringkali menjadi mitra SKP).

SKP akan terus melaporkan pelanggaran HAM. Dengan caranya sendiri SKP berusaha untuk memikat perhatian orang terhadap bentuk represi agar menjadi lebih jelas, bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tidak bisa dilihat sebagai kasus-kasus terpisah semata atau sebagai buah laku jahat individual. Semua ini bagian dari pola struktural.

SKP tetap berusaha mencermati semua hal tersebut sebagai pelanggaran HAM yang lebih luas. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pemaparan pelanggaran HAM tidak hanya terfokus pada pembunuhan, penyiksaan, dan semacamnya, tetapi juga terfokus pada aneka ragam intimidasi atau pengekan hak seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan berusaha, berbicara, praktik agama, ekspresi budaya, dan semacamnya.

2. Mensosialisasikan Pemahaman Pelanggaran HAM

Situasi sosial-politik Indonesia secara umum dan situasi di Tanah Papua khususnya menjadi sangat kompleks beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut hampir tidak dipahami sebagian

penduduk Papua. Rakyat seringkali puas hanya dengan informasi sepotong-sepotong yang dijejalkan oleh media massa lokal. Hal ini juga berlaku, khususnya, bagi pekerja Gereja dan masyarakat terdidik lainnya di pulau Papua yang relatif terasing. Karena itu, SKP terlibat dalam beberapa upaya untuk mensosialisasikan pemahaman SKP terhadap perkembangan Papua.

Di samping sejumlah pertemuan di lingkungan Jayapura, semua kunjungan lapangan dihabiskan untuk mendiskusikan situasi, menyalurkan informasi sebagai upaya penduduk mengakrabi berbagai masalah dan melengkapi informasi yang seringkali tidak lengkap yang mereka miliki dan gunakan sebagai acuan pandangan dan aksi. Fungsi sosialisasi yang sama kita berikan saat menerbitkan laporan di media nasional maupun lokal. Terbitan yang paling terkenal adalah Dialog Nasional yang berjudul *Memoria Passionis*. Lewat publikasi ini kami berusaha untuk menggambarkan problem Tanah Papua dalam perspektif memori kolektif korban.

Pada paruh kedua 1999 SKP mulai mengembangkan kursus HAM. Upaya ini terkait dengan kebutuhan untuk membangun lingkaran penduduk lokal dari berbagai wilayah yang berbeda yang berguna untuk menangani soal-soal HAM. Ada kebutuhan nyata untuk mengembangkan kursus yang terfokus pada situasi khusus dan latar belakang budaya Tanah Papua. Karena itu, walaupun dimulai dengan materi umum kami berharap secara bertahap melengkapi bahan yang dipakai dengan tema lokal. Untuk sementara unsur utama kursus ini (paling tidak lokakarya empat hari) membahas (1) pemahaman umum HAM, (2) pemahaman mengenai perkembangan di Tanah Papua yang berhubungan dengan soal-soal HAM yang dirasakan penduduk setempat, (3) membangun kemampuan untuk melaporkan pelanggaran HAM, (4) cara untuk mengarah ke jalan keluar, termasuk pemahaman akan pendekatan rekonsiliasi, dan (5) soal-soal HAM yang berkaitan dengan soal gender.

Soal kunci lainnya adalah masalah HAM yang berhubungan dengan soal tanah, tetapi bagian itu masih harus dikembangkan dan saat ini SKP mengandalkkan Ornop lain untuk mengisi kekosongan tersebut.

3. Upaya-upaya Penyelesaian

Mengangkat pelanggaran HAM hanyalah salah satu misi pendirian SKP, lainnya adalah upaya untuk mencari jalan keluar. Kami sangat yakin bahwa mengungkapkan problem atau pelanggaran HAM tanpa komitmen untuk mencari jalan keluar adalah suatu kegiatan yang aneh dan berisiko kontra-produktif. Di satu sisi pemaparan semacam itu adalah hal penting, karena setiap jalan keluar harus berangkat dari pemahaman yang cermat dan mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pemaparan ini berisiko menyebabkan para pelanggar HAM lebih defensif, atau lebih parah lagi, menjadi lebih agresif, khususnya ketika tidak ada jalan yang ditawarkan untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang telah dilakukan

Berdasarkan keyakinan yang disebut di atas, SKP bertekad untuk mengembangkan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan kalau mungkin mencari jalan "rekonsiliasi" tanpa mengendurkan upaya agar keadilan (sosial) dijalankan. Komitmen ini memotivasi SKP untuk mengambil peran "penekan" untuk membuat dialog tetap hidup.

Sejalan dengan komitmen untuk mencari solusi, SKP juga menggunakan media yang tersedia untuk memperluas dan menyuarakan pendapat SKP. Kami menghasilkan sejumlah artikel yang membahas terutama membahas kebutuhan dialog dan rekonsiliasi sambil menyarankan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Upaya-upaya yang berhubungan dengan menumbuhkan iklim rekonsiliasi akan menjadi salah satu prioritas utama SKP di masa datang. Di satu sisi, ini berarti staf SKP dituntut memperdalam pemahaman tentang "tujuan utama rekonsiliasi" dan di sisi lain dituntut untuk menemukan cara untuk mensosialisasikan pengertian ini. Dengan begitu kami berharap secara perlahan akan terbuka kemungkinan untuk dialog lebih lanjut dan "mengobati luka-luka".

4. Berpartisipasi dalam Jaringan Kerja yang Lebih Luas

Misi keterlibatan SKP tidak bisa dilakukan tanpa bergabung dengan masyarakat dan organisasi lain. Kenyataan yang dijadikan titik fokus terlalu besar dan terlalu rumit, di samping terlalu

- No. 3. *Mereka yang Kembali dari Papua New Gunea ke Irian Jaya: Laporan survei yang membahas orang yang kembali ke wilayah Waropko-Mindiptana* (Januari 1999, 32 halaman).
- No. 4. *Dialog Nasional Papua: Sebuah kisah "Memoria Passionis"* (Maret 1999, 10 halaman).
- No.5. *Dampak Kehadiran Aparat Keamanan bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang, Tahun 1998–Awal 1999* (Juli 1999, 19 halaman).
- No.6. *Aspirasi "Merdeka" Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia Awal Tahun 2000: Suatu peta sosio-politik* (Februari 2000, 25 halaman).
- No. 7. *Laporan Situasional Nabire Kabupaten Paniai: Peristiwa 28 Februari serta sebelum dan sesudahnya* (Juli 2000, 20 halaman).
- No. 8. *Sketsa Sejarah Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai: Sebuah laporan lanjutan; laporan pertama Oktober 1998: Memoria Passionis No. 2* (November 2000, 23 halaman).
- No. 9. *Kondisi HAM serta Perkembangan Gerakan Aspirasi Merdeka di Tanah Papua: Gambaran Tahun 1999; kronologi peristiwa pada 1999 ditambah dengan analisis.*

Seri Catatan Sosio-Politik

- No. 1. *Irian Jaya Pasca-Soeharto: Perspektif Menuju Rekonsiliasi* (Juli 1999, 8 halaman).
- No. 2. *Pengibaran Bendera Papua Khususnya Perayaan 1 Desember 1999* (Desember 1999, 13 halaman).
- No. 3. *Catatan Perkembangan Terkini di Papua Pasca-Mubes* (April 2000, 16 halaman).
- No. 4. *Catatan Perkembangan Terkini di Papua: Kongres Papua II* (Januari 2001).

Makalah dan Artikel

1. "Laporan Tahunan 1999", Sekretariat Keadilan dan Perdamaian,

Januari 2000, 10 halaman.

2. *Acuan Latihan Permasalahan dan Rekonsiliasi: Sebuah rangkuman lokakarya analisis masalah dan rekonsiliasi di Papua*, April 2000, 16 halaman. Versi Inggris: *"Reflection Framework on Socio-Political Problems and Process Towards Reconciliation"*.
3. "Efek Obano", artikel tentang harapan yang menyedihkan. Dimuat mingguan *Tifa Papua*,.
4. "Ada Apa di Jakarta", artikel mengenai reaksi Jakarta terhadap Kongres Papua dimuat *Suara Pembaruan*, Juni 2000.
5. "Gambaran Permasalahan di Papua", Juni 2000, 14 halaman (sebuah makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan tatap muka dengan Presiden di Jakarta). Versi Inggris: *"The Problems in Papua"*, 27 Juni 2000, 10 halaman.
6. "Rekonsiliasi dan Penciptaan Perdamaian: Konteks Papua Barat", September 2000, 8 halaman (makalah yang dipresentasikan pada *workshop* "Peran Gereja dalam Advokasi HAM di Biak").
7. "Seruan kepada Komisi Nasional HAM" (seruan sehubungan dengan peristiwa berdarah di Jayapura setelah 7 Desember 2000). Versi Inggris: "Church Appeal", 16 Desember 2000.
8. *Laporan Tahunan 2000*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Januari 2001, 10 halaman.

1999 merupakan tahun pergolakan bagi masyarakat Papua. Pada awal tahun, misalnya, masyarakat Papua untuk pertama kali, setelah sekian puluh tahun, berani secara terbuka mengungkapkan isi hati mereka kepada penguasa, dalam hal ini Presiden B.J. Habibie. Masyarakat Papua ingin merdeka alias memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia. Belakangan, aspirasi ini makin menguat dan terorganisasikan secara terbuka, dan dikenal sebagai Gerakan Aspirasi Merdeka (GERASEM).

Hal ini hanyalah satu mata rantai dari rentetan persoalan masyarakat Papua yang kompleks. Kita tahu, kendati berada di tengah-tengah semangat reformasi, masih terjadi banyak peristiwa yang menyakitkan hati masyarakat Papua. Berbagai peristiwa tersebut menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM), birokrasi yang korup dan tidak efisien, dan praktik-praktik intimidasi oleh aparat sipil dan militer. Ada *memoria passionis* (ingatan penderitaan) yang traumatis dalam jiwa masyarakat Papua.

Buku *Memoria Passionis di Papua* ini mencoba menggambarkan keadaan tersebut secara jujur. Di samping laporan media massa, ada juga analisis yang tajam tentang kondisi nyata masyarakat Papua yang sering kali diabaikan oleh Jakarta.